

**EVALUASI PROSES PELAKSANAAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)  
di KECAMATAN KARANGMOJO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**T E S I S**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

oleh :

**WARIH BUDIYONO SETYAWAN**

NIM : L4D007019



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2008**

**EVALUASI PROSES PELAKSANAAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)  
DI KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

***WARIH BUDIYONO SETYAWAN***  
**L4D007019**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Pada hari Jumat, tanggal 05 bulan Desember tahun 2008

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 05 Desember 2008

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

**WAKHIDAH KURNIAWATI, ST, MT**

**IR. RETNO SUSANTI, MT**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

**Dr. Ir. JOESRON ALIE SYAHBANA, MSc**



**EVALUASI PROSES PELAKSANAAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)  
DI KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

***WARIH BUDIYONO SETYAWAN***  
**L4D007019**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Pada hari Jumat, tanggal 05 bulan Desember tahun 2008

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 05 Desember 2008

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

**WAKHIDAH KURNIAWATI, ST, MT**

**IR. RETNO SUSANTI, MT**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

**Dr. Ir. JOESRON ALIE SYAHBANA, MSc**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka, Apabila dalam Tesis saya ini ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 05 Desember 2008

**WARIH BUDIYONO SETYAWAN**

NIM L4D0070019

## ABSTRAK

Program penanggulangan kemiskinan dirasakan belum terpadu, terarah dan berkesinambungan maka dikembangkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk mencapainya. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan partisipatif. Pada akhirnya sebuah program yang dilaksanakan akan dicari kesesuaiannya dengan konsep program itu sendiri. Apakah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo telah dilaksanakan sesuai dengan konsepnya. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) secara keseluruhan di Indonesia dimulai pada Tahun 1998/1999 sebagai sebuah pengembangan dari program penanggulangan kemiskinan atau Program Inpres Desa Tertinggal. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo dilaksanakan mulai Tahun 2001. Di Kecamatan Karangmojo, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan sejak tahun 2001 sampai tahun 2004 di 9 (sembilan) desa dalam wilayah Kecamatan Karangmojo. Desa-desanya adalah Bendungan, Wiladeg, Bejiharjo, Kelor, Ngawis, Ngipak, Gedangrejo, Karangmojo dan Jatiayu. Bantuan tersebut dilokasikan untuk kegiatan pembangunan prasarana fisik yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi yaitu kegiatan simpan pinjam dan bantuan modal usaha. Bantuan yang dikelola melalui program pembangunan ekonomi (dana bergulir). Dana yang digulirkan akan terus digunakan sebagai pembiayaan ekonomi produktif bagi warga masyarakat selanjutnya. Dana bergulir tersebut dikelola dalam sistem simpan pinjam dana bergulir. Kelompok masyarakat yang memanfaatkan dana simpan pinjam tersebut wajib mengembalikan kepada pengelola di masing – masing desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan perguliran yang nantinya akan dinikmati seluruh warga masyarakat yang membutuhkan untuk membiayai investasi ekonomi yang dilaksanakan dalam kegiatan PPK.

Berdasarkan hal tersebut dilakukan evaluasi dengan penelitian Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan kajian terhadap hasil pelaksanaan program – program, baik program fisik, program ekonomi produktif dan penguatan kapasitas masyarakat yang merupakan komponen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan melakukan analisis terhadap kesesuaian konsep dan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo.

Penelitian ini pada akhirnya didapat kesimpulan bahwa PPK di Kecamatan Karangmojo telah berjalan dengan berpegang pada prinsip-prinsip program itu sendiri. Proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berpegang pada prinsip desentralisasi, keterbukaan, keterlibatan orang miskin dan keterlibatan perempuan serta pelestarian akan memungkinkan tercapainya tujuan program terhadap penguatan kapasitas masyarakat di kecamatan Karangmojo. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo juga telah dapat membangun prasarana fisik yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, berupa jalan, los pasar, jembatan, walaupun belum dapat merata di setiap desa atau dusun. Untuk kegiatan ekonomi berupa pemberian bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam, telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Melalui bantuan kegiatan fisik dan ekonomi maka PPK sebagai salah satu program yang berbasis pemberdayaan, akan memberikan kemudahan akses sosial ekonomi yang pada akhirnya memberikan kondisi perbaikan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Walaupun belum dapat dikatakan dengan adanya pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo telah mampu mengubah secara langsung dan dalam waktu yang singkat terhadap tingkat kemiskinan namun dimungkinkan akan mendorong ke kehidupan yang lebih baik dan secara perlahan namun pasti terwujud. Pada akhirnya PPK harus dipertahankan sebagai sebuah program pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan partisipatif.

Kata Kunci : program pembangunan kecamatan (ppk), karangmojo, evaluasi

## ABSTRACT

*Poverty Overcome Program isn't solid, directed, and continuous yet. So District Development Program (DDP) is developed to achieve it. District Development Program (DDP) is implemented based on participative development program. At last, an implemented program will looked for the equality with the concept itself. Is the District Development Program (DDP) at Karangmojo District has implemented appropriate with the concept. Generally District Development Program (DDP) in Indonesia began in 1998/1999 as a development from poverty overcome program or Presidential Directive Program for Left Behind Village. District Development Program (DDP) at Karangmojo began in year 2001 at Karangmojo District, District Development Program (DDP) implemented in year 2001-2004 in 9 (nine) different villages in Karangmojo District area. They are Bendungan, Wiladeg, Bejiharjo, Kelor, Ngawis, Ngipak, Gedangrejo, Karangmojo, and Jatiayu. The aid was allocated to build facilities that support social economic of local people and economic activities such as saving and loan and capital employed. It organized by economic development program (revolving fund). It will be use for productive economic defrayal for local people. The revolving fund was organized by saving and loans revolving fund system. Groups of people who want to use the fund must refund to the organizer in each villages. It means to maintain the viability of the revolving so that every people can use to defrayed economic investment in SDP implementation.*

*Based on the above, the evaluation with the research of District Development Program (DDP) process at Karangmojo District, Gunungkidul regency is needed in order to study the results of program implementations, they are physically, productive economic, and reinforcement of people capacity program who are the component of District Development Program (DDP) and analyze the concept appropriation to the implementation of District Development Program (DDP) at Karangmojo District.*

*Finally the research concludes that District Development Program (DDP) at Karangmojo District was based on the concept itself. The process of District Development Program (DDP) implementation was based on the decentralization, transparency, needy and women involvement, and conservation concept will possible to achieve the purpose of the program to the reinforcement of people capacity at Karangmojo sub district. District Development Program (DDP) at Kaarngmojo District also can build the facilities that support social economic activities such as roads, markets, and bridges, eventhough it is not spread evenly yet in every village. The economic activities by the giving of financial aid for productive economic and saving and loan was able to increase people prosperity. Through the physically and economic activities, District Development Program (DDP) as one of the development program, will give an easy access to social economic that will give the prosperity improvement according to people ability itself. Although District Development Program (DDP) cannot directly solve the poverty problem, this program will support the realization of better life. Finally District Development Program (DDP) must maintain as a development program based on improvement and involvement.*

*Keywords : District Development Program (DDP), Karangmojo, evaluation*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ucapan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan lancar dan baik

Adapun thesis ini berjudul "Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul".

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepala Pusbindiklatren Bapenas yang telah memberikan kesempatan terlaksananya pendidikan S2 di Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro.
2. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) beserta seluruh civitas akademika MPWK Universitas Diponegoro yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan.
3. Ibu Ir. Retno Susanti, MT, selaku dosen pembimbing satu dalam penyusunan tesis ini, atas bimbingan dan petunjuknya sehingga tesis ini dapat kami selesaikan.
4. Ibu Wakhidah Kurniawati, ST,MT, selaku dosen pembimbing kedua dalam penyusunan tesis ini, atas bimbingan dan petunjuknya sehingga tesis ini dapat kami selesaikan.
5. Ibu Sri Rahayu, ST, M.Si selaku dosen penguji , atas bimbingan dan petunjuknya tesis ini dapat kami selesaikan.
6. Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto, SU, selaku dosen penguji, atas bimbingan dan petunjuknya sehingga tesis ini dapat kami selesaikan
7. Istriku dan anakku yang telah memberikan dukungan moral, pengertian dan waktunya.
8. Rekan-rekan Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY yang telah memberikan dorongan moral dan doanya.
9. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Kelas Bappenas 04 Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menyusun thesis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, arahan dan dorongan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Demikianlah tesis telah dapat kami susun dan penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis, Semarang 5 Desember 2008  
Warih Budiyo Setyawan

## D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan .....	8
1.4 Sasaran.....	8
1.5 Ruang Lingkup Studi .....	9
1.5.1 Ruang Lingkup Substansial.....	9
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial .....	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Metode Penelitian... ..	15
1.7.1 Pendekatan Penelitian.....	15
1.7.2 Metodologi Pelaksanaan Penelitian.....	16
1.7.3 Teknik Analisis.....	17
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.7.5 Kebutuhan Data.....	24
1.7.6 Teknik Sampling.....	28
1.8 Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II KAJIAN LITERATUR EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)</b>	
2.1 Evaluasi Kebijakan Publik .....	33
2.2 Kajian Program Pengembangan Kecamatan (PPK).....	41
2.3 Pemberdayaan Masyarakat .....	50
2.3.1 Konsep Pemberdayaan .....	50
2.3.3 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat .....	52
2.3.4 Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat .....	54
2.3.5 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat .....	59
2.3.6 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat .....	61
2.4 Partisipasi Masyarakat .....	62
2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan.....	65
2.6 Rangkuman Kajian Literatur.....	68

<b>BAB III PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)</b>	
<b>DI KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>	
3.1	Gambaran Umum Kecamatan Karangmojo..... 73
3.1.1	Keadaan Geografis ..... 73
3.1.2	Keadaan Topografi..... 76
3.1.3	Keadaan Klimatologis..... 76
3.1.4	Keadaan Demografi..... 76
3.1.4	Keadaan Sosial Ekonomi..... 77
3.2	Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
	di Kecamatan Karangmojo..... 79
3.2.1	Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan PPK..... 79
3.2.2	Proses-Proses Dalam Pelaksanaan PPK
	di Kecamatan Karangmojo ..... 80
3.2.3	Hasil-Hasil Kegiatan Dalam Pelaksanaan PPK..... 86
3.2.3.1	Kegiatan Ekonomi..... 88
3.2.3.2	Kegiatan Prasarana Fisik..... 89
3.2.3.2	Alokasi Kegiatan Peningkatan Kesehatan
	dan Kualitas Masyarakat (PKKM) ..... 92
3.2.4	Pengelola PPK Kecamatan Karangmojo..... 97
<b>BAB</b>	<b>EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI</b>
	<b>KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>
4.1	Karakteristik Penerima Bantuan PPK..... 99
4.1.1	Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin..... 99
4.1.2	Berdasarkan Mata Pencaharian..... 101
4.1.3	Berdasarkan Pendapatan..... 102
4.1.4	Berdasarkan Pendidikan..... 103
4.2	Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di
	Kecamatan Karangmojo..... 104
4.2.1	Persepsi Berdasarkan Proses..... 106
4.2.2	Persepsi Berdasarkan Hasil..... 112
4.3	Partisipasi Masyarakat Terhadap Program
	Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo..... 117
4.4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan
	Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo..... 124
4.4.1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dimensi Politik..... 125
4.4.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dimensi Sosial Budaya..... 127
4.4.3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dimensi Ekonomi..... 129
4.5	Evaluasi Kesesuaian Konsep dan Implementasi Program
	Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo..... 133
4.5.1	Penerapan Prinsip dan Ketentuan Dasar PPK..... 139
4.5.2	Pemantauan Hasil Kegiatan..... 141

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	147
5.1 Rekomendasi.....	150

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kebutuhan Data.....	27
Tabel I.2	Jenis dan Type Narasumber.....	30
Tabel II.1	Tahapan Tingkat Pemberdayaan Masyarakat.....	61
Tabel II.2	Sintesa Kajian Literatur.....	68
Tabel III.1	Luas Kecamatan Karangmojo dirinci menurut desa.....	73
Tabel III.2	Demografi Kecamatan Karangmojo.....	76
Tabel III.3	Penduduk Menurut Mata Pencapaian.....	77
Tabel III.4	Sumber Penghasilan dan Kualitas Bangunan .....	77
Tabel III.5	Jumlah Rumah Tangga Miskin.....	78
Tabel III.6	Partisipasi Masyarakat Tahun 2001.....	80
Tabel III.7	Partisipasi Masyarakat Tahun 2003.....	82
Tabel III.8	Partisipasi Masyarakat Tahun 2004.....	82
Tabel III.9	Pembahasan Usulan Tahun 2001.....	83
Tabel III.10	Proses Penentuan Usulan PPK Tahun 2003.....	84
Tabel III.11	Proses Penentuan Usulan PPK Tahun 2004.....	85
Tabel III.12	Alokasi Dana PPK Kecamatan Karangmojo.....	86
Tabel III.13	Alokasi Dana BPPK Kecamatan Karangmojo Tahun 2001.....	86
Tabel III.14	Alokasi Dana BPPK Kecamatan Karangmojo Tahun 2003.....	87
Tabel III.15	Alokasi Dana BPPK Kecamatan Karangmojo Tahun 2004.....	87
Tabel III.16	Alokasi Dana PPK Kegiatan Ekonomi Tahun 2001.....	88
Tabel III.17	Alokasi Dana PPK Kegiatan Ekonomi Tahun 2003.....	88
Tabel III.18	Alokasi Dana PPK Kegiatan Ekonomi Tahun 2004.....	89
Tabel III.19	Alokasi Prasarana Jenis Kegiatan Rabat Beton Jalan.....	89
Tabel III.20	Alokasi Prasarana Pekerjaan Perkerasan Jalan.....	90
Tabel III.21	Alokasi Prasarana Pekerjaan Jembatan.....	90
Tabel III.22	Alokasi Prasarana Jenis Pekerjaan Prasarana Los Pasar.....	90
Tabel III.23	Alokasi Prasarana Jenis Pekerjaan Gedung TK.....	91
Tabel III.24	Prasarana Jenis Pekerjaan Bangunan Air.....	91
Tabel III.25	Alokasi PKKM Non Fisik 2003.....	92
Tabel III.26	Alokasi PKKM Non Fisik 2004.....	94
Tabel III.27	Susunan Pengelola UPK Makmur Kcamatan Karangmojo.....	98
Tabel III.28	Pengembangan Dana Ekonomi UPK PPK Karangmojo.....	98
Tabel IV.1	Responden Penerima Bantuan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.....	99
Tabel IV.2	Swadaya Masyarakat.....	121
Tabel IV.3	Indikator Keberhasilan PPK.....	133
Tabel IV.4	Pengembangan Dana Ekonomi UPK PPK Kecamatan Karangmojo.....	141
Tabel V.1	Pengembangan Dana Ekonomi UPK PPK Kecamatan Karangmojo.....	148

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Karangmojo.....	11
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran.....	14
Gambar 2.1 Prosedur Analisis Kebijakan.....	36
Gambar 2.2 Siklus Kebijakan.....	37
Gambar 2.3 Prosedur Kebijakan.....	40
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kecamatan Karangmojo.....	74
Gambar 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul.....	75
Gambar 3.3 Siklus Kegiatan PPK.....	81
Gambar 3.4 Pembangunan Sarana Fisik Desa Gedangrejo.....	95
Gambar 3.5 Pembangunan Sarana Fisik Desa Wiladeg.....	96
Gambar 4.1 Usia Penerima Bantuan.....	100
Gambar 4.2 Jenis Kelamin dan Penerima Bantuan PPK.....	101
Gambar 4.3 Mata Pencaharian Penerima Bantuan.....	102
Gambar 4.4 Tingkat Pendapatan Penerima Bantuan.....	103
Gambar 4.5 Tingkat Pendidikan Penerima Bantuan.....	104
Gambar 4.6 Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang PPK.....	106
Gambar 4.7 Jembatan Hasil Kegiatan PPK Tahun 2001.....	112
Gambar 4.8 Perbedaan Kondisi Antara Sebelum dan Sesudah PPK.....	114
Gambar 4.9 Peningkatan Pendapatan dengan Kegiatan Ekonomi PPK.....	116
Gambar 4.10 Partisipasi Masyarakat.....	118
Gambar 4.11 Partisipasi Masyarakat.....	119
Gambar 4.12 Partisipasi Masyarakat Tahun 2003.....	120
Gambar 4.13 Partisipasi Masyarakat Tahun 2004.....	121
Gambar 4.14 Swadaya Masyarakat Dalam PPK.....	123
Gambar 4.15 Pelaku Kegiatan Ekonomi Produktif.....	129

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable*). Dalam perjalanan waktu, berbagai kebijakan dilaksanakan sejalan dengan sasaran dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila, UUD 1945 dan kebijakan pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan nasional terangkai dalam tiga arah kebijakan yang saling mendukung. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok. Ketiga, kebijakan khusus yang mencakup upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin(Sumodiningrat:2007)

Selanjutnya, bahwa inti yang terkandung dalam ketiga kebijakan tersebut di atas yaitu kebijakan yang diharapkan adalah kebijakan pembangunan yang lestari, kebijakan yang berpijak pada peningkatan peran serta masyarakat (partisipasi), produktifitas rakyat dan efisiensi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat perlu dipahami sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional sehingga mampu secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Kartasasmita:1986). Keyakinan itu perlu terus ditingkatkan dan dimasyarakatkan. Namun keyakinan saja tidak cukup, harus ada langkah nyata untuk menterjemahkan dalam implementasinya.

Langkah-langkah program pemberdayaan masyarakat yang diarahkan secara khusus pada upaya pembangunan wilayah dan penanggulangan kemiskinan makin ditingkatkan dan dilakukan secara nyata pada Pelita VI (tahun anggaran 1994/1995) melalui program khusus peningkatan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah. Program tersebut dimulai oleh Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebagai pemacu dan pemicu sekaligus mengkoordinasikan penyelenggaraan berbagai program pembangunan wilayah dan penanggulangan kemiskinan. Program IDT sebagai payung program pembangunan wilayah dan penanggulangan kemiskinan diselenggarakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai sebuah program khusus untuk mempercepat upaya mengatasi masalah kemiskinan yang diarahkan secara langsung kepada penduduk miskin di wilayah tertinggal.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Program IDT dikembangkan pula Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) yang merupakan pendukung Program IDT. Sebagai program 'pendukung' dapat diartikan bahwa Program P3DT adalah program yang mengiringi langkah Program IDT, artinya P3DT sebagai sebuah program yang cenderung memberikan bantuan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Program IDT. Perlu dipahami bahwa semua program atau kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan wilayah dan penanggulangan kemiskinan pada dasarnya sama walaupun wujud atau komponennya berbeda-beda namun saling berhubungan dan mempunyai tujuan (*goals*) yang sama.

Dalam perkembangannya Program P3DT disempurnakan dalam bentuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai penyelenggaraannya tahun anggaran 1998/1999. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mengutamakan pentingnya mekanisme

perguliran dana bantuan langsung yang dilakukan melalui lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut Unit Pengelola Keuangan (UPK). Penggunaan dana melalui PPK ini dibatasi oleh persyaratan ketat. Dana bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat hanya boleh dipergunakan untuk investasi sosial dan ekonomi produktif.

Program Pengembangan Kecamatan menekankan pelaksanaan penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat di tingkat lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang partisipatif. Bantuan PPK mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal khususnya wilayah kecamatan dalam wadah yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal di tingkat wilayah kecamatan dalam wadah musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan. Melalui PPK, bantuan langsung berupa hibah bergulir diberikan melalui kepala desa dikoordinasi oleh camat dengan peruntukan bagi investasi sosial, investasi ekonomi yang menghasilkan dana bergulir dan kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal (*capacity building and institution building*).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam kenyataannya dilaksanakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia sejak tahun anggaran 1998/1999. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mulai tahun 2008 akan dikembangkan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan di seluruh kecamatan yang berada di kawasan pedesaan atau kecamatan berbasis desa. Beriringan dengan dikembangkannya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) maka dikembangkan pula Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Kedua program ini pada prinsipnya sama, hanya saja lokasi programnya di kecamatan-kecamatan kawasan perkotaan atau berbasis kalurahan.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Karangmojo dilaksanakan mulai Tahun 2001. Di Kecamatan Karangmojo pada awal pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) diberikan bantuan dana bergulir sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bantuan tersebut dilokasikan untuk kegiatan fisik sebesar Rp. 647.971.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh satu Ribu Rupiah untuk kegiatan fisik yang tersebar di 9 (sembilan) desa di wilayah Kecamatan Karangmojo. Untuk kegiatan Pembangunan Ekonomi atau dana bergulir dialokasikan bantuan dana sebesar Rp. 351.765.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Lima Ratus Rupiah).

Bantuan yang dikelola melalui program pembangunan ekonomi (dana bergulir), pada proses selanjutnya diberikan sebagai dana abadi yang pengelolaannya di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Karangmojo sebagai pengendali kegiatan PPK. Dana yang digulirkan akan terus digunakan sebagai pembiayaan ekonomi produktif bagi warga masyarakat selanjutnya. Dana bergulir tersebut dikelola dalam sistem simpan pinjam dana bergulir. Kelompok masyarakat yang memanfaatkan dana simpan pinjam tersebut wajib mengembalikan kepada pengelola di masing – masing desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan perguliran yang nantinya akan dinikmati seluruh warga masyarakat yang membutuhkan untuk membiayai investasi ekonomi yang dilaksanakan dalam kegiatan PPK.

Mengevaluasi kinerja pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bukanlah kegiatan satu kali. Evaluasi kinerja adalah proses yang mencakup perencanaan sejak awal dan memeliharanya secara teratur. Perencanaan kinerja membutuhkan waktu dan dituntut pula satu pemikiran.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai sebuah program yang bertujuan untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, menjadi penting sebagai sebuah kebijakan negara. Program ini diharapkan mampu memberikan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mencakup aspek kegiatan ekonomi, kegiatan fisik, penguatan kelembagaan dan aspek pemberdayaan masyarakat di masing-masing wilayah program. Dari hal tersebut maka akan dilakukan kajian terhadap implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Apakah implementasinya sudah sesuai dengan prinsip – prinsip program tersebut?. Sebagai sebuah kebijakan tentunya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) juga dapat dilakukan penilaian. Bagaimanakah proses pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Pada akhirnya, pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001, dengan penguatan ekonomi produktif lokal diharapkan benar-benar memberikan peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal. Dari hal tersebut di atas dilakukan kajian lebih mendalam tentang proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Adanya kenyataan bahwa masih tidak meratanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan sosial ekonomi warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Karangmojo.
- b. Kurangnya ketersediaan dana abadi yang dapat dipergunakan untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal yaitu desa dan kecamatan.
- c. Masih kurangnya apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tingkat lokal khususnya desa dan kecamatan, sebagai akibat paradigma pembangunan model *'top down'* yang dipergunakan dalam pendekatan pembangunan di masyarakat.
- d. Adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo yang memberikan hibah terhadap pelaksanaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, bantuan dana bergulir yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

Dari perumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian (*Research Question*) nya adalah ***"Bagaimana proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) serta hasil apa yang diperoleh (out put) dari pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di wilayah Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul"***

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

Melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

## **1.4 Sasaran Penelitian**

Sasaran penelitian ini adalah :

1. Melakukan kajian terhadap Program Pembangunan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dari proses perencanaan sampai tahap pemeliharaan.
2. Mengidentifikasi dan melakukan kajian terhadap hasil-hasil yang diperoleh selama kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, baik kegiatan fisik dan kegiatan ekonomi.
3. Melakukan kajian terhadap persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.
4. Melakukan analisa terhadap kesesuaian antara konsep dan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
5. Merumuskan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian (Substansi dan Teritorial)**

### **1.5.1 Ruang Lingkup Substansial**

Dalam penelitian tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, maka secara garis besar pembahasannya akan dibatasi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

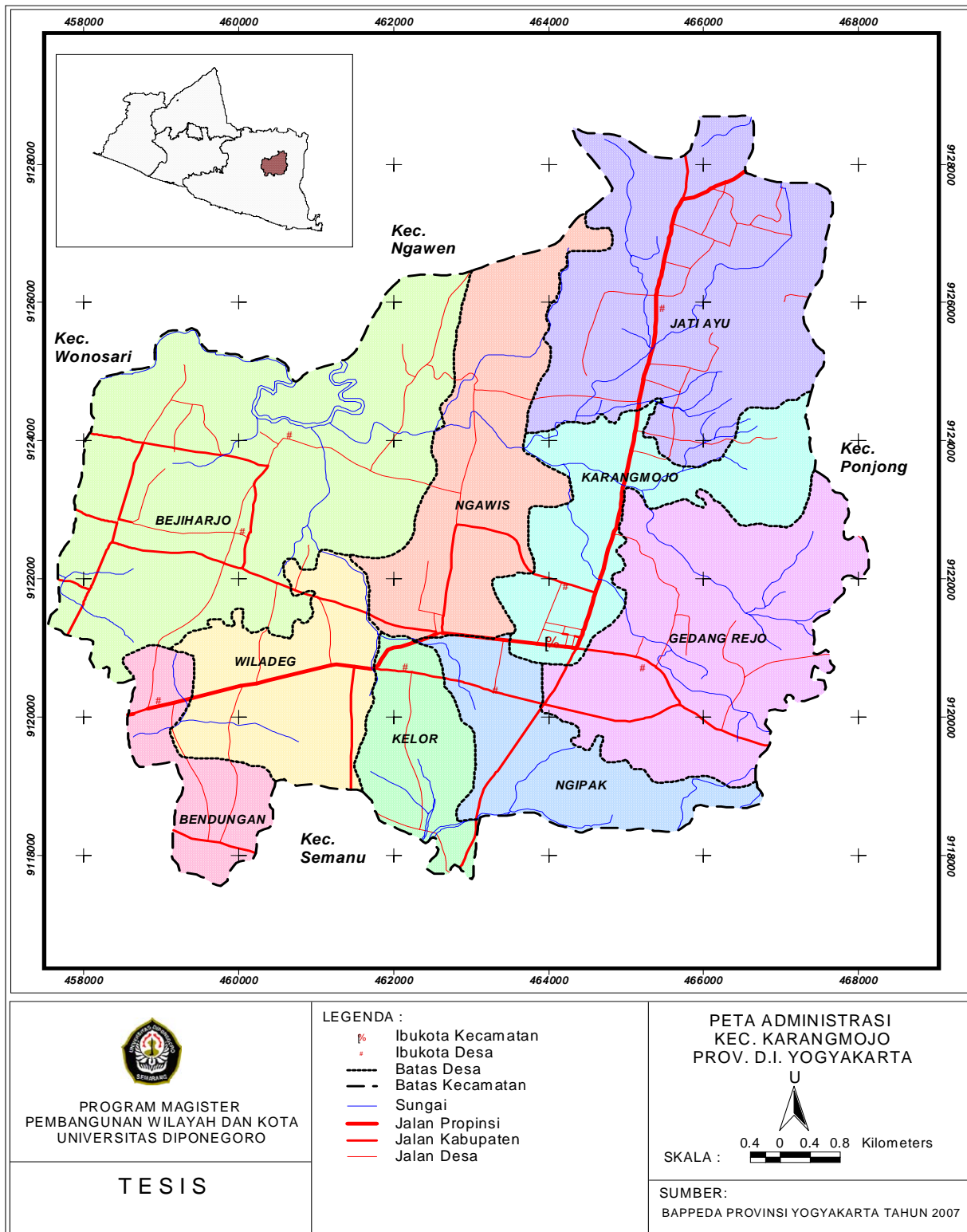
1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada PPK.
2. Persepsi masyarakat Kecamatan Karangmojo terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dengan melihat proses dan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo. Bagaimanakah pendekatan pemberdayaan yang dipakai dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dengan menggunakan sisi pandang (dimensi) politik, sosial budaya dan ekonomi.
4. Evaluasi kesesuaian antara konsep dan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Hal itu akan dinilai dengan prinsip-prinsip dasar atau indikator-indikator penilaian dalam PPK yaitu desentralisasi, keterbukaan, partisipasi, keterlibatan orang miskin, keterlibatan perempuan, kompetisi sehat, swadaya dan pelestarian.

## **15.2 Ruang Lingkup Spasial**

Lingkup penelitian dibatasi pada Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah melaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun 2000. Penelitian dimaksudkan untuk melihat Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul..

Penelitian akan dilakukan di wilayah Kecamatan Karangmojo yang meliputi 9 (sembilan) desa, yaitu :

1. Jatiayu
2. Gedangrejo
3. Kelor
4. Bejiharjo
5. Bendungan
6. Ngawis
7. Karangmojo
8. Wiladeg
9. Ngipak



**GAMBAR 1.1  
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KARANGMOJO**

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Kebijakan pembangunan nasional terangkai dalam tiga arah kebijakan yang saling mendukung. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok. Ketiga, kebijakan khusus yang mencakup upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin.

Kebijakan tersebut sebagai sebuah tanggapan atas kondisi masih tidak meratanya sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi sosial masyarakat, kurangnya ketersediaan dana bagi pengembangan kapasitas sosial ekonomi masyarakat, kurangnya partisipasi dan apresiasi masyarakat dalam pembangunan tingkat lokal terutama desa dan kecamatan dan belum maksimalnya program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat

Berpijak pada hal-hal tersebut di atas, maka dilaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai salah satu program pembangunan partisipatif dengan model pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memberikan bantuan hibah berupa pembangunan sarana dan prasarana, bantuan dana bergulir untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

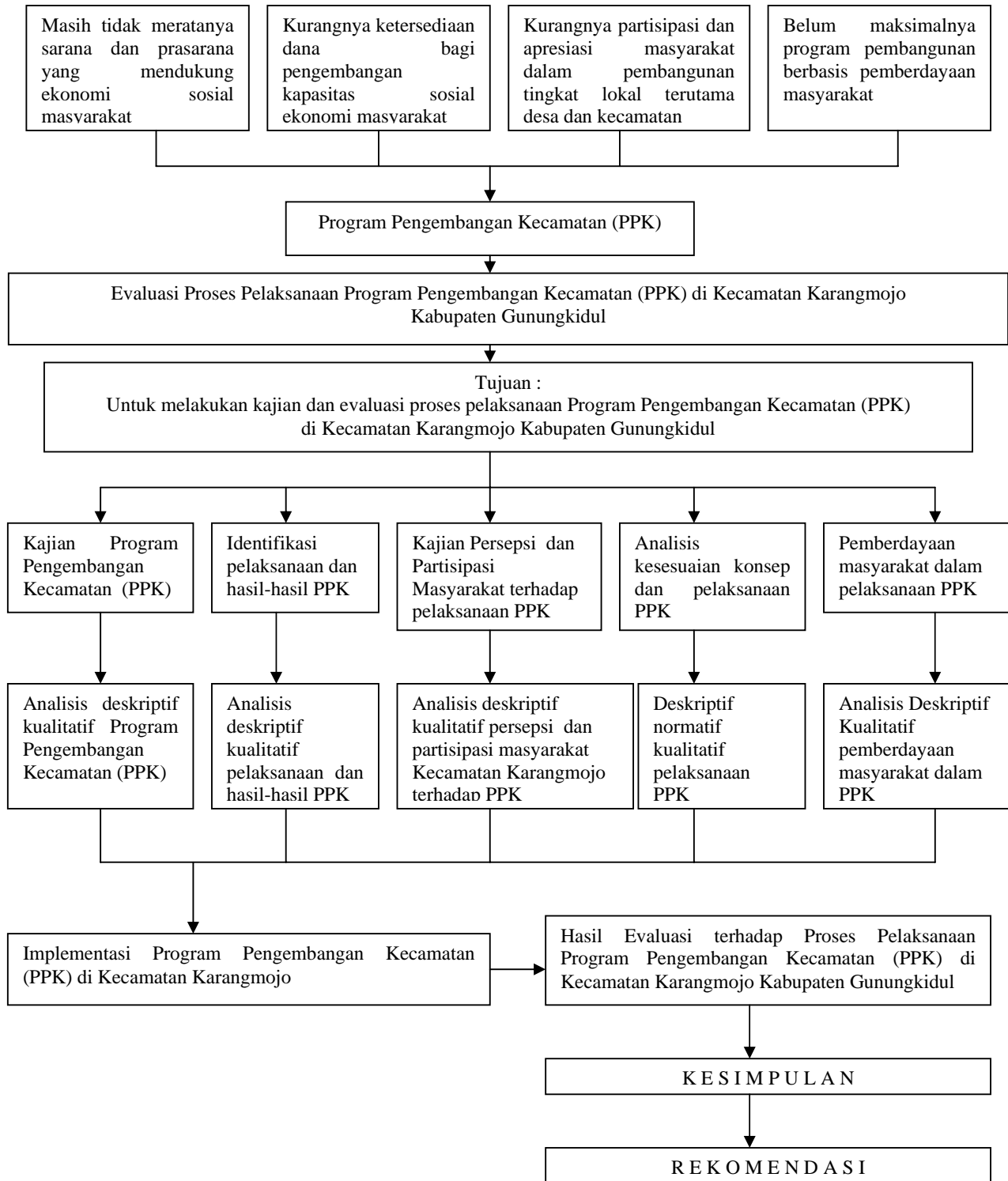
Sebuah pelaksanaan program seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) patut untuk dilakukan evaluasi atau penilaian. Seperti halnya yang dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo Kabupaten

Gunungkidul. Evaluasi yang dimaksud adalah dengan tujuan untuk melihat proses pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Untuk melakukan evaluasi proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilakukan kajian tentang program itu sendiri, identifikasi pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan, kajian tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam PPK, pemberdayaan masyarakat dalam PPK dan analisis kesesuaian konsep dan pelaksanaannya.

Selanjutnya dilakukan juga analisis tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sekaligus bagaimana pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan dalam PPK di Kecamatan Karangmojo. Dilakukan juga analisis persepsi dan partisipasi masyarakat dengan mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat Kecamatan Karangmojo dalam PPK. Dan yang terpenting adalah analisis evaluasi kesesuaian konsep dan pelaksanaan PPK dengan menggunakan indikator atau prinsip-prinsip program tersebut yaitu desentralisasi, keterbukaan, partisipasi, keterlibatan orang miskin, keterlibatan orang miskin, kompetisi sehat, swadaya dan pelestarian.

Dari langkah-langkah tersebut di atas maka akan didapatkan hasil evaluasi atas proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Hasil evaluasi sekaligus memuat tentang kesimpulan tentang proses pelaksanaan program sekaligus rekomendasi yang dihasilkan atas telah dilakukannya evaluasi.



**GAMBAR I.2  
KERANGKA PEMIKIRAN**

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atas fenomena yang ada di lingkup penelitian. Penelitian kualitatif menekankan tujuan eksploratif, yaitu suatu upaya untuk menjelaskan bagaimana fenomena suatu kegiatan terjadi dalam masyarakat yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami permasalahan manusia (sosial) dengan cara menjelaskan informasi dari informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Muhammad; 1999:34). Dalam penelitian ini pemahaman yang digunakan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dapat dipergunakan dalam mengevaluasi terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Menurut Danin (2002:54) penelitian kualitatif mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung. Penelitian kualitatif menggunakan *setting* alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*) untuk pengumpulan data. (Moleong:1994:63). Data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar. Penelitian lebih menekankan pada proses kerja seluruh fenomena yang dihadapi dan diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari. Fokus utama

penelaahan terkait langsung dengan kehidupan manusia. Penggunaan data kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung hasil analisis.

### **1.7.2 Metodologi Pelaksanaan Penelitian**

Studi Evaluasi kebijakan pada prinsipnya berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi (*what happening*) pada saat sebuah kebijakan/program diformulasikan sampai pada saat pelaksanaan kebijakan/program dilaksanakan sampai selesai. Studi ini juga memberikan analisa terhadap masalah-masalah yang timbul.

Dengan demikian studi evaluasi ini difokuskan pada hubungan kausal dengan *outcome* atau dampak kebijakan/program dan keberhasilan kebijakan/program tersebut. Dengan demikian definisi keberhasilan diukur dari proses pelaksanaan kebijakan/program dan sasaran program (*beneficiaries*) serta dampak yang ditimbulkan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yaitu penelitian yang memberikan perhatian kepada proses pelaksanaan satu kebijakan atau program. Dari hal tersebut kemudian ditekankan pada hubungan secara kausal, artinya apakah kebijaksanaan/program tersebut (Program Pengembangan Kecamatan) sesuai dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dari penelitian tersebut juga dapat dideskripsikan kelebihan serta

kekurangan kebijakan/program, untuk dilakukan evaluasi agar kebijakan/program dapat semakin baik.

Metode penelitian ini nantinya akan menguraikan proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), artinya melihat apakah kebijakan/program itu sesuai dengan kriteria/petunjuk yang telah ditentukan, apakah kebijakan/program tersebut tepat sasaran, sesuai target yang ditentukan, apakah kekurangan dari kebijakan/program yang telah dijalankan.

### **1.7.3 Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Adapun tahap analisis dalam penelitian ini adalah :

1. Identifikasi kebijakan pemerintah tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Tahapan ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini berupa data primer maupun sekunder yang meliputi data kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan program tersebut. Teknik yang dipakai adalah deskriptif kualitatif yang akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Hasil akhir dari analisis tersebut menghasilkan rangkaian kajian terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul beserta kegiatan yang telah dilaksanakan baik kegiatan ekonomi, fisik yang dalam kaidah pemberdayaan masyarakat .

## 2. Identifikasi Kondisi Eksisting Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul

Tahapan ini untuk mengetahui geografis Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul sedangkan non fisik meliputi mata pencaharian, tingkat pendapatan dan kondisi eksisting masyarakat. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini berupa data primer maupun sekunder yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara terhadap narasumber serta literatur yang ada. Teknik analisis yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dimana akan mendeskripsikan Karakteristik Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

### 3. Kajian Tentang Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo

Dalam analisis ini mencoba untuk memahami proses pembangunan dalam konsep pemberdayaan masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul serta kondisi nyata yang ada berupa karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat (potensi ekonomi, sosial, politik, kebudayaan). Dari hasil analisis ini dapat dirumuskan faktor-faktor pendorong pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan kontribusi masyarakat dalam program Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sumber data berupa masukan data hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul sehingga dari analisis ini di dapat deskripsi mengenai pandangan dan tanggapan serta pengetahuan masyarakat terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dan proses pemberdayaan masyarakat yang terjadi dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

#### 4. Analisis dan Evaluasi tentang Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Analisis terakhir ini merupakan akumulasi dari ketiga analisis sebelumnya. Dalam analisis ini dilakukan berdasarkan hasil analisis ketiga yang dicoba untuk diabstraksikan dan direfleksikan lebih jauh, guna menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang perlu ditempuh. Dilakukan kajian tentang hasil-hasil yang diperoleh selama implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dicari perbandingan tentang kesesuaian konsep Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan implementasi yang dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Sehingga akan didapatkan kajian berupa hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi program dan keberlangsungan program – program seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dalam pembangunan dengan konsep pemberdayaan.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yang terdiri dari (Marzuki, 2002:55-56):

##### 1. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-

keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan atau dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dokumentasi, yaitu berusaha menghimpun, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber penelitian yang dapat berupa laporan, buku-buku, pedoman dan peraturan pelaksanaan program serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan data-data tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Data tersebut akan mendukung dan melengkapi analisis data yang didapat dari hasil wawancara maupun dari observasi.

## 2. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### a) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang

berbagai aspek kehidupan.

Adapun wawancara itu sendiri berguna untuk :

- Mendapatkan data di tangan pertama (primer).
- Pelengkap teknik pengumpulan lainnya.
- Menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Salah satu teknik pengumpulan data kualitatif adalah wawancara mendalam. Instrumen yang digunakan di sini, yaitu pedoman wawancara. Jika angket dimaksud untuk menjangkau responden yang jumlahnya relatif banyak, wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah responden yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

Tujuan wawancara untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap tokoh kunci (*key person*) yang mengetahui secara rinci masalah dengan jalan dialog/bercakap-cakap/berhadapan langsung. Seorang *interviewer* (pewawancara) menggunakan *guide* (panduan) wawancara yang telah ditentukan sebelumnya

untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam panduan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap topik yang ditentukan. Karakteristik peserta sebaiknya mencerminkan populasi yang diinginkan.

Wawancara dan diskusi dilakukan dengan *stakeholders* untuk mengetahui berbagai aspek antara lain:

- Pengetahuan narasumber terhadap karakteristik wilayah penelitian
- Pengetahuan terhadap materi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul
- Pengetahuan narasumber terhadap peran serta dan partisipasi masyarakat pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangmojo.
- Tanggapan terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.
- Usulan program yang berupa: kegiatan ekonomi dan kegiatan fisik serta penguatan kelembagaan.
- Usulan anggaran biaya yang meliputi besarnya anggaran dan sumber anggaran.
- Usulan sistem pengelolaan.

- Peranan/posisi masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangmojo.

Dalam penelitian ini wawancara mendalam yang dipilih menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin (atau bebas terstruktur), setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik wawancara. Hal ini mengingat bahwa teknik campuran ini masih memberi kebebasan kepada responden dalam batas tertentu, namun juga tidak terlalu memberi ruang bagi penyimpangan masukan responden dari topik bahasan. Responden terpilih diminta untuk memberikan tanggapan mengenai variabel penelitian yang telah ditetapkan, meskipun variabel tersebut masih dimungkinkan untuk berubah (bertambah luas) sesuai masukan pendapat responden. Persepsi responden mengenai variabel tersebut menjadi penopang utama dalam penelitian ini.

b) Pengamatan Lapangan (Observasi Lapangan)

Beberapa informasi yang diperoleh dari pengamatan lapangan terutama yang menyangkut implementasi program. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui implementasi program yang sebenarnya dengan menggunakan alat bantu seperti: alat pemotret, alat perekam suara, alat pengukur dan sebagainya.

### 1.7.5 Kebutuhan Data

Data untuk mendukung penelitian ini dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap tokoh-tokoh kunci (*key persons*) yang berperan dalam pelaksanaan program.

Data/informasi yang dibutuhkan antara lain adalah :

- b. pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan dalam PPK di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.
  - c. pelaksanaan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dalam PPK di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.
  - d. partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.
2. Data Sekunder, yaitu data yang bukan dari diusahakan sendiri dalam pengumpulannya, diperoleh dari instansi terkait dalam penelitian. Data yang diperlukan terdiri dari:
  - Dokumen Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul
  - Laporan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

**TABEL 1.1.**  
**KEBUTUHAN DATA**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Analisa</b>	<b>Data Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Sumber</b>	<b>Tahun</b>	
1	Melakukan kajian dan studi evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo	1	Melakukan kajian terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dasar hukum atas Program Pengembangan Kecamatan (PPK)</li> <li>- Pedoman tentang pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)</li> <li>- Petunjuk pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)</li> </ul>	Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda Kab. Gunungkidul</li> <li>- Pemerintah Kecamatan Karangmojo</li> <li>- UPK PPK Kecamatan Karangmojo</li> </ul>	2001/ 2004
		2	Mengidentifikasi hasil – hasil pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo	Deksriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pekerjaan/kegiatan</li> <li>- Kondisi pekerjaan/kegiatan</li> </ul>	Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kecamatan Karangmojo</li> <li>- UPK PPK Kecamatan Karangmojo</li> </ul>	2001/ 2004
		3	Melakukan kajian terhadap hasil – hasil yang diperoleh selama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo	Deksriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kondisi</li> <li>- pandangan masyarakat</li> </ul>	Primer Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kecamatan Karangmojo</li> <li>- UPK PPK Kecamatan Karangmojo</li> <li>- Kelompok masyarakat</li> </ul>	2001/ 2004

		4	Melakukan kajian terhadap persepsi masyarakat terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo	Deksriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- partisipasi</li> <li>- tanggapan</li> <li>- usulan</li> </ul>	Primer Skunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kecamatan Karangmojo</li> <li>- UPK PPK Kecamatan Karangmojo</li> <li>- Kelompok masyarakat</li> </ul>	2001/2004
		5	Melakukan analisa terhadap kesesuaian konsep dan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo	Deksriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep Program Pengembangan Kecamatan</li> <li>- Implementasi Program Pengembangan Kecamatan</li> <li>- Tanggapan masyarakat</li> </ul>	Primer Skunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kecamatan Karangmojo</li> <li>- UPK PPK Kecamatan Karangmojo</li> <li>- Kelompok masyarakat</li> </ul>	2001/2004
		6	Merumuskan hasil evaluasi terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo	Deksriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep tentang Program Pengembangan Kecamatan</li> <li>- Hasil observasi primer dan sekunder terhadap Program Pengembangan Kecamatan</li> <li>- Kesesuaian antara konsep awal PPK, proses yang terjadi di dalamnya dan hasil yang dicapai</li> </ul>	Primer Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kecamatan Karangmojo</li> <li>- UPK PPK Kecamatan Karangmojo</li> <li>- Kelompok masyarakat</li> </ul>	2001/2004

### 1.7.6 Teknik Sampling

Untuk mengumpulkan data primer dapat digunakan teknik *sampling* (teknik pengambilan sampel). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Moleong, 1994:220). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Ciri-ciri teknik *purposive sampling* adalah (Moleong, 1994:223):

- Pemilihan sampel secara berurutan dengan tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya yang hanya dapat dicapai bila pemilihan satuan sampel sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui;
- Penyesuaian berkelanjutan dari sampel, pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya, namun semakin banyak informasi dan semakin dalam maka sampel-sampel yang dipilih atas dasar fokus penelitian.
- Jika sudah terjadi pengulangan informasi, pemilihan sampel dihentikan.

Faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik ini adalah:

- Mempermudah dalam mencari responden yang representatif pada populasinya dan menguasai objek studi, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

- Diperoleh responden yang benar-benar memahami, atau mengikuti mekanisme atau tahapan kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berupa tokoh kunci (*key person*) yang dipercaya memiliki karakteristik sampel yang diinginkan. Tokoh-tokoh kunci yang diambil berasal dari pihak masyarakat dan pihak pemerintah desa dan kecamatan.

Untuk mengetahui karakteristik penerima bantuan ekonomi diberikan kuesioner sebanyak 20 (duapuluh) orang yang diambil dari masing-masing desa 2 (dua) orang. Kemudian dilakukan juga wawancara terhadap masyarakat umum yang tidak masuk dalam kelompok masyarakat dan dimungkinkan menerima bantuan non ekonomi (prasarana) sebanyak 16 (enambelas) orang. Terhadap tokoh masyarakat juga dilakukan wawancara yang bertujuan menggali informasi tentang proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan PPK yang terjadi di masyarakat. Tokoh masyarakat yang di wawancara masing-masing desa 1 (satu) orang dari 9 (sembilan) desa di Kecamatan Karangmojo. Tokoh masyarakat yang diwawancarai dapat diambil dari unsur Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang dipandang representatif dalam kegiatan PPK. Wawancara juga dilaksanakan terhadap pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Pemerintah desa dilakukan wawancara sebanyak 9 (sembilan) kepala desa dengan berdasar jumlah desa di Kecamatan Karangmojo 9 (sembilan) desa.

Wawancara yang dilakukan adalah sebagai sarana untuk memperoleh gambaran riil tentang proses pelaksanaan program. Wawancara terhadap unsur masyarakat adalah untuk melihat gambaran pelaksanaan program dari perspektif masyarakat sebagai

penerima bantuan, sedangkan wawancara terhadap unsur pemerintah desa dan kecamatan adalah untuk melihat pelaksanaan program dari perspektif pemerintah sebagai pengelola program.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel jumlah sampel berikut

Tabel I.2

**JUMLAH NARASUMBER****JENIS DAN**

No	Narasumber	Jenis Narasumber	Jumlah	Keterangan
1	Masyarakat	1 Pokmas Penerima Bantuan Ekonomi	20	Kuesioner
		2 Masyarakat Non Penerima Bantuan Ekonomi	16	Wawancara
		3 Tokoh Masyarakat	9	Wawancara
2	Pemerintah Desa	Kepala Desa	9	Wawancara
3	Pemerintah Kecamatan	1 Kepala Seksi Pemberdayaan	1	Wawancara
		2 Unsur UPK	2	Wawancara
		3 Fasilitator Kecamatan	2	Wawancara
Jumlah			70	

**1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan dalam bab demi bab sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Berisi latar belakang studi, perumusan masalah, tujuan, sasaran; ruang lingkup studi, kerangka pemikiran; sistematika ; metode penelitian dan kerangka/rancangan penulisan penelitian.

**Bab II Kajian Literatur**

Kajian yang diperoleh dari penelaahan pustaka meliputi : kajian literatur dan hal-hal yang terkait dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai sebuah kebijakan publik serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

**Bab III Deskripsi Obyek Penelitian**

Menguraikan gambaran dan kondisi umum lokasi pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, gambaran umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

#### **Bab IV Evaluasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul**

Berisi pembahasan mengenai kajian Program Pengembangan Kecamatan (PPK); kajian dan identifikasi hasil-hasil ppk; kajian persepsi masyarakat terhadap PPK; analisis kesesuaian konsep dan implementasi PPK dan rumusan hasil evaluasi terhadap implementasi PPK.

#### **BAB V Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran / rekomendasi terhadap hasil studi evaluasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

## **BAB II KAJIAN LITERATUR**

### **2.1 Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi adalah kegiatan menilai mencari terobosan baru untuk penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan, "Apa perbedaan yang dibuat?". Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. (Dunn :2000:36)

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan atau program. Secara umum istilah evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk melakukan analisa hasil sebuah kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam artian yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini dapat disebut bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau dapat diatasi.

Deskripsi utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Pertanyaan yang terlontar tentang evaluasi bukanlah mengenai fakta (apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?).Tetapi berhubungan dengan nilai

(Berapa nilainya?). Karenanya evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya, yaitu :

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik 'fakta' maupun 'nilai'. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan yang demikian harus didukung oleh bukti-bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau, Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dibandingkan hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Dapat dianggap sebagai intrinsik

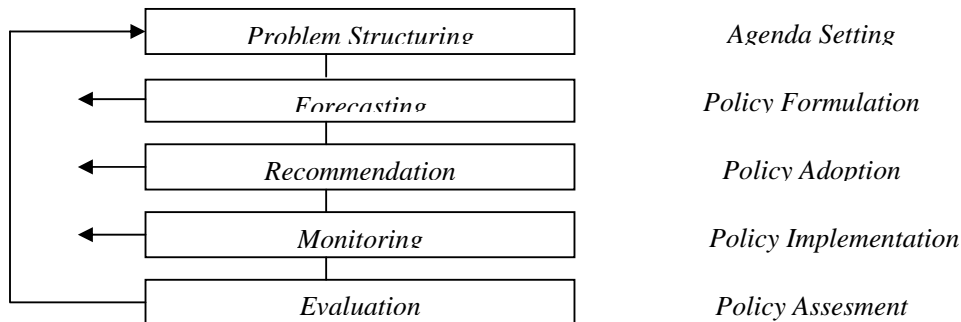
ataupun ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Evaluasi memainkan sejumlah peran utama dalam sebuah analisis kebijakan. *Pertama*, bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan. Dapat diketahui seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (contohnya; perbaikan sarana jalan) dan target tertentu (misalnya, 20 % pengurangan pengangguran).

*Kedua*, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kelayakan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kesesuaian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya kelompok masyarakat) maupun landasan kebijakan dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

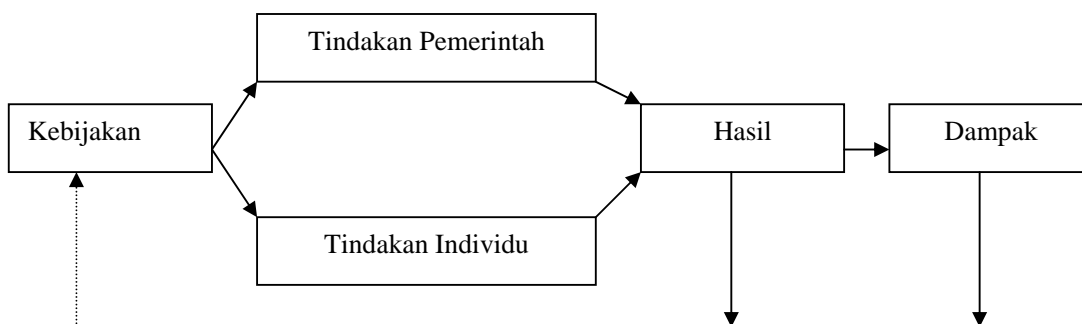
*Ketiga*, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diimplementasikan sebelumnya perlu dikaji ulang atau digantikan dengan kebijakan yang lain.

Evaluasi atau penilaian terhadap sebuah kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Kebijakan yang terdiri dari beberapa tahapan. (Dunn:2000:608)



**GAMBAR 2.1**  
**PROSEDUR ANALALISIS KEBIJAKAN**

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa adanya sebuah kebijakan dimulai dari adanya isu atau masalah yang kemudian diagendakan untuk dicari pemecahannya. Kemudian dilakukan formulasi kebijakan dengan mencari beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut melalui metode *forecasting* (peramalan). Langkah selanjutnya adalah menetapkan atau memilih alternatif pemecahan yang dianggap paling baik. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Setiap tahap tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi atau bahkan menjadi umpan balik (*feed back*) bagi *agenda setting* berikutnya (yang baru). Dari proses tersebut bahwa evaluasi kebijakan atau program menempati urutan paling akhir, artinya bagaimana sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau berjalan dengan baik atau bahkan program tersebut dikatakan gagal, proses tersebut ada dalam tahap evaluasi (*policy assesment*).





Sumber : Wibawa, Samodra, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994

### **GAMBAR 2..2 SIKLUS KEBIJAKAN**

Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (*policy implementation*) seperti gambar di atas. Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (*out put*) tertentu dan dampak tertentu sesuai kebijakan tersebut. Hasil atau *out put* beserta dampak yang ada akan menjadi *feed back* (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (evaluasi) bagi kebijakan sebelumnya. Dari gambar II.2 dan gambar II.3 tersebut di atas, dapat diberikan penjelasan bahwa tahap evaluasi memegang peranan yang signifikan bagi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dengan dilakukannya evaluasi (*policy assesment*), maka suatu program akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan ataukah masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program.

Oleh karena itu, studi evaluasi akan dapat menjawab bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan, apa kendalanya, apakah program dapat mencapai sasaran, variabel-variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan atau program.

Analisis evaluasi akan dapat membantu mengetahui tingkat kepatuhan, menemukan konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang tidak diharapkan, mengidentifikasi hambatan dan kendala-kendala yang ada dan menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

Teori evaluasi kebijakan akan dapat mengetahui peran para aktor dalam pembuatan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan melalui beberapa proses. Pertama, proses pengkajian kebijakan. Dalam proses pengkajian harus memahami metode analisis yang

bertujuan menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

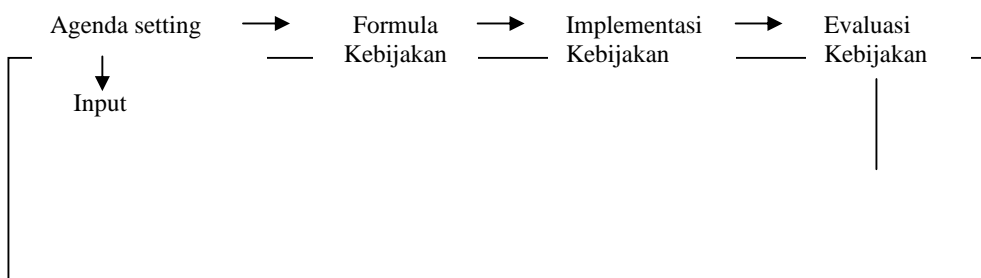
Evaluasi kebijakan dalam memperbaiki pelaksanaan suatu program dan hasilnya perlu empat tahap. Pembuatan materi, komunikasi interaktif dan pemanfaatan pengetahuan. Pengetahuan menunjukkan pada akal sehat yang dapat meningkatkan efisiensi pilihan atas berbagai alternatif kebijakan. Informasi yang relevan dengan kebijakan perlu dikaji untuk pembuatan kebijakan sesuai dengan metodologi analisis dan prosedur evaluasi. Ada 5 (lima) tipe informasi yang relevan dengan kebijakan, yaitu masalah kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan, masa depan kebijakan dan aksi kebijakan (Dunn: 2000:623). Metodologi evaluasi akan memberikan tuntunan umum meskipun belum terpercay dan benar-benar membimbing para analisis.

Kedua, proses pembuatan kebijakan. Proses evaluator kebijakan merupakan aktifitas intelektual dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses pembuatan kebijakan sangat terkait dengan perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi.

Ketiga, proses komunikasi kebijakan, yang terkait dengan dokumen yang relevan dengan kebijakan, presentasi kebijakan, pelaku kebijakan dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Dari teori evaluasi kebijakan tersebut akan dipakai dasar untuk mengevaluasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Secara sederhana proses kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan memproses kepentingan publik menjadi sebuah keputusan kebijakan untuk dilaksanakan.

Prosedur proses kebijakan secara sederhana dapat diikuti pada gambar berikut :





Gambar : Model proses kebijakan, Sumber : Dunn : 2000

### GAMBAR 2. 3 PROSEDUR KEBIJAKAN

Dari gambaran proses kebijakan tersebut maka ruang lingkup studi kebijakan publik gabungan fungsi administrasi, yaitu proses administrasi diawali implementasi dan evaluasi kebijakan. Bahwa secara akademisi ruang lingkup kebijakan publik meliputi: teori kebijakan publik yaitu sebagai ilmu, analisis kebijakan yaitu memprediksi dampak sebelum kebijakan diterapkan, implementasi kebijakan yaitu menilai bagaimana kebijakan itu dioperasikan atau dilaksanakan, evaluasi kebijakan yaitu menjawab masalah yang timbul sebagai akibat dari implementasi kebijakan dan mengantisipasi di masa depan.

Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (*policy implementation*). Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (*out put*) tertentu dan dampak tertentu sesuai tujuan dari kebijakan itu. Hasil atau *out put* beserta dampak yang ada akan menjadi *feed back* (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (evaluasi) bagi kebijakan sebelumnya. Tahap evaluasi memegang peranan yang signifikan bagi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dengan dilakukannya evaluasi (*policy assesment*), maka satu program akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program.

Dalam hal implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dilakukan juga proses pemantauan, pelaporan, evaluasi

dan pengawasan.

Pemantauan implementasi program dilaksanakan dalam sebuah Tim Koordinasi di berbagai tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi). Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala maupun insidental bahkan dimungkinkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan dalam rangka pengendalian kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan secara periodik dan berjenjang.

Pengawasan dilaksanakan melalui jalur struktural dan fungsional oleh aparat, fungsional maupun konsultan.

## **2.2 Kajian Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

### **2.2.1 Latar Belakang (Petunjuk Teknis Operasional PPK 1999/2000)**

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program yang diberi nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Hal tersebut adalah merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

PPK merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan melalui asas PPK yaitu Dari Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM), karena masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan tersebut mulai dari usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai akhirnya pada pelestarian kegiatan tersebut.

PPK merupakan program kelanjutan dari Program Inpres Desa Tertinggal dan Program P3DT. PPK Fase I dimulai tahun anggaran 1998/1999 dan berakhir pada tahun 2001, meliputi kegiatan fisik dan ekonomi. Sedangkan pelaksanaan PPK Fase II pada prinsipnya masih sama

dengan PPK Fase I hanya cakupan kegiatannya lebih luas dengan bertambahnya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan serta untuk pendidikan dan kesehatan.

### **2.2.2 Tujuan (Petunjuk Teknis Operasional PPK 1999/2000)**

Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan yang ada dalam penyelenggaraan pembangunan dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **2.2.3 Sasaran (Petunjuk Teknis Operasional PPK 1999/2000)**

Sasaran utama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah kelompok penduduk miskin.

### **2.2.4 Prinsip-Prinsip Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (Petunjuk Teknis Operasional PPK 1999/2000)**

Desentralisasi, dalam rangka mewujudkan desentralisasi PPK, maka pemerintah menyerahkan wewenang penuh kepada masyarakat untuk mengelola dana PPK dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana PPK serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana PPK.

Transparansi (keterbukaan), pengelolaan seluruh kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Segala sesuatu yang dilakukan oleh semua pelaku Program Pengembangan Kecamatan (PPK) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Partisipasi, pengertian partisipasi dalam PPK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan PPK. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dana PPK di kecamatan melalui forum UDKP setelah sebelumnya dibahas dalam forum musyawarah desa.

Keterlibatan Orang Miskin, PPK mengharuskan keterlibatan orang miskin mulai dari pengambilan keputusan, penentuan kegiatan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kegiatan. Masyarakat miskin harus terwakili dalam setiap proses pengambilan keputusan termasuk dalam perencanaan melalui pertemuan kelompok, dusun dan musyawarah desa serta forum UDKP

Keterlibatan Perempuan, PPK mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap perencanaan dan pelaksanaan program, agar kegiatan dan hasil-hasilnya tidak memarginalkan komunitas perempuan. Perempuan harus terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan melalui kelompok pertemuan dan keikutsertaan wakil-wakil perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan.

Kompetisi Sehat, Usulan-usulan kegiatan masyarakat harus dikompetisikan secara sehat sesuai dengan kriteria kegiatan untuk mendapatkan dukungan dana PPK. Setiap desa berhak mengajukan usulan kegiatan. walaupun yang mengajukan usulan tidak otomatis akan mendapatkan dana bantuan. Kompetisi dimulai dari pemilihan gagasan unggulan di tingkat kelompok/dusun, penentuan usulan kegiatan melalui keputusan desa dalam musyawarah desa dan penentuan kegiatan terpilih melalui keputusan dalam forum UDKP

Swadaya, adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap PPK. Swadaya bisa diwujudkan

dengan menyumbangkan tenaga, dana maupun materiil untuk pelaksanaan serta pemeliharaan kegiatan yang diusulkan

Hibah dan Perguliran, dana PPK adalah hibah dari pemerintah pusat kepada masyarakat di seluruh kecamatan. Untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, dana yang disalurkan tidak wajib dikembalikan dengan syarat masyarakat yang bersangkutan melakukan pengoperasian dan pemeliharaan. Untuk kegiatan penyediaan modal usaha, dana yang disalurkan kepada kelompok adalah pinjaman yang harus dikembalikan.

Sanksi adalah hukum terhadap pelanggaran kesepakatan dan peraturan yang dibuat dalam PPK. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PPK, sehingga warga masyarakat yang seharusnya bisa merasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan. Sanksi dapat ditetapkan oleh masyarakat sendiri dan ditentukan harus diputuskan dalam forum UDKP

Pelestarian, Masyarakat bertanggung jawab terhadap kesinambungan setiap usulan kegiatan yang disulkan dan ditetapkan oleh forum UDKP untuk mendapatkan dana PPK. Seluruh hasil kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan oleh masyarakat wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Segala keputusan yang menyangkut pengembangan atau pelestarian kegiatan harus disepakati dalam musyawarah desa dan atau musyawarah antar desa.

#### **2.2.5 Jenis Kegiatan PPK (Petunjuk Teknis Operasional PPK 1999/2000)**

Jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah :

1. Penyediaan prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan bahwa prasarana yang akan dibangun:
  - a. Dapat menunjang pembangunan pedesaan dan mendorong pengembangan aktifitas ekonomi produktif.
  - b. Dapat meningkatkan efisiensi usaha dan memperkuat akses terhadap sentra produksi dan pasar.
2. Perluasan kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat miskin, meliputi :
  - a. Kegiatan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)
  - b. Kegiatan SP (Simpan Pinjam) khusus Kelompok Perempuan
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan, kesehatan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat dan bantuan manajemen usaha.

Jenis kegiatan yang dilarang dalam PPK terdiri dari :

1. Pembangunan/Rehabilitasi bangunan kantor dan tempat ibadah
2. Pembiayaan gaji pegawai negeri
3. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya
4. Pembelian Chainshaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan
5. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja
6. Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik

7. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata.
8. Pembelian pupuk kimiawi, obat pertanian kimiawi (insektisida, pestisida, herbisida dan sebagainya)

### **2.2.6 Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis (Petunjuk Teknis Operasional PPK 1999/2000)**

Untuk dapat membantu perencanaan dan pelaksanaan agar hasil kegiatan bermutu baik serta guna mendukung fasilitas masyarakat, PPK menyediakan bantuan pendampingan dan bantuan teknis yang terdiri dari :

- a. 2 orang Fasilitator Kecamatan di setiap kecamatan
- b. 1 orang Pendamping Lokal di setiap kecamatan
- c. 2 orang Fasilitator Desa di setiap desa yang dipilih melalui musyawarah desa.

### **2.2.7 Sumber dan alokasi Dana PPK**

(Petunjuk Teknis Operasional PPK 1999/2000)

- a. Sumber dan Alokasi Dana PPK

Sumber dana berasal dari Pemerintah (APBN, APBD), pinjaman luar negeri/Bank Dunia dan masyarakat. Untuk Kecamatan Karangmojo alokasi dana selama 3 tahun pelaksanaan sebesar Rp 3 Milyar.

- b. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana mengikuti ketentuan yang diatur dalam SE DJA Departemen Keuangan. Sedangkan penyaluran dana kepada

masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan waktu tertentu serta diserahkan langsung kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) oleh Unit Pengelola Keuangan

c. Sumber dan alokasi dana TPK, UPK dan Proses PPK

Dana untuk operasional TPK sebesar maksimum 3 % alokasi dana di desa, sedangkan untuk operasional UPK maksimum 2 % alokasi dana di kecamatan

### **2.2.8 Cara Kerja PPK (Petunjuk Teknis Operasional PPK 1999/2000)**

PPK bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Diseminasi Informasi dan Sosialisasi tentang PPK dilakukan dalam beberapa cara. Lokakarya yang dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa untuk menyebarkan informasi dan mempopulerkan program. Di setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media informasi bagi masyarakat. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyebaran informasi (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan) menjadi bagian dalam kegiatan ini.
- Proses perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih fasilitator desa (FD) untuk mendampingi dalam proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Masyarakat kemudian menentukan pilihan terhadap jenis kegiatan pembangunan yang ingin didanai. PPK menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Seleksi proyek di tingkat desa dan kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat

desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan yang akan didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antar desa terdiri dari wakil-wakil dari desa yang akan membuat keputusan akhir mengenai proyek yang akan didanai. Pilihan proyek adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.

- Masyarakat melaksanakan proyek mereka. Dalam pertemuan masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdani. Fasilitator Teknis PPK mendampingi TPK dalam mendesain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat.
- Akuntabilitas dan laporan perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara kegiatan.

## **2.3 Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.3.1 Konsep Pemberdayaan**

Menurut Korten(1988:69) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan

kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Robert Dahl (1983:92), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sementara Hulme dan Turner (1990:78) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Menurut Talcot Parsons dalam Priyono (1996:123), *Power* merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment* adalah daya sehingga *empowerment* dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Priyono, 1996:86).

Kieffer (1984:112) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan :

- a. Perkembangan konsep diri yang lebih positif.
- b. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis.
- c. Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Grand Theories dari konsep *empowerment* (pemberdayaan) ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan (Priyono, 1996:137).

### **2.3.2 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat**

Drijver dan Sajise dalam Sutrisno (2005:74) mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*Participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. Pihak *stakeholder* akan menerima keuntungan dari partisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan sebuah daerah.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat (Sutrisno, 2005) adalah :

1. Mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan.
2. Menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan.
3. Memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan.
4. Mengurangi ketergantungan.
5. Membagi kekuasaan dan tanggung jawab.
6. Meningkatkan tingkat keberlanjutan.

### **2.3.3 Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Suharto (2006:98) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993:124).

Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut (Soetomo, 2006:258 :

- (1) *Getting to know the local community*: Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
- 2) *Gathering knowledge about the local community*: Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

(3) *Identifying the local leader* : Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

(4) *Stimulating the community to realize that it has problems*: Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

(5) *Helping people to discuss their problem*: Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

(6) *Helping people to identify their most pressing problems*: Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

(7) *Fostering self-confidence* : Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

8) *Deciding on a program action*: Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

(9) *Recognition of strengths and resources*: Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

(10) *Helping people to continue to work on solving their problems*: Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

(11) *Increasing people's ability for self-help*: Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kartasmita (1995:139) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

#### **2.3.4 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah

mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down), sehingga pihak pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan objek tetapi subjek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:95), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu

menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

### **2.3.5 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Sulistiyani (2004:143) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Selanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melalui pemberdayaan tersebut, dalam tabel di bawah ini:

**TABEL II.1**  
**TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKAT**

TAHAPAN AFEKTIF	TAHAPAN KOGNITIF	TAHAPAN PSIKOMOTORIK	TAHAPAN KONATIF
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki ketrampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai ketrampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan ketrampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi	Memperkaya variasi ketrampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber : Sulistiyani, 2004

## 2.4 Partisipasi Masyarakat

Menurut Parwoto (1997:148), partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satu kelompok/antar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari landasan konstitusional negara Republik Indonesia maka partisipasi dapat disebut sebagai “Falsafah Pembangunan Indonesia”. Dengan demikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konsep partisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- proaktif atau sukarela (tanpa disuruh)
- adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut
- adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
- adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

Penerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudian disebut sebagai pembangunan partisipatif, yaitu pola pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan langsung menikmati/terkena akibat pembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep partisipasi, dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subjek pembangunan dan sekaligus sebagai objek dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yang berwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstual sehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh perencanaan makro.

Pembangunan partisipatif juga mempertemukan pendekatan dari atas (*top-down*), dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan pendekatan dari bawah (*bottom-up*), yang menekankan keputusan di tangan masyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing. Dalam pembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yang terlibat.

Ada perbedaan wacana mengenai pembangunan dan partisipasi masyarakat, yaitu dari wacana pemerintah dan wacana masyarakat. Menurut Widyatmadja dan Goulet dalam Prijono (1996:51), partisipasi dalam wacana pemerintah adalah lebih menekankan pada pengorbanan dan kontribusi rakyat daripada hak untuk ikut menikmati manfaat pembangunan itu sendiri. Sedangkan dari perspektif rakyat, partisipasi merupakan praktek dari keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut menurut Soetrisno (1995:151) ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar dalam masyarakat. Definisi *pertama* adalah definisi yang diberikan oleh para perencana

pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana /proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.

Definisi *kedua* yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dipakai oleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Menurut Panudju (1996:135) partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan. Dengan demikian, dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap : pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi.

## **2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan**

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencakup tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Berbagai strategi dalam pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Tapi masih saja formulasi untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum mampu sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai kemiskinan itu sendiri. (Marwoto : 2005:108)

Kemiskinan terbagi dalam beberapa pengertian, yaitu :

a. Kemiskinan berdimensi ekonomi

Kemiskinan absolut, suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan relatif, mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum, namun secara relatif pendapatannya masih di bawah rata-rata penduduk sekitarnya.

b. Kemiskinan berdimensi sosial budaya

Kemiskinan kultural, suatu faktor kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan faktor budaya. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai apatis, apolotis dsb. Untuk itu serangan terhadap kemiskinan pada masyarakat ini sama artinya dengan pengikisan budaya ini. Apabila kemiskinan ini tidak dihilangkan maka kemiskinan ekonomi akan sulit diatasi

c. Kemiskinan berdimensi struktural atau politik

Kemiskinan struktural atau politik, kemiskinan ini muncul sebagai akibat masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

d. Kemiskinan berdasar pola waktunya, terbagi dalam beberapa pengertian, yaitu :

- *Persisten poverty*, kemiskinan yang telah kronis dan turun temurun, biasanya daerahnya minim sumber daya alam.
- *Cyclical poverty*, kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- *Seasonal poverty*, kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani gurem ketika masa paceklik atau pada masa gagal panen.
- *Accidental poverty*, kemiskinan yang disebabkan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, Konsep ini dikembangkan di Indonesia di dinyatakan sebagai ” *inability of the individual to met basic needs*” (Marwoto : 2005:97). Konsep tersebut sejalan dengan Sen dalam Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul:2006 yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah ”*The failure to have certain minimum capabilities*”. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu melebihi kemampuan minimum dianggap miskin.

Chambers (1987:141) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan sebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan keterasingan (*isolation*).

Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi, sosial maupun politik. Disamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yang dihadapi.

Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasi struktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskan aspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial. Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapat diterjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.

## 2.6 Sintesa Kajian Literatur

Berdasarkan pendapat ahli/pakar di atas dan sejalan dengan tujuan serta sasaran penelitian ini maka dapat dirangkum sebagai berikut :

**TABEL II.2**  
**SINTESA KAJIAN LITERATUR**

No	Sumber	Teori	Deskripsi	Variabel
Evaluasi Program				
1.	William N. Dunn (1998)	Evaluasi Kebijakan	Evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau	- Evaluasi - Tujuan - Kriteria

			<p>kebijakan dilaksanakan.</p> <p>Dengan dilakukannya evaluasi (<i>policy assesment</i>), maka satu program akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan ataukah masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program.</p> <p>Evaluasi memainkan sejumlah peran utama dalam sebuah analisis kebijakan.</p> <p>Pertama, bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan.</p> <p>Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.</p> <p>Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.</p>	
Pemberdayaan				
2.	Korten ,1992	Pemberdayaan	<p>Pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.</p>	<p>-kemandirian -kapasitas</p>
3.	Suharto, 2006		<p>Pemberdayaan adalah sebuah <i>proses</i> dan <i>tujuan</i>.</p> <p>Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.</p> <p>Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin</p>	<p>-proses -tujuan</p>

			dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.	
Partisipasi				
4.	Soetrisno (1995)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Dua jenis definisi partisipasi yang beredar dalam masyarakat. Definisi <i>pertama</i> adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana /proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Definisi <i>kedua</i> yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program</li> <li>- Pemerintah</li> <li>- Masyarakat</li> </ul>

			melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dipakai oleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan hasil proyek itu.	
<b>Program Pengembangan Kecamatan (PPK)</b>				
5.	Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK, 1999/2000	Latar belakang	Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program yang diberi nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Hal tersebut adalah merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.	
		Tujuan	Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan yang ada dalam penyelenggaraan pembangunan dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Sasaran	Sasaran utama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah kelompok penduduk miskin.	
		Prinsip-Prinsip	- Desentralisasi	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi(keterbukaan )</li> <li>- Partisipasi,</li> <li>- Keterlibatan Orang Miskin,</li> <li>- Keterlibatan Perempuan</li> <li>- Kompetisi Sehat,</li> <li>- Swadaya,</li> <li>- Hibah dan Pengalangan,</li> <li>- Sanksi</li> <li>- Pelestarian,</li> </ul>	
		Caran Kerja	<p>PPK bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Diseminasi Informasi dan Sosialisas.</i></li> <li>• <i>Proses perencanaan partisipatif.</i></li> <li>• <i>Seleksi proyek di tingkat desa dan kecamatan.</i></li> <li>• <i>Masyarakat melaksanakan proyek mereka.</i></li> <li>• <i>Akuntabilitas dan laporan perkembangan.</i></li> </ul>	

**BAB III**  
**PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)**  
**DI KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

### 3.1 Gambaran Umum Kecamatan Karangmojo

#### 3.1.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Karangmojo merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Adapun luas wilayah Kecamatan Karangmojo adalah 35.111.937 ha dengan batas:

- Sebelah Utara :Kecamatan Semin
- Sebelah Timur :Kecamatan Ponjong
- Sebelah Selatan :Kecamatan Semanu
- Sebelah Barat :Kecamatan Wonosari

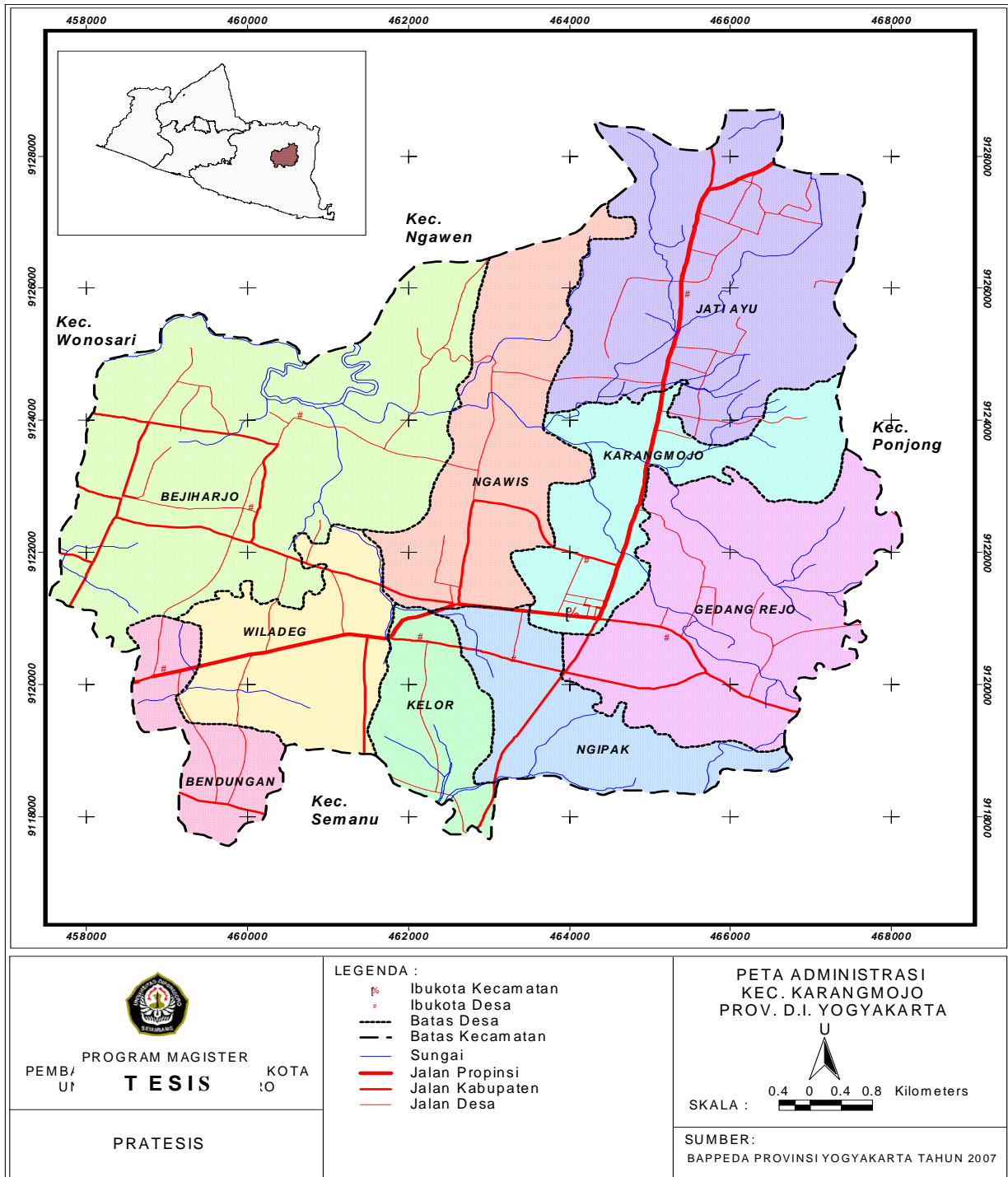
Kecamatan Karangmojo terdiri dari sembilan (9) desa yang masing-masing memiliki luas wilayah sebagai berikut :

**TABEL III.1**  
**LUAS KECAMATAN KARANGMOJO DIRINCI MENURUT DESA**

No	Desa	Luas Tanah (Ha)	% (dari total)
1	Jatiayu	1.280.6900	15,99
2	Gedangrejo	706.5220	8,82
3	Kelor	377.542	4,71
4	Bejiharjo	1.825.482	22,79
5	Bendungan	309.000	3,86
6	Ngawis	737.8250	9,20
7	Karangmojo	1.557.307	19,43
8	Wiladeg	650.162	8,12
9	Ngipak	567.000	7,08
Total		35.111.937	100

*Sumber : Monografi Kecamatan Karangmojo, 2005*

Wilayah Kecamatan Karangmojo terbagi dalam wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 9 desa, 104 dusun, 219 RW dan 505 RT.



**GAMBAR 3.1**  
**PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KARANGMOJO**



GAMBAR 3.2  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

### 3.1.2 Keadaan Topografi

Bentuk wilayah adalah 30 % datar sampai berombak, 60 % berombak sampai berbukit. Sisanya sebesar 10 % berbukit sampai bergunung. (Sumber : *Gunungkidul Dalam Angka 2006/2007*)

### 3.1.3 Keadaan Klimatologi

Ketinggian wilayah kecamatan dari permukaan laut 350 dpl dengan suhu maksimum dan minimum 36°C dan 24°C. Curah hujan, jumlah hujan dengan curah hujan terbanyak 42 hari. Banyaknya Curah hujan 353 mm/th. (Sumber : *Gunungkidul Dalam Angka 2006/2007*)

### 3.1.4 Keadaan Demografi

Jumlah penduduk sampai dengan Desember 2007 adalah 56.469 jiwa dan terbagi dalam 13.170 KK.

**TABEL III.2**  
**DEMOGRAFI KECAMATAN KARANGMOJO MENURUT DESA TAHUN 2005**

No.	Desa	Wilayah			Penduduk			
		Km2	%	Dusun	L	P	Jumlah	%
1	Bendungan	3.09	4.11	5	9.52	1.015	1.967	3.82
2	Wiladeg	6.50	8.67	10	2.088	2.186	4.274	8.28
3	Kelor	3.82	5.09	7	1.401	1.436	2.837	5.49
4	Ngipak	5.67	7.56	9	1.618	1.643	3.261	6.31
5	Karangmojo	11.80	15.71	16	3.744	3.965	7.709	14.92
6	Gedangrejo	4.80	6.39	12	2.939	2.910	5.849	11.32
7	Ngawis	7.37	9.82	12	1.915	2.016	3.931	7.60
8	Bejiharjo	18,25	24.30	20	7.688	7.774	15.462	29.93
9	Jatiayu	13.80	18.38	13	3.097	3.278	6.375	12.33
		80.12	100.00	104	25.442	26.223	51.665	100.0

Sumber : *Monografi Kecamatan Karangmojo Tahun 2005*

### 3.1.5 Keadaan Sosial Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat mata pencahariannya. Sedangkan mata pencaharaan dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah serta tingkat pendidikan masyarakatnya.

**TABEL III.3**  
**PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	11,999	49,81
2	Pengusaha	99	0,41
3	Pengrajin/industri kecil	498	2,07
4	Buruh industri	650	2,70
5	Buruh bangunan	969	4,02
6	Pedagang	6,987	29,01
7	Jasa Transportasi	250	1,04
8	PNS	2,337	9,70
9	ABRI	34	0,14
10	Pensiunan	214	0,89
11	Peternak	50	0,21
	Jumlah	24.087	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Karangmojo Tahun 2005

Sebagian besar penduduk Kecamatan Karangmojo bermata pencaharian sebagai petani (49,81%) kemudian pedagang (29,01 %) serta PNS (9,70%).

**Tabel III.4**  
**SUMBER PENGHASILAN TERBESAR DAN KUALITAS BANGUNAN**  
**DI KECAMATAN KARANGMOJO**

No.	Desa	Sumber Penghasilan	Kualitas Bangunan
1	Bendungan	Pertanian	Bukan Permanen
2	Bejiharjo	Pertanian	Permanen
3	Wiladeg	Pertanian	Permanen
4	Kelor	Pertanian	Permanen
5	Ngipak	Pertanian	Permanen
6	Karangmojo	Pertanian	Bukan Permanen
7	Gedangrejo	Pertanian	Permanen
8	Ngawis	Pertanian	Permanen
9	Jatiayu	Pertanian	Permanen

Sumber: Gunungkidul Dalam Angka 2006/2007

Dari komposisi penduduk tersebut di atas, didapat juga angka kemiskinan di Kecamatan Karangmojo, yaitu sebagai berikut :

**TABEL III. 5**  
**JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2005**

No.	Desa	Rumah Tangga Seluruhnya	Rumah Tangga Miskin	%
1.	Bendungan	548	284	51,82
2.	Bejiharjo	3.565	2.138	59,97
3.	Wiladeg	1.153	612	53,08
4.	Kelor	804	379	47,14
5.	Ngipak	952	654	68,70
6.	Karangmojo	2.371	1.317	55,55
7.	Gedangrejo	1.534	704	45,89
8.	Ngawis	1.105	762	68,96
9	Jatiayu	1.932	1.352	69,98
	Jumlah	13.964	8.202	58,74

*Sumber : Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul, 2005*

### **3.2 Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo**

#### **3.2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan PPK di Kecamatan Karangmojo**

Pelaksanaan program adalah tahapan kegiatan yang dimulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. Kegiatan PPK dimulai dengan sosialisasi melalui Forum Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk tingkat kecamatan dan Musyawarah Desa I untuk tingkat desa. Tahap tersebut merupakan tahap awal dalam mendukung keberhasilan proses dan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PPK pada semua tingkatan sebagai upaya mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak sehingga semua pelaku PPK memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program.

Tahap perencanaan dimulai dari penggalian gagasan di tingkat kelompok dan dusun. Tahap ini merupakan kegiatan untuk menjaring aspirasi terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap perwujudan seluruh rencana yang telah disepakati pendanaannya dalam Forum UDKP/MAD. Pengendalian pelaksanaan PPK dilaksanakan dalam Musyawarah Desa Pertanggungjawaban disamping dilakukan juga pemantauan, pemeriksaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan paska program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab masyarakat dengan dana swadaya. Selain itu diharapkan adanya pengembangan kegiatan tersebut karena pada hakikatnya dana PPK adalah dana stimulan.

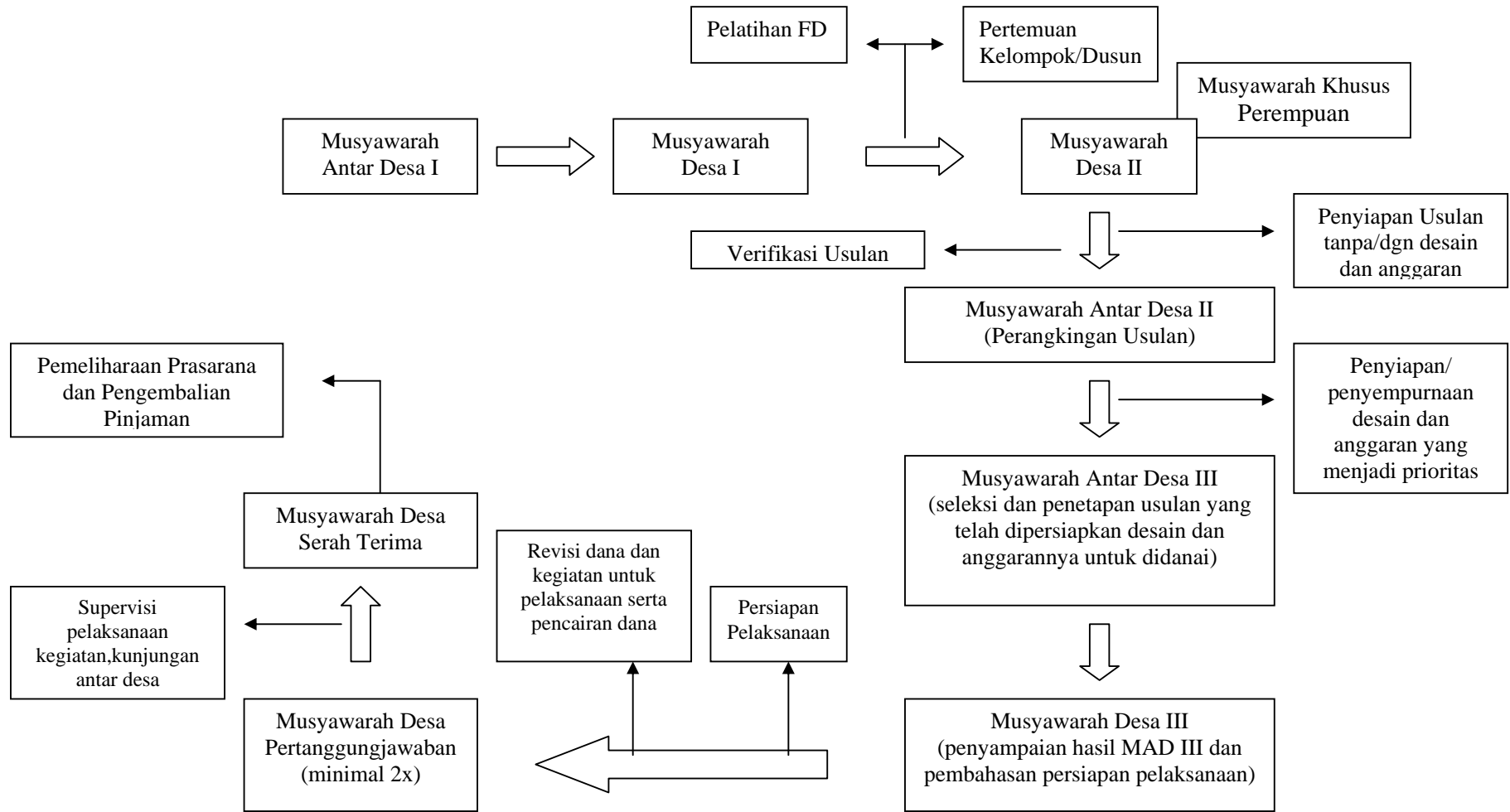
### 3.2.2 Proses-Proses Dalam Pelaksanaan PPK di Kecamatan Karangmojo

Dalam pelaksanaan seluruh proses kegiatan PPK di Kecamatan Karangmojo selama 3 (tiga) siklus yaitu Tahun Anggaran 2000/2001, Tahun Anggaran 2002/2003 dan Tahun Anggaran 2003/2004 secara terperinci baik itu untuk data-data partisipasi masyarakat proses penentuan usulan dapat kita lihat dalam tabel-tabel di bawah ini :

**TABEL III. 6**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT TAHUN 2001**

No.	Kegiatan/Desa	Tanggal	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan		
			Jumlah	Laki2	Perempuan
1	Sosialisasi PPK	02-12/5/01	165	151	14
2	UDKPI	02/06/01	61	45	16
3	Musbangdes I	6-15/6/01	660	450	210
4	Musbangdes I	24/6-5/7/01	4995	2938	2057
5	Musbangdes II	1-23/07/01	2713	2286	427
6	Pertemuan Perempuan	3-28/07/01	483	1	482
7	Musbangdes II	3-12/08/01	713	368	345
8	UDKP	30/10/01	-	-	-
9	Musbangdes III	2-14/11/01	266	170	96
10	Musbangdes Monitoring	20/2-4/3/02	245	-	-

*Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2001*



**GAMBAR III.3**  
**SIKLUS KEGIATAN PPK**

**TABEL III.7**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT TAHUN 2003**

No.	Kegiatan/Desa	Tanggal	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan			
			Jumlah	Laki2	Perempuan	Orang Miskin
1	MAD I	06/03/03	61	45	16	0
2	Musdes I	14-21/03	488	361	127	136
3	Penggalian Gagasan	18/4-10/5/03	4024	2564	1460	2076
4	MKP	18-26/7/03	305	41	264	129
5	Musdes II	30/6-7/7/03	522	330	193	249
6	MAD II	12/8/03	103	62	41	0
7	MAD III	13/09/03	90	48	42	0
8	Musdes III	16-20/09/03	280	173	107	117
9	Pelaksanaan Kegiatan	1/10/03- 10/2/04	1191	934	257	96
10	Musdes Monitoring	8/11- 16/12/04	305	181	124	96
11	Musdes Serah Terima	27/4-13/5/04	359	236	123	192

*Sumber : Dokumentasi Kegiatan PPK Tahun 2003*

**TABEL III.8**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT TAHUN 2004**

No.	Kegiatan/Desa	Tanggal	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan			
			Jumlah	Laki2	Perempuan	Orang Miskin
1	MAD I					
2	Musdes I	19/08/04	418	244	174	125
3	Penggalian Gagasan	12/6-15/8/04	1156	506	650	516
4	MKP	19-24/08/04	196	0	196	53
5	Musdes II	19-24/08/04	418	244	174	125
6	MAD II	14/10/04	87	50	37	-
7	MAD III	-	-	-	-	-
8	Musdes III	18-23/10/04	350	175	175	167
9	Pelaksanaan Kegiatan	28/10- 16/2/05	848	793	98	534
10	Musdes Monitoring	25/11- 20/12/04	287	210	78	138
11	Musdes Serah Terima	2-16/02/05	427	274	153	257

*Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2004*

**TABEL III. 9**  
**PEMBAHASAN USULAN TAHUN 2001**

No	Desa	Usulan dari	Jumlah Usulan Musbangdes		Jumlah Usulan pada UDKP 2		Jumlah Usulan Hasil UDKP 2	
			Ekonomi	Fisik	Ekonomi	Fisik	Ekonomi	Fisik
1	Bendungan	L	5	4	5	5	1	2
		P	5	1	5	0	4	0
2	Wiladeg	L	4	4	3	2	3	1
		P	23	8	19	12	10	0
3	Kelor	L	1	7	4	6	2	2
		P	9	6	5	2	2	2
4	Ngipak	L	0	9	0	6	0	3
		P	13	0	7	3	3	1
5	Karangmojo	L	0	8	0	8	0	1
		P	9	1	9	1	9	0
6	Gedangrejo	L	0	11	0	6	0	1
		P	18	6	10	2	6	1
7	Ngawis	L	24	18	11	5	10	1
		P	12	2	8	2	2	1
8	Bejiharjo	L	19	4	11	2	3	2
		P	21	1	15	3	7	2
9	Jatiayu	L	12	6	9	5	9	2
		P	17	3	11	0	3	0
Jumlah			192	99	132	70	74	22

*Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2001*

**TABEL III.10**  
**PROSES PENENTUAN USULAN PPK TAHUN 2003**

No	Desa	Usulan Yang Dibahas Dalam Pertemuan Tingkat Desa											USULAN HASIL MD II & MKP						USULAN HASIL MAD II						USULAN HASIL MAD III						
		Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)							Musyawarah Desa (MusDes II)				Usulan yang dibahas pada MAD II						Usulan yang dibahas pada MAD III												
		Ekonomi		SARPAS	PKKM			Ekonomi		SARPAS	PKKM			Ekonomi		SARPAS	PKKM			Ekonomi		SARPAS	PKKM								
		SPP	UEP		PD	KE	PLA	SP	UEP		PD	KE	PLA	SPP	UEP		PD	KE	PLA	SPP	UEP		PD	KE	PLA	SPP	UEP	PD	KE	PLA	
1	Bendungan	2	-	1	1	5	-	-	9	8	-	-	-	2	-	1	-	5	-	2	-	1	-	5	-	2	-	1	-	5	-
2	Wiladeg	8	6	-	1	1	10	-	6	9	-	-	3	5	-	1	1	1	-	5	-	1	1	1	-	5	-	1	1	1	-
3	Kelor	1	6	4	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4	Ngipak	7	15	3	1	-	2	-	-	13	-	-	-	4	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-
5	Karangmojo	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	1	1	-	-	6	-	1	1	-	-	6	-	1	1	-	-
6	Gedangrejo	8	6	1	2	8	12	-	6	17	8	-	-	2	2	1	2	5	3	2	2	1	2	5	3	2	2	1	2	5	3
7	Ngawis	4	2	3	-	-	-	-	6	12	1	-	-	4	-	2	-	-	-	4	-	2	-	-	-	4	-	2	-	-	-
8	Bejiharjo	3	13	1	3	10	-	-	6	12	1	-	-	3	-	1	3	10	-	3	-	1	3	10	-	3	-	1	3	10	-
9	Jatiayu	6	10	-	10	10	1	-	2	10	-	-	-	4	4	1	-	-	-	4	4	1	-	-	-	4	4	1	-	-	-
	Jumlah	45	58	14	18	34	25	0	35	86	10	0	6	31	6	10	7	21	3	31	6	10	7	21	3	31	6	10	7	21	3

Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2003

**TABEL III.11  
PROSES PENENTUAN USULAN PPK TAHUN 2004**

No	Desa	Usulan Yang Dibahas Dalam Pertemuan Tingkat Desa											USULAN HASIL MD II & MKP						USULAN HASIL MAD II						USULAN HASIL MAD III						
		Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)						Musyawarah Desa (MusDes II)					Usulan yang dibahas pada MAD II						Usulan yang dibahas pada MAD III												
		Ekonomi		PKKM			Ekonomi		SARPA	PKKM			Ekonomi		SARPA	PKKM			Ekonomi		SARPA	PKKM			Ekonomi		SARPA	PKKM			
		SPP	UEP	SARPA	PKK	PKK	PKK	SARPA		PKK	PKK	PKK	SARPA	PKK		PKK	PKK	SARPA	PKK	PKK		PKK	SARPA	PKK	PKK	PKK		SARPA	PKK	PKK	PKK
1	Bendungan	2	12	1	1	-	-	-	9	6	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-
2	Wiladeg	3	6	-	2	-	3	-	9	9	2	-	2	5	-	1	2	-	2	5	-	1	2	-	2	5	-	1	2	-	2
3	Kelor	2	6	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
4	Ngipak	3	15	1	1	-	3	2	6	1	-	-	-	2	6	1	-	-	-	2	6	1	-	-	-	2	6	1	-	-	-
5	Karangmojo	4	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	6	1	-	-	-	4	6	1	-	-	-	4	6	1	-	-	-
6	Gedangrejo	6	5	1	-	8	12	-	6	13	-	12	-	3	-	1	-	12	-	3	-	1	-	12	-	3	-	1	-	12	-
7	Ngawis	2	2	2	-	-	-	-	6	9	-	-	3	2	8	1	-	-	-	2	8	1	-	-	-	2	8	1	-	-	-
8	Bejiharjo	1	1	-	-	15	-	-	11	11	-	-	-	2	-	1	-	15	-	2	-	1	-	15	-	2	-	1	-	15	-
9	Jatiayu	2	6	12	-	13	1	-	-	11	1	-	-	2	-	1	-	13	-	2	-	1	-	13	-	2	-	1	-	13	-
	Jumlah	25	59	21	6	36	19	2	47	62	3	12	5	24	21	9	3	40	2	24	21	9	3	40	2	24	21	9	3	40	2

Sumber : Doumentasi PPK Tahun 2004

### 3.2.3 Hasil–Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo

Alokasi dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) selama 3 (tiga) tahun anggaran berdasarkan hasil keputusan UDKP II / MAD III adalah sebagai berikut :

**TABEL III.12**  
**ALOKASI DANA PPK KECAMATAN KARANGMOJO**

No	Desa	Alokasi Dana PPK		
		Tahun I 2001	Tahun II 2002	Tahun III 2004
1	Bendungan	73.380.000	80.245.000	89.993.000
2	Wiladeg	140.510.000	110.461.000	110.626.000
3	Kelor	78.153.000	90.498.000	92.746.000
4	Ngipak	99.096.000	115.238.000	109.731.000
5	Karangmojo	154.596.500	86.150.000	108.466.000
6	Gedangrejo	115.099.000	129.638.000	104.997.000
7	Ngawis	69.024.000	120.149.000	120.000.000
8	Bejiharjo	145.815.000	154.999.000	143.740.000
9	Jatiayu	123.614.000	112.522.000	119.298.000
	Jumlah	999.736.500	999.900.000	999.997.000

Sumber : Dokumentasi PPK 2001-2004

**TABEL III.13**  
**ALOKASI DANA BPPK KECAMATAN KARANGMOJO TAHUN I (2001)**

No.	Desa	Alokasi Dana Kegiatan (Rp)				Jumlah
		Ekonomi/Modal Usaha	Prasarana	LKMD	UPK	
1	Bendungan	18.000.000	52.271.343	2.135.394	1.423.263	73.830.000
2	Wiladeg	50.600.000	83.219.000	4.014.600	2.676.400	140.510.000
3	Kelor	16.000.000	58.434.326	2.230.044	1.488.630	78.153.000
4	Ngipak	17.000.000	77.008.200	3.054.700	2.033.100	99.096.000
5	Karangmojo	20.250.000	126.668.000	4.607.500	3.071.000	154.596.500
6	Gedangrejo	51.232.000	58.320.150	3.346.150	2.200.700	115.099.000
7	Ngawis	45.750.000	19.973.000	1.987.000	1.314.000	69.024.000
8	Bejiharjo	38.000.000	100.776.200	4.222.300	2.815.500	145.814.000
9	Jatiayu	78.000.000	39.727.600	3.531.900	2.354.500	123.614.000
	Jumlah	334.832.000	616.397.819	29.129.588	19.377.093	999.736.500

Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2001

**TABEL III.14**  
**ALOKASI DANA BPPK KECAMATAN KARANGMOJO TAHUN II (TAHUN 2003)**

No.	Desa	Alokasi Dana Kegiatan (Rp. X 1.000)								
		SPP	UEP	Pras.	Kes.	Pend.	Pelat.	TPK	UPK	Jumlah
1	Bendungan	5.000	-	57.425	14.000	-		2.292	1.528	80.245
2	Wiladeg	10.000	-	80.098	4.988	10.117		3.155	2.103	110.461
3	Kelor	10.000	-	76.190	-	-		2.585	1.723	90.498
4	Ngipak	10.000	-	99.751	-	-		3.292	2.195	115.238
5	Karangmojo	10.000	-	53.706	-	18.343		2.461	1.640	86.150
6	Gedangrejo	10.000	-	99.730	1.535	1.500	10.486	3.703	2.468	129.422
7	Ngawis	9.700	-	104.730	-	-		3.432	2.287	120.149
8	Bejiharjo	10.000	-	117.619	15.887	4.113		4.428	2.952	154.999
9	Jatiayu	10.000	16.750	80.415	-	-		3.214	2.143	112.522
Total		84.700	16.750	769.664	36.410	34.073	10.486	28.562	19.039	999.684

Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2003

**TABEL III.15**  
**ALOKASI DANA BPPK KECAMATAN KARANGMOJO TAHUN III (2004)**

No.	Desa	Alokasi Dana Kegiatan (Rp. X 1.000)								
		SPP	UEP	Pras.	Kes.	Pend.	Pelat.	TPK	UPK	Jumlah
1	Bendungan	10.000	-	37.161	-	38.547	-	2.571	1.714	89.993
2	Wiladeg	10.000	-	87.303	-	5.225	2.800	3.161	2.107	110.626
3	Kelor	10.000	13.000	65.330	-	-	-	2.650	1.766	92.746
4	Ngipak	10.000	35.000	59.506	-	-	-	3.135	2.090	109.731
5	Karangmojo	10.000	41.400	51.901	-	-	-	3.099	2.066	108.466
6	Gedangrejo	10.000	-	70.569	19.428	-	-	3.000	2.000	104.997
7	Ngawis	10.000	49.000	55.286	-	-	-	3.428	2.286	120.000
8	Bejiharjo	10.000	-	106.095	20.800	-	-	4.107	2.738	143.740
9	Jatiayu	10.000	-	98.000	5.998	-	-	3.420	2.280	119.698
Total		90.000	138.400	631.151	46.226	43.772	2.800	28.571	19.047	999.997

Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2004

### **3.2.3.1 Kegiatan Ekonomi**

Untuk kegiatan ekonomi berdasarkan keputusan Forum UDKP II/ MAD III Kecamatan Karangmojo selama 3 (tiga) tahap pelaksanaan PPK untuk masing-masing desa adalah sebagai berikut :

**TABEL III.16**  
**ALOKASI DANA PPK KECAMATAN KARANGMOJO**  
**KEGIATAN EKONOMI TAHUN I (2001)**

No	D e s a	Pinjaman (Rp)	Pemanfaat (Org)		
			Kelp	L	P
1	Bendungan	18.000.000	5	20	93
2	Wiladeg	50.600.000	13	47	218
3	Kelor	16.000.000	4	23	34
4	Ngipak	17.000.000	3	0	57
5	Karangmojo	20.250.000	9	0	160
6	Gedangrejo	51.232.000	7	0	399
7	Ngawis	45.750.000	12	147	33
8	Bejiharjo	38.000.000	10	15	152
9	Jatiayu	78.000.000	12	88	114
	Jumlah	334.832.000	75	340	1260

*Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2001*

**TABEL III.17**  
**TABEL ALOKASI DANA PPK KECAMATAN KARANGMOJO**  
**KEGIATAN EKONOMI TAHUN II (2002/2003)**

No	D e s a	Pinjaman (Rp)		Pemanfaat (Org)		
		SPP	UEP	Kelp	L	P
1	Bendungan	5.0000	-	2	0	22
2	Wiladeg	10.000.000	-	5	0	64
3	Kelor	10.000.000	-	1	0	10
4	Ngipak	10.000.000	-	4	0	39
5	Karangmojo	10.000.000	-	6	0	50
6	Gedangrejo	10.000.000	6.000.000	4	0	52
7	Ngawis	9.700.000	-	2	0	52
8	Bejiharjo	10.000.000	-	3	0	32
9	Jatiayu	10.000.000	16.750.000	8	24	92
	Jumlah	84.700.000	22.750.000	35	24	413

*Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2003*

**TABEL III.18**  
**ALOKASI DANA PPK KECAMATAN KARANGMOJO**  
**KEGIATAN EKONOMI TAHUN III (2004)**

No	D e s a	Pinjaman (Rp)		Pemanfaat (Org)		
		SPP	UEP	Kelp	L	P
1	Bendungan	10.000.000	-	2	0	20
2	Wiladeg	10.000.000	-	5	0	50
3	Kelor	10.000.000	13.000.000	3	10	23
4	Ngipak	10.000.000	35.000.000	6	3	61
5	Karangmojo	10.000.000	41.400.000	9	16	51
6	Gedangrejo	10.000.000	-	3	0	29
7	Ngawis	10.000.000	49.000.000	10	25	80
8	Bejiharjo	10.000.000	-	2	0	25
9	Jatiayu	10.000.000	-	2	0	20
	Jumlah	90.000.000	138.400.000	42	54	359

*Sumber : Dokumentasi PPK Tahun 2004*

### 3.2.3.2 Kegiatan Prasarana Fisik

Untuk alokasi kegiatan fisik, sebagian besar dialokasikan untuk pengerjaan dan perbaikan sarana jalan. Pekerjaan jalan dipandang sebagai sarana yang penting untuk menunjang kehidupan baik segi ekonomi maupun segi sosial. Dengan adanya akses jalan, maka akses sarana perekonomian dimungkinkan untuk menjadi lebih baik.

Alokasi kegiatan prasarana fisik adalah sebagai berikut :

**TABEL III.19**  
**ALOKASI PRASARANA JENIS PEKERJAN RABAT BETON JALAN**

No	Desa	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002/2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)
1	Bendungan	-	-	-
2	Wiladeg	-	-	-
3	Kelor	-	76.190.000	61.487.000
4	Ngipak	-	-	-
5	Karangmojo	-	-	70.569.000
6	Gedangrejo	-	-	-
7	Ngawis	-	-	-
8	Bejiharjo	-	7.513.000	13.758.500
9	Jatiayu	26.000.000	3.153.500	49.858.000
		26.000.000	86.856.500	195.672.500

*Sumber : Dokumentasi PPK*

**TABEL III.20**  
**ALOKASI PRASARANA PEKERJAAN PERKERASAN JALAN**

No	Desa	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002/2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)
1	Bendungan	41.015.000	52.980.000	35.172.500
2	Wiladeg	87.380.000	74.591.000	87.303.000
3	Kelor	28337.000		-
4	Ngipak	76.681.000	84.295.500	43.453.000
5	Karangmojo	46.915.00	30.882.200	39.780.000
6	Gedangrejo	61.305.000	77.127.600	-
7	Ngawis	20.987.000	98.050.000	44.750.000
8	Bejiharjo	54.460.000	82.646.000	67.410.500
9	Jatiayu	15.714.000	48.875.500	44.815.000
		434.794.000	549.447.900	362.684.000

*Sumber : Dokumentasi PPK*

**TABEL III.21**  
**ALOKASI PRASARANA JENIS PEKERJAAN JEMBATAN**

No	Desa	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002/2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)
1	Bendungan	15.714.000	-	-
2	Wiladeg	-	-	-
3	Kelor	-	-	-
4	Ngipak	-	-	-
5	Karangmojo	133.334.000	125.159.990	-
6	Gedangrejo	-	-	-
7	Ngawis	-	-	-
8	Bejiharjo	24.562.000	-	-
9	Jatiayu	-	-	-
		149.048.000	125.159.990	-

*Sumber : Dokumentasi PPK*

**TABEL III.22**  
**ALOKASI JENIS PEKERJAAN PRASARANA PEREKONOMIAN (LOS PASAR)**

No	Desa	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002/2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)
1	Bendungan	-	-	-
2	Wiladeg	-	-	-
3	Kelor	-	-	-
4	Ngipak	-	-	-
5	Karangmojo	-	-	-
6	Gedangrejo	-	-	-
7	Ngawis	-	-	-
8	Bejiharjo	15.222.000	-	-
9	Jatiayu	-	-	-
		15.222.000	-	-

*Sumber : Dokumentasi PPK*

**TABEL III.23**  
**Alokasi Prasarana Jenis Pekerjaan Prasarana Pendidikan (Gedung TK)**

No	Desa	Tahun 2001 (Rp)	Tahun 2002/2003 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)
1	Bendungan	-	-	38.547.000
2	Wiladeg	-	15.506.900	-
3	Kelor	13.189.000	-	-
4	Ngipak	4.520.000	-	-
5	Karangmojo	-	17.906.725	-
6	Gedangrejo	-	-	-
7	Ngawis	-	-	-
8	Bejiharjo	-	-	-
9	Jatiayu	-	-	-
		17.709.000	33.413.625	38.547.000

Sumber : Dokumentasi PPK 2001-2004

**TABEL III.24**  
**Prasarana Jenis Pekerjaan Bangunan Air dan Bangunan Pelengkap**

No.	Desa	Pekerjaan	Tahun 2001		Tahun 2003		Tahun 2004	
			Volume	Biaya	Volume	Biaya	Pekerjaan	Biaya
1	Bendungan	Gorong-gorong / Duiker	-	-	1 unit	4.445.000	1 unit	1.589.000
		Talud batu kosong	-	-	750 m	-	83,5 m	399.500
2	Wiladeg	Gorong-gorong	-	-	1 unit	-	-	-
		Gorong-gorong	-	-	1 unit	-	1 unit	3.843.000
3	Kelor	Saluran Irigasi	300m	19.827.000	-	-	-	-
		Gorong-gorong	-	-	8 unit	4.489.000	3 unit	3.526.000
4	Ngipak	Talud batu kosong	-	-	750 m	10.966.500	925 m	10.051.000
		Lantai Jembatan	-	-	-	-	1 unit	2.476.000
5	Karangmojo	Gorong-gorong / Duiker	-	-	3 unit	10.744.500	3 unit	11.806.000
		Talud batu kosong	-	-	-	-	50 m	315.000
6	Gedangrejo	Gorong-gorong / Duiker	-	-	2 unit	9.130.900	-	-
		Talud pasangan batu	-	-	108 m	13.688.000	143 m	9.081.000
7	Ngawis	Gorong-gorong	-	-	2 unit	6.680.000	2 unit	3.153.000
8	Bejiharjo	Gorong-gorong / Duiker	3 unit	9.570.000	3 unit	27.460.000	7 unit	20.677.000
		Talud batu kosong	-	-	-	-	228 m	4.249.000
9	Jatiayu	Gorong-gorong / Duiker	-	-	-	-	1 unit	1.152.000
		Talud batu kosong	-	-	-	-	100 m	2.175.000
				29.397.000		87.603.900		74.492.500

Sumber : Dokumentasi PPK 2001-2004

**3.2.3.3 Alokasi Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Masyarakat (PKKM) Non Prasarana**

**TABEL III.25 ALOKASI PKKM NON FISIK TAHUN 2003**

No.	Desa	Uraian Kegiatan		Volume	Satuan	Alokasi dana (Rp)	Pemanfaat
		Pendidikan/Pelatihan	Kesehatan				
1	Bendungan		1. Peralatan Yandu				153 Anak (5 Dusun)
			a. Timbangan Bayi	5	Buah	2.250.000	
			b. Timbangan Satang	5	Buah	625.000	
			c. Timbangan Injak	5	Buah	500.000	
			d. Celana Timbangan	5	Buah	125.000	
			2. Permainan Edukatif				
			a. Balok-balok	25	Buah	1.250.000	
			b. Puzzle	25	Buah	750.000	
			c. Bola	50	Buah	250.000	
			3. Program Makanan Tambahan	33	Kali	7.350.000	
2	Wiladeg		4. Alat Tulis	1	Buah	360.000	172 Anak (7 Dusun)
			Pelaporan	36	Kali	540.000	
			1. Peralatan Yandu				
			a. Gelas	168	Buah	907.200	
			b. Sendok	168	Buah	252.000	
			c. Mangkok	168	Buah	1.134.000	
			d. Timbangan Injak	2	Buah	600.000	
			e. Timbangan Satang	2	Buah	250.000	
			2. Dana Sehat	60	Kali	1.800.000	
			3	Gedangrejo	1. Seragan TK 2. Pelatihan home industri dan Penguatan modal 3. Pelatihan Kader Yandu 4. Pelatihan KWT		
		Ls				7.325.000	
		Ls				1.690.000	
		Ls				1.450.000	
5. PMT	128	Balita				1.536.000	

4	Bejiharjo	1. Tangga majemuk		1	Buah	1.250.000	30 Anak
		2. Tangga 1/2 Lingkaran		1	Buah	850.000	
		3. Papan Titian		2	Buah	300.000	
		4. Angklung		1	Set	500.000	
		5. Timbangan Injak		1	Buah	83.000	
		6. Piano/Keyboard		5	Buah	950.000	
		7. Buku Bergambar		90	Buah	180.000	
		8. Peralatan Yandu					274 anak 6 dusun
		a. meja dingklik		24	Set	9.000.000	
		b. Timbangan bayi		4	Buah	1.847.000	
c. Piring melamin		240	Buah	1.920.000			
d. Mangkok		240	Buah	1.680.000			
e. Cangkir		240	Buah	1.440.000			
Jumlah semuanya						52.444.200	

Sumber : Dokumentasi PPK 2003

**TABEL III.26**  
**ALOKASI PKKM NON FISIK TAHUN 2004**

No.	Desa	Uraian Kegiatan		Volume	Satuan	Alokasi dana (Rp)	Pemanfaat
		Pendidikan/Pelatihan	Kesehatan				
1	Wiladeg	1. Pelatihan sanggan rias dan kue 2. Con blok 3. Permainan TK Bola Dunia Ayunan Kursi Putar		8	Paket	2.800.000	200 orang 60 anak  60 anak
				60	m2	1.265.000	
				2	Buah	1.000.000	
				1	Buah	850.000	
2	Gedangrejo			1	Buah	800.000	341 anak (12 Dusun)
				60	Buah	11.520.000	
				@. 300	Buah	10.880.000	
				12	Set	4.728.000	
3	Bejiharjo	1. Peralatan Yandu a. meja dingklik b. timbangan bayi c. priring melamin d. mangkok e. cangkir f. timbangan gantung		12	Buah	2.100.000	50 anak
				30	set	10.500.000	
				4	Buah	1.200.000	
				400	Buah	3.200.000	
				400	Buah	3.600.000	
				400	Buah	2.000.000	
3	Jatiayu	Peralatan Yandu a. Timbangan satang b. Sarung timbangan c. kantung Timbangan		2	Kali	3.000.000	309 Anak
				4	Buah	700.000	
				4	Buah	100.000	
				4	Buah	100.000	
		PMT		12	Kali	5.985.000	
Jumlah Keseluruhan						66.328.000	

Sumber : Dokumentasi PPK 2004



Kondisi  
0 %



Kondisi  
50 %



Kondisi  
100 %

**GAMBAR 3. 4**  
**PEMBANGUNAN PRASARANA FISIK DALAM PPK**  
**di KECAMATAN KARANGMOJO (DESA GEDANGREJO) TAHUN 2001/2002**



Kondisi  
0 %



Kondisi  
50 %



Kondisi  
100 %

**GAMBAR 3. 5**  
**PEMBANGUNAN PRASARANA FISIK GEDUNG TK DESA TAHUN 2003**

### 3.2.4 Pengelola PPK Kecamatan Karangmojo

Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tidak seluruhnya selesai dengan berakhirnya pelaksanaan PPK di suatu kecamatan, termasuk di Kecamatan Karangmojo. Bidang Ekonomi dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) masih harus melakukan pengelolaan kegiatan keuangan dan operasional pelaksanaan dana PPK. Dalam hal ini tugas UPK adalah menyalurkan dana, pengelolaan administrasi dan pengelolaan dana bergulir bila telah ada pengembalian dari masyarakat.

Menjelang berakhirnya PPK Fase II (pasca program) melalui serangkaian proses yang melibatkan pelaku-pelaku PPK di tingkat kelompok sampai kecamatan dilakukan kegiatan-kegiatan untuk merumuskan satu bentuk kelembagaan Unit Pengelola Kecamatan (UPK) di Kecamatan Karangmojo, yaitu :

1. Pelatihan-pelatihan UPK pasca pendampingan di tingkat kabupaten.
2. Perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Kelembagaan UPK dan perguliran VII Kecamatan Karangmojo yang dilaksanakan tanggal 18 April 2005 telah disepakati satu bentuk kelembagaan UPK yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dan diberi nama UPK PPK Makmur Karangmojo.

**TABEL III. 27**  
**SUSUNAN PENGELOLA UPK PPK ‘MAKMUR’**

No.	Jabatan	L/P	Pddkan	Alamat
1.	Badan Pengurus			

	Ketua	:	Bahron Rasyid, S.Pd	L	S1	Bejiharjo
	Sekretaris	:	Sri Muji Astuti	P	SMA	Bendungan
	Anggota	:	Sukoco	L	SMA	Wiladeg
2	Badan Pengawas					
	Ketua	:	Drs. Ngadilan	L	S1	Karangmojo
	Anggota	:	Th Sakidjo, S.Pd	L	S1	Bejiharjo
	Anggota	:	Ibnu Raharjo, S.Pd	L	S1	Jatiayu
3	Karyawan UPK					
	Ketua	:	Karno	L	SMEA	Karangmojo
	Sekretaris	:	Tugiyem	P	SMEA	Gedangrejo
	Bendahara	:	Tatik Purwaningsih	P	D3	Bejiharjo

(Kelembagaan UPK PPK 'Makmur' Kecamatan Karangmojo telah disahkan secara hukum dengan Akta Notaris No:41 tanggal 17-05-2005)

UPK Makmur sampai dengan, tahun 2008 melaksanakan pemberian pinjaman modal untuk kegiatan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL III.28**  
**PENGEMBANGAN DANA EKONOMI**  
**UPK PPK KECAMATAN KARANGMOJO**

No.	Uraian	Jumlah
1	Dana BPPK Tahun I,II, III	Rp. 670.382,000,-
2	Asset Dana UPK sampai saat ini	Rp. 830.405.891,-
3	Kelompok yang pernah dilayani	Rp. 185 kelompok
4	Anggota yang pernah dilayani	3.919 peminjam

Sumber : UPK PPK 'Makmur' Kecamatan Karangmojo

**BAB IV**  
**EVALUASI PROSES PELAKSANAAN**  
**PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)**  
**DI KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**4.1. Karakteristik Penerima Bantuan PPK**

**4.1.1 Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin**

Dalam kegiatan PPK tidak terdapat aturan yang membatasi usia warga masyarakat untuk ikut berperan serta di dalamnya. Dalam berbagai observasi di lapangan didapat fakta tentang tidak adanya keterbatasan usia dalam setiap kegiatan PPK. Walaupun dalam berbagai pendapat bahwa faktor usia produktif berhubungan dengan tingkat produktifitas dari warga masyarakat atau individu yang bersangkutan. Dengan usia yang masih produktif itu diharapkan bantuan yang diberikan akan bisa dimanfaatkan dan dikembangkan.

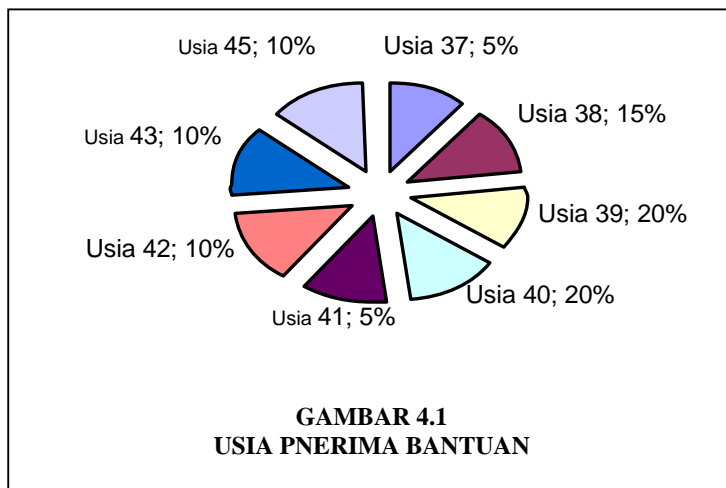
**TABEL IV.1**  
**RESPONDEN PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN USIA DAN JENIS KELAMIN**

No	N a m a	Umur	L/P	Dusun	Desa
1	Sumardi	40	L	Bendungan	Bendungan
2	Sumiyati	42	P	Watudalang	Bendungan
3	Karsiyatun	43	P	Wiladeg	Wiladeg
4	Sumarsih	45	P	Krambilduwur	Wiladeg
5	Sugiyatmi	37	P	Sudimoro	Kelor
6	CH. Martini	38	P	Kelor	Kelor
7	Yanto	38	L	Ngipak	Ngipak
8	Sumiyati	39	P	Jetis	Ngipak
9	Sumilah	40	P	Karangduwet	Karangmojo
10	Siti Marsiyati	42	P	Karangmojo I	Karangmojo
11	Purwanti	40	P	Tlogowareng	Karangmojo
12	Ngadiyono	40	L	Plumbungan	Gedangrejo
13	Gatot Marsono	39	L	Tenggaran	Gedangrejo
14	Subaryanto	38	L	Ngawis I	Ngawis
15	Rukmiyati	40	P	Karanganom	Ngawis
16	Sri Supadmi	45	P	Kulwo	Bejiharjo
17	Rahayuningsih	43	P	Sokoliman I	Bejiharjo
18	Iswahyudi	39	L	Gelaran II	Bejiharjo
19	Purwanto	39	L	Candi 7	Jatiayu
20	Marsini	41	P	Pengkol 2	Jatiayu

*Sumber : Analisis Peneliti :2008*

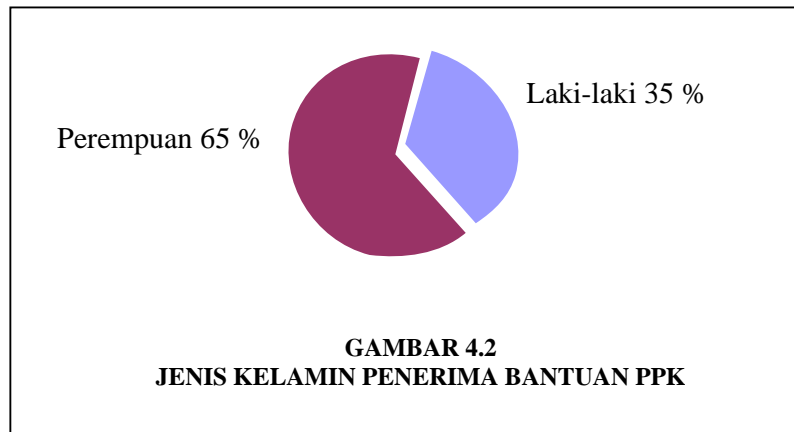
Berdasarkan tabel IV.1 di atas bahwa penerima bantuan PPK di Kecamatan Karangmojo adalah warga masyarakat dengan rentang usia antara 37 tahun sampai dengan 45

tahun. Dari hal tersebut dapat diasumsikan bahwa penerima bantuan dalam kegiatan PPK adalah warga masyarakat yang berada dalam masa usia produktif. Dengan kondisi seperti itu perkembangan bantuan yang diberikan bisa menjadi lebih dinamis, yang berarti dana bantuan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.



Sumber : Analisis Peneliti:2008

Berdasarkan jenis kelamin bahwa untuk penerimaan bantuan kegiatan ekonomi produktif 65 % adalah perempuan dan laki-laki sebesar 35 %. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip PPK yang menekankan keberpihakan terhadap perempuan. Hampir semua kegiatan ekonomi produktif dikomposisikan porsi besar untuk perempuan sedangkan sisanya adalah laki-laki.



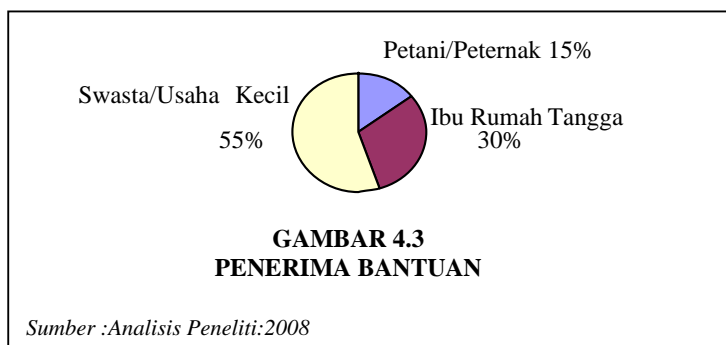
*Sumber : Analisis Peneliti: 2008*

#### **4.1.2 Berdasarkan Mata Pencaharian**

Mata pencaharian untuk sebagian besar masyarakat Kecamatan Karangmojo adalah petani. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi geografisnya yang dataran yang berbukit. Dari data kependudukan juga didapat angka petani sebesar 49,81 % sisanya adalah swasta, buruh dan Pegawai Negeri Sipil.

Walaupun demikian tidak berarti penduduk non-petani tidak melakukan aktifitas pertanian. Hampir semua warga masyarakat juga melakukan aktifitas pertanian baik bersawah maupun berladang.

Penyaluran bantuan yang masih didominasi oleh warga masyarakat yang memiliki usaha kecil sebesar 55 % mempunyai argumentasi bahwa bantuan PPK jika diberikan kepada warga masyarakat yang benar-benar miskin maka diasumsikan terdapat kendala dalam proses pengembalian bantuan. Dengan diberikan kepada warga yang mempunyai usaha maka keberlangsungan bantuan akan lebih terjaga dan berkesinambungan.

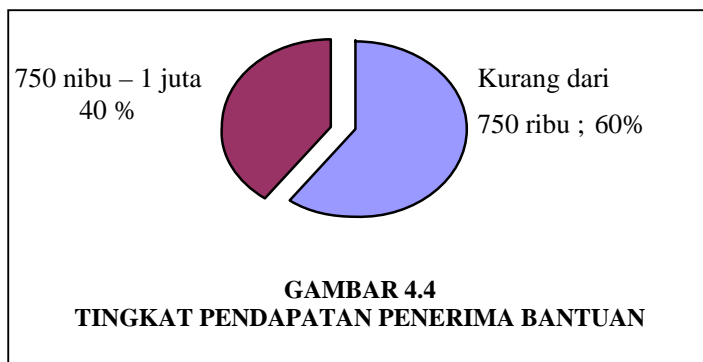


#### 4.1.3 Berdasarkan Pendapatan

Tingkat pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh mata pencaharian warga masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat di Kecamatan Karangmojo masih didominasi oleh pendapatan dari pertanian. Walaupun demikian tidak dapat dikatakan bahwa dari hasil pertanian telah menjadi sandaran hidup bagi warga. Seperti disebut di atas, bahwa masyarakat selain mempunyai pekerjaan di sektor non pertanian masih melakukan aktifitas di sektor pertanian juga. Sehingga pendapatan yang didapat berasal dari pekerjaan pokoknya sebagai buruh, swasta atau pekerjaan lain dan juga pendapatan dari aktifitas di sektor pertanian.

Walaupun demikian dari responden penerima bantuan PPK didapatkan bahwa dari pekerjaan sebagai swasta usaha kecil, petani/peternak dan ibu rumah tangga didapatkan prosentase pendapatan 60% dan 40%. Dari angka tersebut bahwa terdapat asumsi bahwa pendapatan Rp 750.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 adalah pendapatan yang layak untuk ukuran masyarakat di Kecamatan Karangmojo. Sedangkan pendapatan kurang dari 750 ribu adalah pendapatan yang kurang layak atau dikatakan pas-pasan untuk ukuran masyarakat Kecamatan Karangmojo.

Prosentase tersebut tentunya berkaitan dengan sasaran bantuan yang diberikan terhadap masyarakat miskin. Dengan komposisi seperti itu dari responden yang ada maka PPK layak menjadi sebuah program yang bertujuan menanggulangi kemiskinan.

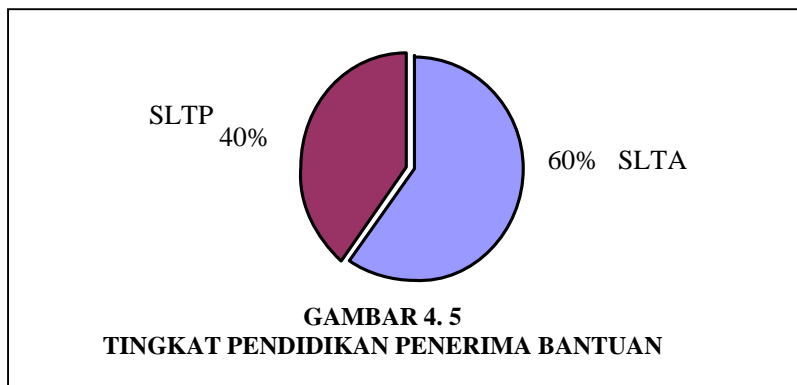


Sumber : Analisis Peneliti:2008

#### 4.1.4 Berdasarkan Pendidikan

Tingkat warga masyarakat Kecamatan Karangmojo dengan melihat responden yang ada adalah cukup memadai atau bebas buta aksara. Hal tersebut tercermin dari komposisi 40 % untuk tingkat SLTP dan 60 % untuk setingkat SLTA. Tingkat pendidikan seperti itu menjadikan modal yang layak terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

Pemahaman dan pengetahuan dengan modal pendidikan seperti itu akan sangat memberikan dukungan terhadap keberhasilan program. Masyarakat dengan tingkat pendidikan seperti itu akan cukup mampu memahami tentang proses-proses yang dilaksanakan.



Sumber : Analisis Peneliti:2008

## **4.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo**

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah sebuah upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan berbasis pemberdayaan dan menggunakan pendekatan partisipatif. Hal tersebut berarti bahwa segala sesuatunya diserahkan kepada masyarakat sendiri. Prinsip DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat ) haruslah selalu dipergunakan.

Pembahasan tentang persepsi berarti juga membicarakan tentang cara pandang. Dan hal tersebut juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap program. Oleh karena itu akan dianalisa bagaimanakah pemahaman dan persepsi masyarakat Kecamatan Karangmojo dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo. Dari hasil analisa di lapangan ditemukan fakta bahwa sebagian besar warga masyarakat mengetahui tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo. Dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun dan warga masyarakat, hampir semuanya menyatakan mengetahui dan memahami tentang PPK. Walaupun tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka beragam. Seperti diungkapkan oleh Bapak Sumardi (49 tahun) warga Dusun Plumbungan Desa Gedangrejo ketika ditanyakan tentang PPK di Kecamatan Karangmojo.

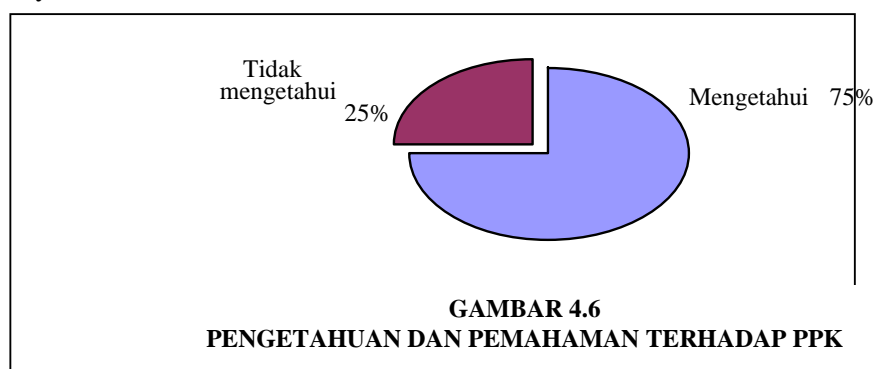
*“Saya mengenal PPK pada saat saya mengikuti pertemuan rutin bulanan kelompok RW Yang saya tahu adalah PPK memberikan bantuan kepada warga. Bantuan fisik seperti pembangunan jalan desa dan saluran air. Waktu itu diberitahukan kepada kami tentang program yang memberikan bantuan fisik dan bantuan untuk usaha kecil. Dan RW kami disuruh memberikan usulan untuk kegiatan fisik”. (1.1 /Sos/1)*

Pernyataan tersebut memberikan gambaran tentang pengetahuan dan pemahaman dalam PPK yang didapat warga dengan cara sosialisasi melalui tingkatan kelompok RW.

Lain pula yang diketahui oleh Ibu Supriyanti (45 tahun) Dusun Kayuwalang Desa Wiladeg yang menyatakan,

*“saya mengetahui PPK dari pertemuan PPK dusun, waktu itu pak dukuh menyampaikan adanya PPK dan meminta ibu-ibu berpartisipasi dalam program tersebut dengan mengajukan pinjaman untuk usaha kecil-kecilan atau hanya simpan pinjam saja” (1.6/Sos/2)*

Dari hasil penelitian juga didapat bahwa masyarakat mengetahui tentang PPK karena mendapatkan sosialisasi. Informasinya tentang PPK didapat dari sosialisasi yang berlangsung secara bertahap dari tingkat kecamatan kemudian desa ke dusun dan akhirnya ke kelompok masyarakat melalui RW atau RT.



Sumber : Analisis Peneliti: 2008

Dari gambar di atas, juga dapat diketahui tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Karangmojo tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Berdasarkan kuesioner dengan sample 20 (dua puluh) orang didapatkan hasil 15 orang atau 75 % mengetahui tentang PPK dan 5 orang atau 25 % tidak mengetahui tentang PPK. Hasil tersebut juga menunjukkan tentang tahu tidaknya tentang PPK, sumber informasi tentang PPK dan mengetahui atau memahami tidaknya tentang tahapan-tahapan dalam PPK. Hasil tersebut menggambarkan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) telah diketahui oleh masyarakat Kecamatan Karangmojo.

#### 4.2.1 Persepsi Berdasarkan Proses

Dalam penelitian yang dilaksanakan, ditemukan fakta bahwa proses PPK adalah diawali dengan sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelestarian. Bahwa segala sesuatu kegiatan dalam PPK haruslah melalui musyawarah, baik tingkat kelompok masyarakat, tingkat dusun, tingkat desa dan kecamatan. Musyawarah di berbagai tingkatan seperti itu akan memunculkan sebuah pengerucutan permasalahan atau gagasan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Fakta di lapangan yang terjadi adalah masyarakat sendiri mulai dari yang terkecil tahap penggalian gagasan di tingkatan kelompok masyarakat sampai tahap terakhir, tahap pelestarian sangat antusias mengikutinya. Berdasarkan hasil penelitian dengan 9 (sembilan) kepala desa yaitu: Desa Bejiharjo dengan Kepala Desa Yanto, Desa Wiladeg dengan Kepala Desa Sukoco, BSc, Desa Bendungan dengan Kepala Desa Santosa, S.Sos, Desa Kelor dengan Kepala Desa Yustina Kesmiyanti, Desa Ngipak dengan Kepala Desa Sekar HS, Desa Gedangrejo dengan Kepala Desa Agus Widodo, semua lurah memberikan pandangan yang sama bahwa masyarakat sangat menyambut antusias dengan adanya PPK. Salah satunya adalah pernyataan tentang tanggapan masyarakat terhadap PPK oleh Bapak Santosa, S.Sos (Kepala Desa Bendungan) yaitu :

*“Tanggapannya sangat positif, kami menyambut gembira dengan adanya program seperti ini, sehingga kami dapat kesempatan untuk mengusulkan secara langsung apa yang menjadi uneg-uneg kami selama ini. PPK juga memberi kesempatan kepada kami, desa sekaligus masyarakat untuk terjun langsung mengerjakan proyek-proyek pembangunan yang selama ini kami hanya menerima saja, sekarang kami menjadi perencana sekaligus pelaksana. Masyarakat juga menyambut positif karena mereka berkesempatan ikut dalam proses urun rembuk, yang selama ini jarang mereka mendapat kesempatan.” (1.1/KD/2)*

Walaupun prosesnya agak memakan waktu lama kurang lebih 1(satu) tahun dari mulai awal sosialisasi, penggalan gagasan, perencanaan sampai pelaksanaan. Antusiasme di sini dikarenakan bahwa walaupun lama tetapi kegiatan yang ada dalam PPK sangat jelas, terbuka. Semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk ikut menentukan kegiatan tersebut. Hal senada diungkapkan Bapak Suyanto (Kepala Desa Bejiharjo) yang menyatakan bahwa tanggapan masyarakat Desa Bejiharjo benar-benar mmnggembirkan.

*“Tanggapan kita tantang adanya PPK adalah sangat bagus, benar-benar menyambut gembira program seperti ini. Bagaimana tidak, kami diberikan kepercayaan untuk mengelola sendiri kegiatan pembangunan di masing-masing desa mulai dari apa yang ingin kita buat, bagaimana membuatnya sekaligus kita harus melaksanakannya, walaupun tidak bisa sembarangan karena harus dipertanggungjawabkan lagi. Kami benar-benar bersyukur bahwa pemerintah telah memberikan program yang semuanya diserahkan kepada warga. Walaupun pada kenyataannya kami harus benar-benar selektif karena program pembangunan yang diberikan tidak bisa merata karena harus berkompetisi dengan desa atau dusun lain”. (1.2/KD/01)*

PPK membawa dampak positif terhadap kemampuan warga desa bekerja sama dalam mengatasi persoalan-persoalan terutama persoalan pembangunan lokal di sekitar mereka.

*“Jelas, kapasitas kemampuan masyarakat meningkat, masyarakat pun menjadi semakin apresiasif dan kritis terhadap program-program dari desa atau kecamatan, masyarakat sekarang ini juga telah melaksanakan pembangunan di tingkat lingkungan mereka sendiri secara swadaya, mereka mengelola lingkungan mereka sendiri dengan sistem swadaya” (1.2/KD/05)*

Dengan model pelibatan warga desa dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, PPK telah membangun rasa percaya masyarakat pada kemampuan warga desa sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan desa dan kemauan untuk mengatasi sendiri masalah-masalah bersama atau mengelola sumber daya bersama.

Seperti dinyatakan oleh Bapak Nawirin PS (62 tahun), warga Dusun Karangmojo I Desa Karangmojo :

*“..menurut saya, PPK adalah program yang melatih masyarakat untuk bertanggung jawab sekaligus dapat merencanakan sendiri program pembangunan yang diinginkan. Walau agak sedikit membikin repot namun saya rasa masyarakat merasa senang karena terlibat secara langsung.....”*  
(1.11/PP/10)

Sehingga masyarakat Kecamatan Karangmojo sangat apresiasif terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Prinsip dasar yang mendudukan masyarakat sebagai subjek dan objek menjadikan masyarakat sendirilah sebagai penentunya. Proses pembangunan yang *‘bottom up’* menjadikan masyarakat merasa dihargai dan dimanusiakan.

Senada dengan tersebut di atas diungkapkan pula oleh Bapak Sumardi (52 tahun) warga Dusun Plumbungan Desa Gedangrejo:

*“Ya, karena dalam musyawarah itu kegiatan yang akan diusulkan mendasar kepada aspirasi masyarakat”.*

*(1.1/PP/10)*

Selama ini masyarakat hanya harus menerima segala sesuatunya dari pemerintah, namun sekarang ini semuanya terpusat kepada masyarakat sendiri. Dan tahapan-tahapan yang mendudukan masyarakat sebagai pelaku dan penentu kebijakan itu menjadikan satu kepuasan dalam diri masyarakat.

Ada juga anggapan bahwa proses yang terjadi dalam PPK benar-benar lebih baik dibanding dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu proyek-proyek pemerintah namun dikerjakan oleh kontraktor. Kinerja PPK lebih baik daripada kinerja proyek-proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor yang cenderung kurang terbuka dan tidak ada pertanggungjawaban. Partisipasi dalam perencanaan tidak dikenal dan juga tidak didorong dan masih ditengarai adanya kegiatan suap menyuap. Selain itu kalau dikerjakan oleh kontraktor, jika mutu rendah warga desa tidak dapat mengadu. Jika ada pengendalian oleh warga walau sedikit sekalipun

dalam seleksi proyek dan warga desa dapat dikerahkan sebagai pekerja proyek, mereka merasa senang dengan hasil yang dicapai.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mengedepankan proses perencanaan yang bersifat partisipatif. Masyarakat memilih fasilitator desa (FD) untuk mendampingi dalam proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Masyarakat kemudian menentukan pilihan terhadap jenis kegiatan pembangunan yang ingin didanai. PPK juga menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan yang akan didanai. Musyawarah terbuka bagi setiap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antar desa yang terdiri dari wakil-wakil desa yang akan membuat keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai. Pilihan kegiatan adalah bersifat *open menu* untuk semua investasi produktif kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.

Kegiatan yang telah disetujui akan segera ditindaklanjuti kembali di masing-masing desa yang terdanai. Masyarakat melakukan pertemuan untuk melaksanakan pemilihan atau penunjukkan anggotanya menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK ini akan melaksanakan kegiatan yang telah disepakati sebagai kegiatan bagi masing-masing desa. Pekerjaan yang ada juga dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja atau pekerja dari masyarakat masing-masing desa.

Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa. Tim juga akan melakukan serah terima kegiatan

kepada masyarakat, desa setelah kegiatan dilaksanakan. Penyerahan dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dan juga agar masyarakat nantinya akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan.

Dari uraian di atas maka dapat diberikan gambaran garis besar pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mengedepankan segala sesuatunya ditentukan oleh masyarakat sendiri. Prinsip '*dari oleh dan untuk masyarakat (DOUM)*' benar-benar mewarnai setiap kegiatan. Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan harus diputuskan oleh masyarakat sendiri bukan oleh pemerintah.

#### **4.2.2 Persepsi Berdasarkan Hasil**

Selama 3 (tiga) tahun PPK dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo telah diberikan berbagai macam bantuan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut adalah kegiatan fisik, kegiatan ekonomi dan kegiatan PKK (Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat). Hasil dari berbagai kegiatan tersebut dapat dinikmati di seluruh desa di Kecamatan Karangmojo. Walaupun hasil kegiatan atau bantuan itu di masing-masing desa dapat berbeda atau bahkan sama, karena kegiatan tersebut yang menentukan masyarakat itu sendiri.

Proyek-proyek PPK pada umumnya bermutu tinggi dan berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan proyek-proyek swadaya lain. Hal ini sebagai besar berkat peran serta warga desa dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dan adanya dukungan swadaya masyarakat. Dari kegiatan-kegiatan yang ada juga memunculkan rasa percaya diri dan rasa bangga warga desa yang bersangkutan.



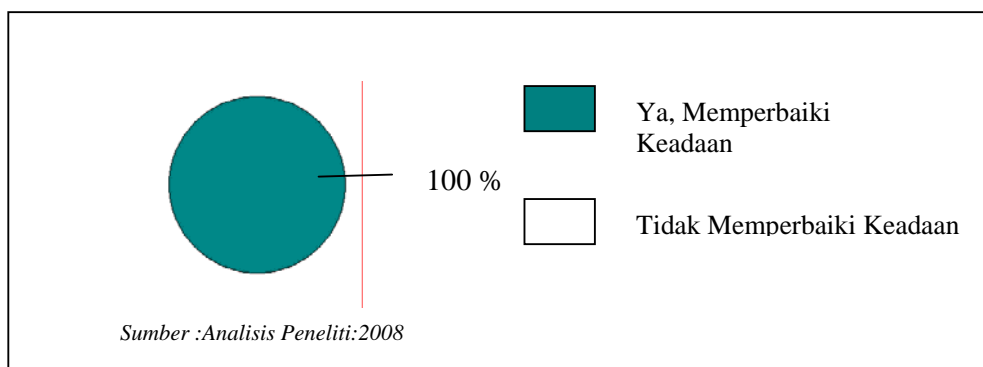
*Sumber : Dokumentasi PPK*

**GAMBAR 4.7**  
**JEMBATAN HASIL KEGIATAN PPK DUSUN SUMBERJO-NGEPUNG**  
**DESA KARANGMOJO**

na fisik jembatan

yang merupakan hasil dari PPK Tahun 2001. Bangunan jembatan yang merupakan hasil kerja keras masyarakat Desa Karangmojo, sebagai sebuah upaya untuk memperlancar akses kehidupan sosial ekonomi warga. Dari pengamatan di lapangan secara kualitas, jembatan tersebut tidak kalah dengan proyek-proyek jembatan yang dibiayai melalui proyek-proyek pemerintah lain. Tentunya kualitas bangunan jembatan tidak lepas dari hasil kreasi masyarakat sendiri dan juga bantuan teknis dari pengelola PPK Kecamatan Karangmojo.

Dari pengamatan dan penelitian di lapangan dalam wawancara dengan Kepala Desa Karangmojo, Bapak Supirman menyatakan bahwa hasil-hasil kegiatan PPK khususnya di Desa Karangmojo sangat bermanfaat dan membantu kehidupan masyarakat. Di Desa Karangmojo salah satu hasil kegiatan PPK adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan 2 (dua) dusun yaitu dusun Ngepung dan dusun Sumberjo. Sebelumnya 2 (dua) dusun tersebut terpisah oleh adanya sungai dan sebelumnya untuk menuju ke sana harus memutar sejauh 8 (delapan) km. Padahal keberadaan Dusun Sumberjo merupakan dusun penghubung bagi dusun Ngepung untuk dapat sampai kota kecamatan di Kecamatan Karangmojo.



**GAMBAR 4. 8**  
**PERBEDAAN KONDISI ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH PROGRAM**

Dengan dibangunnya jembatan penghubung tersebut akses ke dusun Ngepung menjadi lancar, sehingga transportasi menjadi tidak ada kendala lagi. Hal tersebut menjadikan akses perekonomian bagi dusun Ngepung yang selama ini terhambat menjadi lebih baik.

Diungkapkan oleh warga Dusun Ngepung, Bapak Sudiro (49 th):

*“ ...dulu sebelum dibangun jembatan penghubung, dusun kami seperti terisolir, karena kendaraan –kendaraan besar sulit masuk ke sini dan harus memutar sejauh 8 km. Sekarang setelah ada jembatan ini kendaraan-kendaraan besar bisa masuk ke sini, sehingga pedagang-pedagang dengan kendaraan-kendaraan besar mau sampai dusun kami.....” (1.6/Kon/3)*

Dari pernyataan tersebut memberikan arti bahwa kegiatan yang dibangun terutama kegiatan fisik menjadikan masyarakat puas dan benar-benar bermanfaat. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tak lepas dari perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritasnya.

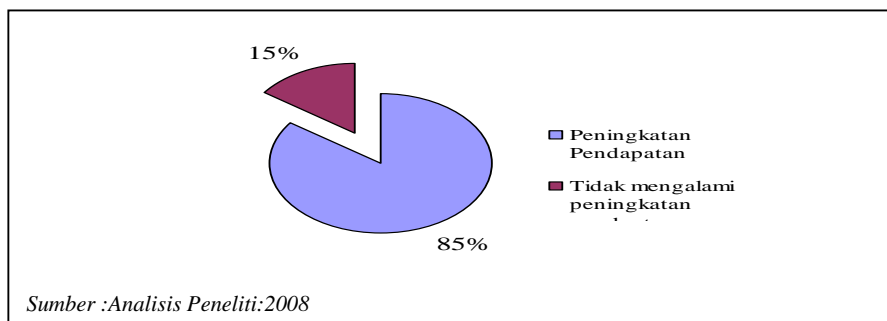
Sama halnya yang terjadi di Desa Kelor, Dusun Ngunut Kidul, menurut Kepala Desa, Ibu Yustina Kesmiyanti (52 th), bantuan PPK benar-benar membantu.

*“...dibangunnya jalan yang menghubungkan Dusun Ngunut Kidul dengan Dusun Sudimoro (pusat desa) menjadikan kelancaran transportasi yang berimbas kepada lancarnya barang modal yang masuk ke sana. Dan juga hasil-hasil pertanian juga cepat diangkut untuk disalurkan ke pasar, karena sekarang mobil-mobil pengangkut bias semakin dekat ke lokasi pertanian...”*  
(1.15/Kon/3)

Sedangkan untuk kegiatan ekonomi, hampir senada dengan kegiatan fisik, bantuan yang diberikan dari dana PPK telah dipergunakan bagi usaha ekonomi produktif. Dengan pemanfaat yang hampir 75 % adalah perempuan, dari observasi dan wawancara di lapangan ditemukan fakta bahwa bantuan tersebut dipergunakan untuk penambahan modal usaha mereka walaupun masih dalam skala kecil. Seperti pernyataan Ibu Hartini (45 tahun, warga Dusun Plumbungan Desa Gedangrejo) yaitu bahwa dengan adanya bantuan ekonomi mereka mempunyai tambahan modal untuk usaha,

*“..... Khusus untuk kami ibu-ibu menjadi punya modal untuk usaha kecil-kecilan misalnya berdagang sayur, berdagang makanan kecil”* (1.2/Kon/3)

Diungkapkan oleh Ibu Suprapti (45 th) warga dusun Banjardowo Desa Gedangrejo yang mendapat bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bantuan tersebut dipergunakan untuk menambah modal usaha berupa oven untuk usaha kuenya. Walaupun tidak mau mengungkapkan besarnya pendapatan yang didapat namun menurutnya bantuan dari PPK dirasakan sangat membantu. Karena bantuan itu didapat tanpa menggunakan agunan dan bunganya relatif tidak memberatkan.



**GAMBAR 4. 9**  
**PENINGKATAN PENDAPATAN DENGAN KEGIATAN EKONOMI PPK**

Kegiatan ekonomi dengan pemberian bantuan dirasakan juga oleh Bapak Suryanto (43) dari kelompok penjahit Desa Bejiharjo, yang mendapat bantuan 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2003. Dengan bantuan tersebut dibelikannya tambahan alat jahit (alat obras) sehingga proses penjahitan yang dilakukan untuk pengobrasan tidak perlu ke tempat lain. Menurutnya bantuan yang diterima benar-benar membantu dirinya, karena untuk meminjam ke bank harus menggunakan agunan.

Gambaran-gambaran di atas kiranya dapat menggambarkan bahwa pemberian bantuan pembangunan prasarana fisik maupun pemberian bantuan kegiatan ekonomi PPK benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Khususnya untuk kegiatan ekonomi, walaupun dengan adanya bantuan tersebut tidak serta merta atau langsung dapat merubah tingkat kesejahteraan atau pendapatan, namun pada prinsipnya bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan usaha ekonomi produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga atau masyarakat. Dan yang menjadi titik tolak dari hasil-hasil kegiatan dalam PPK di Kecamatan Karangmojo adalah bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan bantuan yang sifatnya memberi rangsangan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraannya.

#### **4.3 Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo**

Bentuk partisipasi masyarakat secara nyata dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo banyak ditunjukkan dalam wujud keswadayaan mereka, seperti tenaga, uang tunai bahkan bahan lokal atau tanah (pembangunan proyek sarana dan prasarana). Tentunya ini merupakan sumbangan besar bagi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo. Ketentuan tentang partisipasi memang tidak ada, namun hampir semua kegiatan yang dilaksanakan terutama fisik, masyarakat memberikan andil yang cukup mendukung kegiatan tersebut. Jauh dari pada itu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo memberikan peneguhan yang mendalam pada arti partisipasi yang sesungguhnya, yaitu terdapat budaya malu jika partisipasi dan atau swadaya tidak mendukung terselesainya pelaksanaan pekerjaan proyek itu. Partisipasi nampak nyata untuk kegiatan pekerjaan fisik sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan ekonomi diwujudkan dalam bentuk '*self capital*' dalam menunjang usaha kelompok atau individu. Partisipasi lainnya yaitu dengan sikap tertib dan disiplin dalam membayarkan pinjaman dari program secara tepat waktu.

Seperti tampak Gambar 4.10 yang menunjukkan kegiatan warga Desa Gedangrejo yang bergotong-royong berpartisipasi dalam kegiatan prasarana fisik jalan berupa pengerasan jalan. Partisipasi yang paling bisa dilihat adalah keikutsertaan warga dalam kegiatan pembangunan fisik. Sumbangan berupa tenaga adalah wujud nyata partisipasi dalam kegiatan PPK di Kecamatan Karangmojo. Sumbangan berupa tenaga adalah wujud nyata partisipasi dalam kegiatan PPK di Kecamatan Karangmojo



*Sumber : Dokumentasi, PPK*

**GAMBAR 4.10**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN SARANA JALAN DESA**  
**GEDANGREJO TAHUN 2001**

Bukan itu saja, partisipasi masyarakat Kecamatan Karangmojo muncul dari awal program ini dilaksanakan. Tumbuhnya sikap untuk menerima dan mengikuti setiap tahap kegiatan dapat diartikan juga sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Di Kecamatan Karangmojo, sosialisasi program disampaikan mulai dari desa kemudian ke dusun. Dari dusun akan disosialisasikan lewat lingkup RW dan RT. Dari pertemuan-pertemuan tingkat RW/RT tersebutlah merupakan sarana bermasyarakat yang efektif dalam sosialisai program sekaligus penggalian gagasan. Dari pertemuan RW selanjutnya akan menuju ke pertemuan kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan basis dasar pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Partisipasi akan memunculkan gagasan-gagasan dalam masyarakat, persiapan dalam mengeluarkan swadaya dan sebagainya.

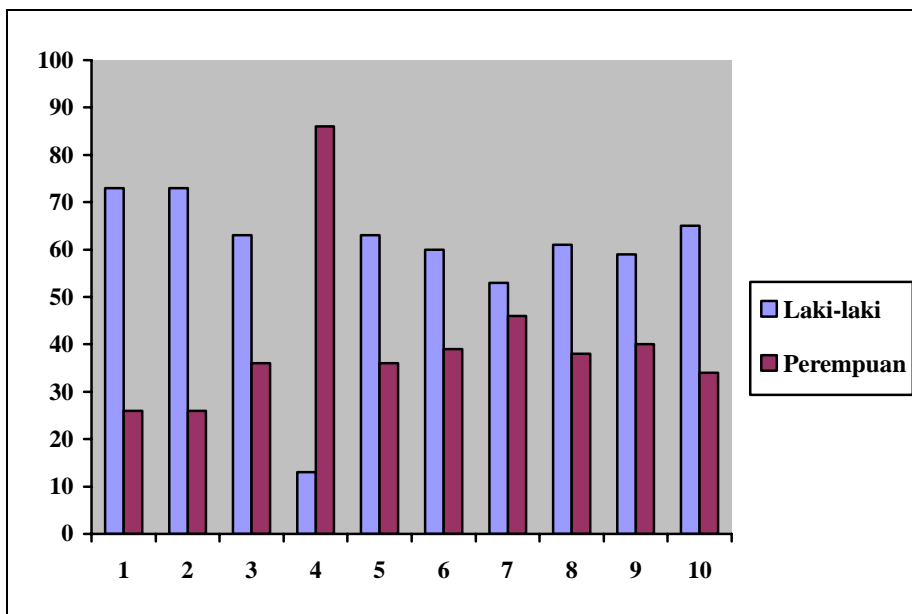




Sumber : Dokumentasi PPK

**GAMBAR 4.11**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH DUSUN**  
**DUSUN PLUMBUNGAN TAHUN 2003**

Gambar IV.11 di atas adalah salah satu bentuk kegiatan dalam PPK yaitu musyawarah dusun yang dilaksanakan di Dusun Plumbungan Desa Gedangrejo. Musyawarah tersebut diikuti oleh kelompok Rukun Warga (RW) di Dusun Plumbungan yang akan menentukan kegiatan yang akan diajukan untuk PPK.

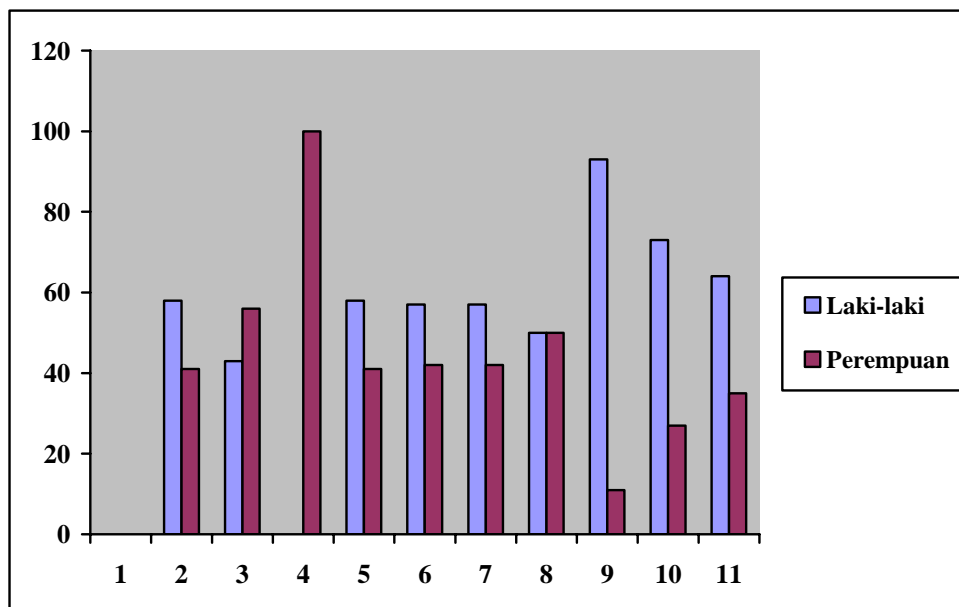


Sumber : Analisis Peneliti:2008

**GAMBAR 4.12**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT TAHUN 2003**

- |   |                               |    |                                 |
|---|-------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Musyawarah Antar Desa (MAD) I | 6  | Musyawarah Antar Desa (MAD) II  |
| 2 | Musyawarah Desa I             | 7  | Musyawarah Antar Desa (MAD) III |
| 3 | Penggalan Gagasan             | 8  | Musyawarah Desa III             |
| 4 | Musyawarah Khusus Perempuan   | 9  | Musyawarah Monitoring           |
| 5 | Musyawarah Desa II            | 10 | Musyawarah Desa Serah Terima    |

Pada Tahap pelaksanaan kegiatan, bahwa partisipasi akan diwujudkan dalam bentuk materi atau uang yang dipergunakan untuk mengerjakan program parasarana fisik yang mereka kehendaki. Partisipasi bukan hanya berwujud materi melainkan diwujudkan dalam bentuk bantuan tenaga pelaksana pengerjaan fisik atau bantuan lain semisal kerelaan warga masyarakat terhadap tanah untuk terkena pekerjaan fisik Program Pengembangan Kecamatan (PPK).



Sumber : Analisis Peneliti:2008

**GAMBAR 4.13**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT TAHUN 2004**

- |   |                               |    |                                 |
|---|-------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Musyawarah Antar Desa (MAD) I | 6  | Musyawarah Antar Desa (MAD) II  |
| 2 | Musyawarah Desa I             | 7  | Musyawarah Antar Desa (MAD) III |
| 3 | Penggalian Gagasan            | 8  | Musyawarah Desa III             |
| 4 | Musyawarah Khusus Perempuan   | 9  | Pelaksanaan                     |
| 5 | Musyawarah Desa II            | 10 | Musyawarah Monitoring           |
|   |                               | 11 | Musyawarah Desa Serah Terima    |

**TABEL IV.2**  
**SWADAYA MASYARAKAT**

No	Desa	Dana PPK (Prasarana Fisik) Tahun 2001	Swadaya	Dana PPK (Prasarana Fisik) Tahun 2003	Swadaya	Dana PPK (Prasarana Fisik) Tahun 2004	Swadaya
1	Bendungan	57.425.000	5.946.500	52.271.343	5.643.500	37.161.000	3.152.000
2	Wiladeg	80.098.000	6.339.452	83.219.000	8.125.000	87.303.000	7.962.500
3	Kelor	76.190.000	6.833.400	58.434.326	4.746.500	65.330.000	6.236.000
4	Ngipak	99.751.000	6.825.000	77.008.200	5.240.000	59.506.000	4.224.700
5	Karangmojo	53.706.000	23.000.000	126.668.000	12.450.000	51.901.000	5.675.000
6	Gedangrejo	99.730.000	4.921.000	58.320.150	7.252.500	70.569.000	9.213.000
7	Ngawis	104.730.000	2.714.100	19.973.000	4.324.600	55.286.000	3.612.000
8	Bejiharjo	117.619.000	4.225.000	100.776.200	8.364.000	106.095.000	7.523.500
9	Jatiayu	80.415.000	6.280.000	39.727.600	4.125.000	98.000.000	7.821.000
		769.664.000	67.084.452	616.397.819	60.262.100	631.151.000	55.419.700

Sumber : Dokumentasi PPK

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo partisipasi masyarakat benar-benar terwujud dalam setiap kegiatan. Partisipasi akan ada dalam setiap tingkatan masyarakat dalam rangkaian kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo.

Seperti diungkapkan oleh Ketua TPK Desa Gedangrejo, Bapak Sukoyo, BE (55 tahun):

*“warga sangat rela memberikan bantuan berupa tenaga (bagi yang hanya dapat memberikan bantuan tenaga) dan materiil demi terlaksananya pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh PPK. Warga merasa bahwa program itu nantinya akan dimanfaatkan oleh mereka sendiri.”*

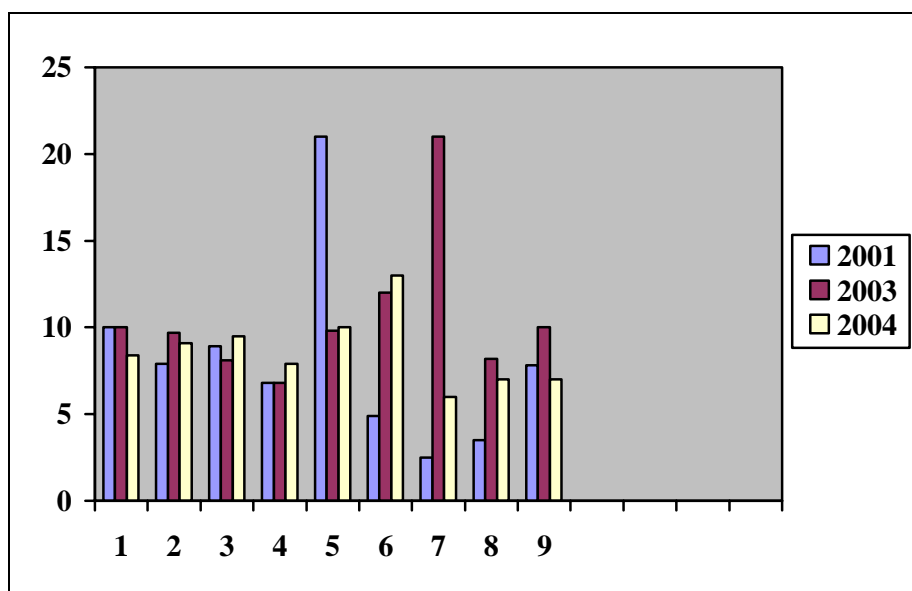
(1.16/PP)

Hal senada juga diungkapkan oleh Pengelola PPK Desa Bejiharjo, Bapak Sakidjo,

S.Pd :

*“kami merasa malu jika kegiatan yang dilaksanakan hasilnya hanya asal-asalan, untuk itu kami lebih baik menarik dana dari masyarakat sendiri (swadaya), dengan begitu kamu merasa puas dengan hasil kegiatan tersebut. Pembangunan tersebut nantinya akan dinikmati kami, semua warga Bejiharjo” (1.17/PP)*

Dari gambaran tersebut di atas, kiranya dapat diasumsikan bahwa masyarakat sangat antusias dan menerima Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo. Sikap antusias dan menerima itu akhirnya berwujud pada munculnya partisipasi dan swadaya yang muncul dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dan partisipasi yang dapat dirasakan secara nyata adalah dalam kegiatan fisik.



Sumber : Analisis

Peneliti:2008

**GAMBAR 4.14**  
**SWADAYA MASYARAKAT DALAM PPK**

- |   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 1 | Bendungan  | 6 | Gedangrejo |
| 2 | Wiladeg    | 7 | Ngawis     |
| 3 | Kelor      | 8 | Bejiharjo  |
| 4 | Ngipak     | 9 | Jatiayu    |
| 5 | Karangmojo |   |            |

Walaupun demikian dari diagram IV.11 tersebut dapat diketahui bahwa prosentase tingkat swadaya tiap tiap desa berkisar 2,5 % sampai dengan 21%. Hal tersebut tentunya terbilang kecil mengingat swadaya hanya berkisar 21% ke bawah dan masing perlu ditingkatkan.

Meskipun demikian tingkatan swadaya yang masih tergolong kecil, yang perlu menjadi catatan adalah kesadaran akan sebuah proses pembangunan yang melibatkan langsung warga masyarakat. Kesadaran tentang pembangunan yang berakar dari dalam masyarakat itu sendiri sehingga keberlanjutannya akan dapat selalu terjaga.

#### **4.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo**

Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. *Kedua*, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pembangunan kelembagaan di daerah. *Ketiga*, melindungi dan memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dengan menciptakan kemitraan saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Keyakinan seperti itu perlu diperkuat dan dimasyarakatkan lewat usaha-usaha nyata.

Seperti termuat dalam pernyataan Drs. Ambar Udiyatno (49 tahun, Kepala Seksi Pemberdayaan Kecamatan Karangmojo) :

*“Konsep pemberdayaan di sini (dalam PPK) diartikan bahwa program ini dimaksudkan sebagai sebuah penciptaan kondisi atau membuat satu keadaan yang mendukung atau memberikan satu tatanan sosial ekonomi kemasyarakatan di mana dengan kondisi tersebut masyarakat akan berdaya secara politik, ekonomi dan sosial budaya. Dengan adanya pembangunan prasarana misalnya jalan maka akan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan memberi kemudahan atas akses ekonomi sosial kemasyarakatan” (1/W/Pem.C/4)*

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah salah satu model pembangunan yang melakukan pendekatan partisipatif dan menekankan pada pemberdayaan masyarakat. PPK di Kecamatan Karangmojo tentunya tidak terlepas dari pemahaman model pembangunan seperti itu. PPK diharapkan memunculkan keberdayaan masyarakat di segala hal. PPK adalah sebuah proses dan dijadikan sebuah cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sebuah proses pembangunan dengan model *‘bottom up’*.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah PPK di Kecamatan Karangmojo mampu memunculkan suatu tatanan tentang pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut akan dilakukan analisis berdasarkan 3 (tiga) dimensi atau cara pandang yaitu : politik, sosial budaya dan ekonomi.

#### **4.4.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dimensi Politik**

Keikutsertaan masyarakat dalam setiap penentuan masyarakat dalam hal ini elite masyarakat, perempuan dan masyarakat miskin adalah gambaran bahwa PPK akan menumbuhkan pemberdayaan secara politik. Setiap proses yang terjadi dalam PPK adalah sebuah proses politik itu sendiri. Hal tersebut berarti bahwa PPK memberikan akses kepada semua masyarakat terutama warga miskin dan perempuan untuk ikut dalam sebuah proses penentuan sebuah kebijakan atau program. PPK adalah sarana warga masyarakat khususnya warga miskin dan perempuan untuk menjadi satu strata dengan sebuah struktur masyarakat

tanpa memandang elite-elite yang ada dalam sebuah perumusan kegiatan. Masyarakat khususnya warga miskin dan perempuan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain dalam segala hal yang berkaitan dengan PPK.

Dalam sebuah koridor musyawarah, yang merupakan representasi dari proses politik, maka warga miskin dan perempuan dan juga masyarakat lainnya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian PPK memberikan akses yang sama kepada semua pihak untuk duduk bersama dalam satu strata dan menjadikan hal tersebut sebuah pemberdayaan masyarakat berdimensi politis.

Pemberdayaan berdimensi politik berarti juga memberikan sebuah struktur kehidupan sosial ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Sebuah model pembangunan yang dipola bersumber dari rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat dengan mempergunakan kekuatan lokal di masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Kecamatan Karangmojo telah mampu melaksanakan sebuah proses pembangunan lokal dengan menggunakan struktur-struktur sosial yang ada. Pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan menggunakan jaringan pemerintahan mulai dari tataran terendah yaitu tingkat RW, dusun, desa dan kecamatan. Dimulai dengan pertemuan-pertemuan RW maka kemudian mulai muncul gagasan-gagasan terhadap pelaksanaan dan perencanaan pembangunan skala lokal.

PPK sedikit banyak telah membantu warga masyarakat di Kecamatan Karangmojo dalam memberikan gagasan dan ide terhadap apa yang menjadi cara pandang dan keinginan mereka terhadap pelaksanaan pembangunan. Paradigma lama yang mengkondisikan warga masyarakat pasif dan menunggu pemberian program-program pembangunan dari pemerintah sekarang telah berganti dengan paradigma pembangunan partisipatif.

#### 4.4.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dimensi Sosial Budaya

Pemberdayaan berdimensi sosial budaya berarti kondisi di mana masyarakat memandang sebuah proses pembangunan adalah sebuah budaya. Dan hal tersebut berarti juga terlembaganya nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang menjadikan masyarakat mampu memberikan kontribusinya dalam proses yang ada.

Kondisi sosial budaya yang dianggap sebuah proses pemberdayaan dalam PPK di Kecamatan Karangmojo adalah sikap dan apresiasi masyarakat Kecamatan Karangmojo. Sikap dan apresiasi itu adalah budaya dalam masyarakat seperti sikap gotong royong, kerja bakti yang digunakan dalam mendukung program yang ada.

PPK memberikan sebuah suasana kebatinan baru terhadap perencanaan pembangunan dengan model '*bottom up*'. Masyarakat menjadi sadar bahwa pembangunan akan dapat dilaksanakan mereka sendiri dengan bertumpu pada swadaya atau kekuatan yang ada. Budaya swadaya, swakelola dan budaya partisipasi menjadikan kelancaran terhadap proses-proses dalam PPK.

Pelaksanaan PPK juga memberikan sikap dan cara pandang di kalangan masyarakat bahwa mereka mampu mandiri dalam melaksanakan pembangunan di tingkat lokal. Masyarakat di Kecamatan Karangmojo telah memandang bahwasannya sekarang ini pembangunan tidak harus menunggu pemberian dari pemerintah. Dengan semangat swadaya, pembangunan secara mandiri telah menjadi melembaga dan membudaya di kalangan masyarakat di Kecamatan Karangmojo. Hal tersebut tercermin di tingkat RW yaitu selalu ada pembahasan soal pembangunan walaupun itu terbatas di wilayah RW yang bersangkutan. Tiap RW di Kecamatan Karangmojo juga terdapat alokasi dana untuk pelaksanaan pembangunan.

Dalam dimensi sosial budaya berarti juga dalam proses-proses PPK itu, masyarakat diberikan satu keleluasaan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan itu menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri yang tentunya disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah :

- Semangat kebersamaan dan gotong royong dalam berbagai kegiatan desa, seperti tradisi rasulan (bersih dusun/desa)
- Kelembagaan di tingkat lokal dalam menyikapi kondisi sosial dan lingkungan yang berkembang cukup baik, yang dikoordinir oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, kegiatan rembug warga, rembug desa.
- Memiliki toleransi dan semangat saling membantu baik pada warga yang memiliki kesamaan suku, agama dan strata ekonomi.
- Keinginan dan motivasi masyarakat setempat maju dan berkembang dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

#### **4.4.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dimensi Ekonomi**

Dana PPK yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi tentunya dipandang sebagai sebuah bantuan yang mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Dengan bantuan yang ada diharapkan masyarakat akan mengembangkannya untuk kegiatan yang mampu meningkatkan derajat pendapatannya. Dipergunakannya bantuan tersebut untuk modal usaha atau penambahan modal menjadikan masyarakat akan lebih meningkatkan kesejahteraan.





Sumber : Dokumentasi PPK

**GAMBAR 4.15**  
**PELAKU KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF**  
**DESA GEDANGRJO DAN JATIAYU**

Gambar 4.15 di atas adalah salah satu contoh dari penerima bantuan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam PPK. Kegiatan tersebut adalah pembuatan ‘*retengan*’ atau makanan kecil dan satunya adalah dipergunakan untuk warung makanan. Kegiatan kerajinan makanan kecil adalah salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh ibu-ibu yang menerima bantuan PPK, seperti pembuatan kerupuk, peyek, kacang dan masih banyak lagi. Kegiatan seperti pembuatan kerajinan makanan kecil seperti di atas salah satunya dilakukan oleh Ibu Suwanto, Dusun Wonotoro Desa Gedangrejo. Sedangkan untuk usaha warung makan salah satunya adalah dilakukan oleh Ibu Rukmini di Desa Jatiayu. Bantuan-bantuan untuk ekonomi produktif yang dimanfaatkan seperti tersebut di atas adalah salah satu bentuk kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan warga masyarakat.

Pemberian bantuan melalui kegiatan simpan pinjam dan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif tidak serta merta dapat mengubah keadaan atau dengan kata lain masyarakat yang diberikan bantuan langsung terentaskan dari kemiskinan. PPK bukanlah program yang secara langsung dapat melakukan perubahan drastis dalam waktu yang singkat. Di sini PPK memberikan *entry point* terhadap proses-proses sebuah pemberdayaan yaitu

*pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. *Kedua*, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pembangunan kelembagaan di daerah. *Ketiga*, melindungi dan memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dengan menciptakan kemitraan saling menguntungkan.

Di Kecamatan Karangmojo, bantuan untuk kegiatan ekonomi diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha. Kegiatan yang dilakukan sebagian besar aneka usaha, mulai dari warung kecil-kecilan, aneka usaha seperti usaha makanan ringan dan makanan kecil. Kebanyakan bantuan modal usaha dipakai untuk kegiatan berusaha.

Dana bantuan yang diberikan adalah sebuah dana stimulan atau tambahan untuk dialokasikan kegiatan ekonomi produktif. Masyarakat diberikan dana tambahan untuk lebih meningkatkan modal usahanya. Dari hal tersebut bisa dilakukan pemupukan modal sehingga akan dapat berkembang dan bertambah. Dengan terjadinya pemupukan modal maka usaha ekonomi yang diberikan bantuan akan terus berkembang dan masyarakat akan mempunyai tabungan yang menjadi salah satu sarana investasi ekonomi.

Dapat dimengerti bila PPK mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Diasumsikan bahwa masyarakat terutama warga miskin dapat menjadikan bantuan tersebut untuk modal usaha walaupun usaha kecil. Dan dari usaha kecil tersebut akan dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan peningkatan pendapatan maka kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo juga memberikan bantuan pekerjaan walaupun jangka pendek. Disebut seperti itu karena dalam

pengerjaan kegiatan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat pedesaan tempat kegiatan tersebut berada disamping adanya semangat swdaaya ataupun gotong-royong. Pemanfaatan tenaga kerja dalam kegiatan yang dilaksanakan tentunya menambah pendapatan dari masyarakat tersebut, seperti program padat karya. Kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja dengan imbalan sesuai harga pasaran.

Menyusul dibangunnya sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan di Kecamatan Karangmojo memberikan kemudahan terhadap akses usaha dan jasa. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya akses sarana dan prasarana memberikan pula kemudahan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, usaha dan jasa. Seperti yang terjadi dengan terbangunnya jembatan yang menghubungkan Dusun Bulu dan Dusun Ngepung dengan Dusun Sumberjo di Desa Karangmojo. Atau dengan dibangunnya pasar desa di dusun Sokoliman Desa Bejiharjo, yang memberikan kemudahan terhadap kegiatan usaha dan jasa masyarakat.

Akhirnya pemberdayaan secara ekonomi di PPK berarti bantuan berupa kegiatan fisik prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi sosial masyarakat dan bantuan kegiatan ekonomi berupa dana simpan pinjam dan usaha ekonomi produktif adalah proses di mana masyarakat diberikan kail untuk dapat memperoleh ikan, bukannya masyarakat langsung diberi ikan untuk dapat langsung dimakan. Masyarakat Kecamatan Karangmojo melalui bantuan-bantuan tersebut dirangsang agar dapat lebih berdaya dengan segala sumber daya yang dimilikinya sehingga kesejahteraannya akan meningkat.

#### **4.5 Evaluasi Kesesuaian Konsep dan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo**

Tingkat keberhasilan atau kesesuaian konsep dan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilakukan penilaian berdasarkan prinsi-prinsip dari program tersebut. Kesesuaian berarti juga menilai apakah prinsip-prinsip program telah dijalankan dan dipatuhi secara benar.

Analisis dilakukan untuk melihat apakah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari program tersebut tercapai.

**TABEL IV.3**  
**INDIKATOR KEBERHASILAN PPK DI KECAMATAN KARANGMOJO**

No.	Konsep / Indikator	Implementasi	Kondisi/Kajian
1	Desentralisasi		
	Dalam rangka mewujudkan desentralisasi PPK, maka pemerintah menyerahkan wewenang penuh kepada masyarakat untuk: - mengelola dana PPK - merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana PPK - mempertanggungjawabkan pengelolaan dana PPK	Pengelolaan PPK dalam prinsip desentralisasi terwujud dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal penggalan gagasan, penentuan kegiatan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan adalah menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa menjadi fasilitator terhadap program. Untuk kegiatan pembangunan fisik, dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang beranggotakan dari masyarakat itu sendiri.	Prinsip desentralisasi dalam PPK di Kecamatan Karangmojo diaktualisasikan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dari tahap sosialisasi program sampai serah terima hasil merupakan wujud desentralisasi. Desentralisasi ditunjukkan juga dengan ditentukannya oleh masyarakat sendiri mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam PPK dan siapa yang melaksanakan. Prinsip desentralisasi telah diterapkan dalam PPK di Kecamatan Karangmojo. Hal tersebut dengan pemberian hak penuh kepada tiap desa melalui TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk melaksanakan kegiatan fisik. Penentuan anggaran dan detail kegiatan ditentukan oleh TPK tiap desa dengan mendapat bantuan teknis dari Fasilitator Teknis PPK
2	Keterbukaan		
	Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK terbuka untuk umum. Keterbukaan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat	Bahwa pelaksanaan PPK dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui masyarakat luas. Segala sesuatu yang dilakukan oleh semua	Tahap-tahap PPK dilaksanakan secara terbuka, hal itu dilihat dengan segala keputusan yang ada harus melalui musyawarah-musyawarah baik tingkat dusun, desa dan atau kecamatan. Keberadaan papan informasi tentang

	<p>dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-mengambil keputusan yang berkaitan dengan PPK</li> <li>-memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus tentang segala sesuatu yang mencakup PPK</li> <li>-menumbuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>-mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan PPK</li> <li>-meningkatkan saling percaya di antara sesama pelaku PPK</li> </ul>	<p>pelaku PPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.</p> <p>Adanya papan informasi PPK yang memuat pengalokasian dana di setiap desa merupakan bukti adanya transparansi.</p> <p>Musyawarah Desa Monitoring dan Evaluasi dan juga Musyawarah Desa Serah Terima dilakukan agar ada kontrol dari masyarakat akan kinerja Tim Pengelola Kegiatan</p>	<p>PPK telah difungsikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, hanya saja masih terbatas pada lokasi di kantor kecamatan dan kantor kepala desa.</p> <p>Setiap pelaksanaan kegiatan selalu diadakan Musyawarah Pertanggungjawaban dan Musyawarah Serah Terima</p>
3	Partisipasi		
	<p>Pengertian partisipasi dalam PPK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan PPK. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dana PPK di kecamatan melalui forum UDKP setelah sebelumnya dibahas dalam forum musyawarah desa.</p>	<p>Keterlibatan masyarakat secara aktif terutama dari kelompok miskin dalam seluruh kegiatan merupakan dasar dari pelaksanaan PPK. Kehadiran masyarakat, pengambilan keputusan dan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan merupakan satu wujud partisipasi masyarakat.</p> <p>Dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, prioritas para pekerja yang melaksanakan kegiatan berasal dari masyarakat miskin. Pembayaran upah diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan.</p>	<p>Bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam PPK di Kecamatan Karangmojo adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kehadiran dalam setiap musyawarah PPK</li> <li>- ikutsertanya dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan PPK</li> <li>- ikut serta dalam penggalian gagasan dengan memberikan usulan kegiatan dalam PPK</li> </ul>
4	Keterlibatan orang miskin		
	<p>PPK mengharuskan keterlibatan orang miskin mulai dari pengambilan keputusan, penentuan kegiatan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kegiatan. Masyarakat miskin harus terwakili dalam setiap proses pengambilan keputusan</p>	<p>Keterlibatan masyarakat miskin diharapkan dari proses awal sampai dengan akhir, mengingat penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan utama PPK. Setiap kegiatan PPK harus selalu</p>	<p>Keterlibatan masyarakat miskin masih perlu ditingkatkan kembali. Adanya sistem perwakilan forum Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa sering menyebabkan aspirasi dari kaum miskin seolah tidak terakomodasi.</p> <p>Usulan yang seharusnya benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin namun pada kenyataannya bukan</p>

	termasuk dalam perencanaan melalui pertemuan kelompok, dusun dan musyawarah desa serta forum UDKP	mempertimbangkan keberadaan dan keterlibatan kelompok orang miskin.	dari golongan itulah yang menikmati.
5	Keterlibatan perempuan		
	PPK mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap perencanaan dan pelaksanaan program, agar kegiatan dan hasil-hasilnya tidak memarginalkan komunitas perempuan. Perempuan harus terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan melalui kelompok pertemuan dan keikutsertaan wakil-wakil perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan.	Keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan memang disyaratkan dalam PPK. Dalam tahapan yang dilalui keterlibatan perempuan harus selalu ada.	Adanya kuota usulan berupa pemberian hak istimewa kepada perempuan terakomodir melalui Musyawarah Khusus Perempuan. Di Kecamatan Karangmojo pemanfaat dana ekonomi selama 3 tahun 70% adalah perempuan.
6	Kompetisi Sehat		
	Usulan-usulan kegiatan masyarakat harus dikompetisikan secara sehat sesuai dengan kriteria kegiatan untuk mendapatkan dukungan dana PPK. Setiap desa berhak mengajukan usulan kegiatan. Setiap desa yang mengajukan usulan tidak otomatis akan mendapatkan dana bantuan. Kompetisi dimulai dari pemilihan gagasan unggulan di tingkat kelompok/dusun, penentuan usulan kegiatan melalui keputusan desa dalam musyawarah desa dan penentuan kegiatan terpilih melalui keputusan dalam forum UDKP	Setiap pengambilan keputusan dalam PPK dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi yang sehat dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah mufakat agar tidak terjadi dominasi dari individu atau kelompok tertentu. Masih besarnya rasa kebersamaan dengan pemahaman “dapat satu dapat semua” di dalam masyarakat menyebabkan penerapan aturan kompetisi ini kurang begitu berhasil.	Dalam pelaksanaan PPK di Kecamatan Karangmojo kompetisi sehat dimaksudkan adalah proses pengambilan keputusan dalam musyawarah di tiap tingkatan. Mulai dari penggalan gagasan di tiap kelompok masyarakat, musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah antar desa dan yang terakhir dalam forum UDKP. Dalam musyawarah di berbagai tingkatan tersebut, akan diberikan kebebasan dalam pengusulan kegiatan dan akan didiskusikan sehingga gagasan terhadap usulan kegiatan yang paling baik dan dapat dipertanggungjawabkanlah yang akan diberikan bantuan.
7	Swadaya		
	Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat	Sebagai sebuah perwujudan kesanggupan	Di Kecamatan Karangmojo, di semua desa yang melaksanakan pembangunan

	yang disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap PPK. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana maupun materiil untuk pelaksanaan serta pemeliharaan kegiatan yang diusulkan	dari masyarakat dalam andil kegiatan berdasarkan kemampuannya, hasilnya adalah swadaya yang muncul dalam kegiatan PPK cukup besar. Penggalan dana swadaya cukup besar karena kegiatan PPK merupakan rencana pembangunan yang telah lama diharapkan	sarana dan parasarana fisik, telah memunculkan swadaya baik materiil ataupun tenaga kerja.
8	Hibah dan Perguliran		
	Dana PPK adalah hibah dari pemerintah pusat kepada masyarakat di seluruh kecamatan. Untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, dana yang disalurkan tidak wajib dikembalikan dengan syarat masyarakat yang bersangkutan melakukan pengoperasian dan pemeliharaan. Untuk kegiatan penyediaan modal usaha, dana yang disalurkan kepada kelompok adalah pinjaman yang harus	Bantuan PPK diwujudkan dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Fisik</li> <li>- Kegiatan Ekonomi</li> <li>- Kegiatan PKK (Peningkatan Kualitas dan Kesehatan Masyarakat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan PPK tersebut di masing-masing desa akan beragam, tidak sama satu sama lain. Hal tersebut tergantung usulan dari tiap-tiap desa</li> <li>- Perguliran juga dilaksanakan dengan melihat hasil pengembalian pinjaman proses sebelumnya. Kelancaran dalam pengembalian pinjaman akan mempengaruhi besarnya pinjaman proses selanjutnya atau bahkan tidak diberikan pinjaman.</li> </ul>
9	Sanksi		
	Sanksi adalah hukum terhadap pelanggaran kesepakatan dan peraturan yang dibuat dalam PPK. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PPK, sehingga warga masyarakat yang seharusnya bisa merasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan. Sanksi dapat ditetapkan oleh masyarakat sendiri. Sanksi ditentukan harus	Sanksi merupakan bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang dibuat dalam PPK.  Sanksi ini dapat berupa sanksi masyarakat, sanksi hukum atau sanksi administratif.	Untuk sanksi, biasanya condong ke kegiatan ekonomi. Hal tersebut berhubungan dengan perguliran dana bantuan, yaitu keterlambatan dalam pengembalian pinjaman. Sanksinya adalah desa yang bersangkutan akan dikurangi pemberian bantuan untuk periode selanjutnya.

	diputuskan dalam forum UDKP		
10	Pelestarian		
	Masyarakat bertanggung jawab terhadap kesinambungan setiap usulan kegiatan yang diusulkan dan ditetapkan oleh forum UDKP untuk mendapatkan dana PPK	Seluruh hasil kegiatan PPK yang telah dilaksanakan oleh masyarakat wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Segala keputusan yang menyangkut pengembangan atau pelestarian kegiatan harus disepakati dalam musyawarah desa dan atau musyawarah antar desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelestarian untuk kegiatan fisik telah dilaksanakan dengan pemanfaatan hasil pembangunan dengan diikuti pengaturan terhadap pemanfaatannya. Misalnya: Cor Rabat beton jalan, akan diberikan batasan terhadap jenis kendaraan yang melaluinya.</li> <li>- Untuk jalan desa yang dibangun dengan perkerasan model batu putih saja, maka pelestariannya akan dilaksanakan dengan model perbaikan periodik kerja bhakti.</li> <li>- Pelestarian kegiatan ekonomi adalah dengan ketepatan dalam membayar angsuran pinjaman.</li> </ul>

Berdasarkan tabel indikator keberhasilan di atas dan dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dapat diambil analisa bahwa proses pelaksanaannya di Kecamatan Karangmojo telah memenuhi 10 (sepuluh) prinsip pelaksanaan PPK. Pemakaian prinsip-prinsip Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam penilaian atau evaluasi dirasakan sebagai satu hal yang penting. Dengan dijalankannya sebuah kebijakan semacam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan prinsip-prinsip program tersebut maka pencapaian dari tujuan yang ingin dicapai akan dapat terwujud. Hal tersebut pada akhirnya akan membawa satu kondisi yang ideal bahwa tujuan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang akan mengatasi masalah kemiskinan akan dapat diwujudkan dengan pelaksanaan program yang berpedoman pada prinsip-prinsip yang dipakai.

Dengan dipatuhinya prinsip-prinsip Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaannya maka proses penanggulangan kemiskinan seperti tujuan dari program

tersebut akan tercapai. Walaupun tidak serta merta namun proses pencapaian penanganan masalah kemiskinan akan dapat diatasi. Hal tersebut karena Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memberikan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaannya sekaligus sebuah program berbasis pemberdayaan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Karangmojo telah menciptakan kemudahan akses sosial ekonomi masyarakat dengan adanya bantuan fisik dan ekonomi. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari dipatuhinya prinsip-prinsip Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaannya.

#### **4.5.1 Penerapan Prinsip dan Ketentuan Dasar PPK**

Secara umum Proses Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berjalan sesuai dengan ketentuan dasar dan prinsip-prinsip PPK. Partisipasi, keberpihakan dan keterlibatan orang miskin terlihat dalam proses penggalan gagasan, penentuan usulan kegiatan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil serta pelestariannya. Hal tersebut tercermin dari beberapa kegiatan yang secara langsung dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan oleh mereka. Sebagai contoh, dalam perkerasan jalan di desa Bejiharjo dan Ngawis serta pemanfaatan dana sehat di desa Wiladeg. Keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai bentuk partisipasi dalam PPK diantaranya keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan prasarana.

Dalam hal keterlibatan perempuan, pada setiap proses kepentingan perempuan sudah terwakili dalam semua tahapan kegiatan. Sebagai contoh, banyaknya usulan yang diajukan oleh kelompok perempuan serta partisipasinya dalam forum. Walaupun tidak semua peserta yang hadir berani mengungkapkan pendapat atau pemikirannya.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi sehat. Walaupun pada kenyataannya penerapan prinsip ini belum dilaksanakan secara sempurna. Hal ini dapat diketahui dari laporan Musyawarah Antar Desa (MAD) I PPK Tahun 2003. Contohnya, untuk desa Karangmojo saat itu mendapatkan alokasi dana bantuan P2KP. Akan tetapi Forum MAD memutuskan Desa Karangmojo ikut berkompetisi mendapatkan dana bantuan. Sama halnya dengan Desa Gedangrejo yang mendapatkan bantuan P2KP di tahun itu juga.

Transparansi pengelolaan seluruh kegiatan diwujudkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban, di mana dalam forum tersebut TPK mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima dari UPK PPK Kecamatan Karangmojo baik secara administrasi maupun pekerjaannya. TPK desa memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada forum. Hal tersebut dimaksudkan agar forum dapat mencermati laporan secara mendetail. Sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian akan berjalan secara maksimal. Selain itu adanya papan informasi yang memuat informasi kegiatan dan alokasi dana merupakan salah satu bentuk transparansi.

Swadaya merupakan bentuk kesanggupan dan partisipasi masyarakat dalam andil pelaksanaan kegiatan. Besarnya swadaya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa. Secara umum bentuk swadaya yang muncul selama pelaksanaan pekerjaan yaitu tenaga kerja, material berupa batu putih, pasir serta tanah. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas penggunaan jalan yang nyaman membuat warga tak segan-segan untuk mengeluarkan swadaya baik berupa tenaga kerja dan materiil. Sebagai contoh: Desa Gedangrejo, swadaya batu putih untuk urugan pada rabat jalan serta tenaga kerja selama pelaksanaan, demikian juga untuk desa Ngawis, Jatiayu dan Bejiharjo.

#### 4.5.2 Pemantauan Hasil Kegiatan

##### a. Pemantauan Kegiatan Ekonomi

Dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberian modal usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Diharapkan dana tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Alokasi dana PPK untuk kegiatan ekonomi telah mampu memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok usaha produktif serta simpan pinjam di Kecamatan Karangmojo.

Sebagai gambaran perkembangan hasil kegiatan ekonomi melalui pemberian pinjaman modal untuk kegiatan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL IV.4**  
**PENGEMBANGAN DANA EKONOMI**  
**UPK PPK MAKMUR KECAMATAN KARANGMOJO**

No.	Uraian	Jumlah
1	Dana BPPK Tahun I,II, III	Rp. 670.382,000,-
2	Asset Dana UPK sampai saat ini	Rp. 830.405.891,-
3	Kelompok yang pernah dilayani	Rp. 185 kelompok
4	Anggota yang pernah dilayani	3.919 peminjam

*Sumber : UPK PPK 'Makmur' Kecamatan Karangmojo*

##### b. Pemantauan Kegiatan Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Karangmojo ditunjukkan dengan adanya beberapa usulan bidang pendidikan dari beberapa desa seperti Kelor, Karangmojo, Wiladeg, Bendungan dan Bejiharjo, baik berupa pembangunan gedung TK, perbaikan gedung maupun perlengkapan belajar dan alat-alat permainan.

Pelaksanaan pekerjaan gedung dikerjakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan mendapatkan pendampingan dari Fasilitator Kecamatan (FK).

Pada umumnya kondisi hasil pekerjaan 3 (tiga) tahun PPK di Kecamatan Karangmojo untuk bidang pendidikan masih baik. Namun begitu, tidak banyak pengembangan. Untuk gedung biasanya hanya dilakukan pengecatan, sedangkan untuk peralatan yang habis dalam satu kali pemakaian contohnya buku bergambar di TK Mekar Bejiharjo tidak ada penambahan lagi.

#### c. Pelatihan

Kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan kemampuan diri dalam mengembangkan semangat berwirausaha mendorong munculnya usulan berbagai jenis pelatihan dari kaum ibu melalui Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP) seperti pelatihan *home industri* makan kecil, pelatihan pupuk yang diusulkan desa Gedangrejo serta pelatihan sanggan, kue dan rias pengantin yang diusulkan desa Wiladeg. Hal ini menggambarkan bahwa peran kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatan PPK cukup aktif walaupun persentasenya masih sedikit.

Dari kegiatan pelatihan home industri beberapa kelompok telah berkembang usahanya. Sebagai contoh Kelompok Mekarsari Gedangan I Gedangrejo yang masing-masing anggota telah mandiri dengan mengembangkan produk hasil pelatihan berupa keripik tempe, rempeyek kedelai, kerupuk kedelai, serta wajik kletik.

#### d. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar dalam pembangunan, oleh karena itu kebutuhan ini perlu ditanamkan dan dikembangkan pada masyarakat sejak dini. Pentingnya kesehatan disadari betul oleh kaum ibu di wilayah Kecamatan Karangmojo. Keinginan itu tercermin dari beberapa usulan kegiatan bidang kesehatan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), peralatan Yandu, alat permainan edukatif yang diusulkan Desa Bendungan,

Bejiharjo, Gedangrejo dan Jatiayu serta dana sehat yang diusulkan oleh desa Wiladeg. Adanya bantuan dana PPK yang diperuntukkan bagi kegiatan kesehatan diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk terus menerus meningkatkan kualitas hidupnya melalui upaya-upaya hidup sehat

Sampai saat ini kondisi peralatan yang didanai dari dana PPK masih terawat dan masih digunakan dalam kegiatan pelayanan terpadu (Yandu) di masing-masing dusun di desa-desa penerima dana PPK.

e. Prasarana

Kecamatan Karangmojo merupakan kecamatan yang berada di dekat ibukota Kabupaten Gunungkidul. Jaraknya lebih kurang 8 km dari Wonosari. Kondisi tersebut mendukung desa-desa di wilayah Kecamatan Karangmojo untuk memiliki prasarana transportasi yang memadai dan bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya usulan jalan (baik berupa perbaikan atau peningkatan) yang diajukan melalui PPK. Usulan perbaikan dan peningkatan jalan dipandang mampu memberikan kemudahan terhadap akses perekonomian. Diasumsikan dengan adanya fasilitas jalan yang memadai maka desa-desa tersebut akan lebih mudah dijangkau oleh kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan perekonomian. Hal tersebut juga berarti bahwa kualitas dan kuantitas prasarana transportasi berupa jalan masih kurang.

Jenis-jenis pekerjaan yang diusulkan dalam UDKP/MAD selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan PPK di Kecamatan Karangmojo adalah:

- Perkerasan Jalan
- Cor Rabat Beton Jalan

- Jembatan dan Talud
- Sarana Air Bersih dan MCK/Sanitasi
- Pasar
- Gedung Sekolah

Dari hasil-hasil pelaksanaan tahun I dan II beberapa hal yang menjadi catatan:

- Perkerasan Jalan

Panjang total kurang lebih dari 28.011,8 meter selama pelaksanaan 3 (tiga) tahun PPK. Namun, minimnya pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat, pada umumnya hasil pelaksanaan kegiatan memasuki tahun ke-3 telah banyak mengalami kerusakan. Terutama pada bagian lapisan atas yaitu pasir atau keprus telah aus. Penggunaan jalan yang melebihi kelasnya menjadi penyebab utama dari kerusakan.

- Cor Rabat Beton

Dengan panjang total lebih 4.651 meter selama pelaksanaan 3 (tiga) tahun PPK, rabat beton menjadi pilihan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang berupa tanjakan tetapi ada pula karena alasan kemudahan dalam pelaksanaan.

- Jembatan dan Talud

Umumnya pekerjaan pembuatan jembatan dan talud sampai saat ini masih dalam kondisi baik.

- Prasarana Air Bersih dan MCK

Sampai dengan tahun ketiga (3), bangunan-bangunan tersebut umumnya masih baik. Hanya MCK yang dibangun pada PPK tahun 2001 yang berlokasi di TK PKK Desa Ngipak kurang berfungsi maksimal karena tidak didukung dengan sumber air yang memadai (tidak ada sumber airnya). Hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika dalam

perencanaan awalnya diikuti dengan perencanaan mengenai sumber air untuk operasional MCK tersebut.

- Los Pasar

Dibangun di Dusun Sokoliman Desa Bejiharjo, merupakan satu-satunya bangunan los pasar dalam pelaksanaan 3 (tiga) tahun PPK. Sampai saat ini los pasar tersebut masih sebagaimana mestinya tetapi belum ada perkembangan dari los pasar tersebut.

- Gedung Sekolah dan Permainan (Taman Kanak-Kanak)

Sejak tahun pertama PPK hingga tahun ketiga usulan sarana pendidikan mewarnai pelaksanaan kegiatan PPK di Kecamatan Karangmojo. Rehab gedung TK pada tahun ke-2 berlokasi di Dusun Gatak Desa Karangmojo, penambahan ruang kelas di Dusun Karangnongko Desa Wiladeg serta pembangunan gedung di Dusun Watudalang Desa Bendungan. Sampai saat ini kondisinya masih baik dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan TK.

## **BAB V** **P E N U T U P**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip program yaitu desentralisasi, keterbukaan, partisipasi, keterlibatan orang miskin, keterlibatan perempuan, kompetisi sehat, swadaya dan pemantauan serta pelestarian.
2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan :
 

1 Musyawarah Antar Desa (MAD) I	6 Musyawarah Antar Desa (MAD) II
2 Musyawarah Desa I	7 Musyawarah Antar Desa (MAD) III
3 Penggalian Gagasan	8 Musyawarah Desa III
4 Musyawarah Khusus Perempuan	9 Pelaksanaan
5 Musyawarah Desa II	10 Musyawarah Monitoring
	11 Musyawarah Desa Serah Terima

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PPK di Kecamatan Karangmojo benar-benar berdasarkan musyawarah dari masyarakat. Berarti juga bahwa proses perencanaan sampai tahap pelaksanaan dilaksanakan penuh oleh masyarakat sendiri. Dengan melalui tahapan-tahapan musyawarah dalam masyarakat tersebut berarti juga prinsip-prinsip program telah dilaksanakan, karena melalui forum musyawarah tersebut prinsip-prinsip seperti dalam poin 1 (satu) di atas diterapkan.

3. Alokasi dana PPK untuk kegiatan ekonomi telah mampu memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok usaha produktif serta simpan pinjam di Kecamatan Karangmojo. Didapatkan tingkat pengembalian kegiatan SPP dan UEP mencapai harapan, yaitu mencapai kurang lebih 80%. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelestarian kegiatan

mencapai hal yang positif. Yang berarti juga bahwa tingkat kesadaran warga untuk melestarikan dengan cara ketepatan dan rajin dalam membayar angsuran cukup baik.

4. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo telah berhasil menghimpun dana abadi yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan kemampuan dan kapasitas masyarakat. Seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL V.1**  
**PENGEMBANGAN DANA EKONOMI**  
**UPK PPK MAKMUR KECAMATAN KARANGMOJO**

No.	Uraian	Jumlah
1	Dana BPPK Tahun I,II, III	Rp. 670.382,000,-
2	Asset Dana UPK sampai saat ini	Rp. 830.405.891,-
3	Kelompok yang pernah dilayani	Rp. 185 kelompok
4	Anggota yang pernah dilayani	3.919 peminjam

*Sumber : UPK PPK 'Makmur' Kecamatan Karangmojo*

5. Jenis-jenis pekerjaan yang diusulkan dan telah dilaksanakan dalam UDKP/MAD selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan PPK di Kecamatan Karangmojo adalah:
- Perkerasan Jalan
  - Cor Rabat Beton Jalan
  - Jembatan dan Talud
  - Sarana Air Bersih dan MCK/Sanitasi
  - Pasar
  - Gedung Sekolah
6. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo telah mampu sebagai program stimulan yang berarti hanya memberikan rangsangan kepada masyarakat agar bisa mandiri dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pembangunan prasarana fisik dan kegiatan ekonomi produktif. Keterlibatan masyarakat dalam program ini juga telah menunjukkan hal yang sangat positif. Masyarakat Kecamatan Karangmojo sangat

apresiasif terhadap PPK, sehingga memunculkan wujud partisipasi yang sangat mendukung kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat Kecamatan Karangmojo terwujud melalui keterlibatan penuh warga dalam setiap tahapan kegiatan bahkan partisipasi telah mewujud dalam keikhlasan melakukan swadaya untuk mendukung kegiatan. Dalam 3 tahun PPK dilaksanakan di Kecamatan Karangmojo sembilan (9) desa yang telah mengeluarkan swadaya yang merupakan hal yang positif terhadap proses pembangunan lokal.

7. Partisipasi perempuan dalam PPK di Kecamatan Karangmojo juga menunjukkan hal yang cukup mengembirakan. Di Kecamatan Karangmojo menunjukkan bahwa perempuan mendominasi sebesar 65% untuk kegiatan ekonomi melalui Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam. Melalui PPK, kaum perempuan telah berani menyalurkan aspirasinya dan tidak lagi pasif dalam menerima proses-proses pembangunan. Di PPK Kecamatan Karangmojo juga dilakukan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) yang memberikan saluran aspirasi terhadap kaum perempuan.

## **5.2. Rekomendasi**

Dari hasil kajian dan kesimpulan, maka terdapat beberapa rekomendasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Rekomendasi tersebut antara lain :

1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) layak dipertahankan karena dalam pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, melalui pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi baik ekonomi produktif maupun simpan pinjam, perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan masyarakat pengguna. Selama ini pemanfaat program di kegiatan ekonomi belum secara maksimal keberpihakannya terhadap orang miskin. Selama

ini pemanfaat program khususnya kegiatan ekonomi masih didominasi mereka-mereka yang sebenarnya cukup mampu. Bantuan yang diberikan masih belum diterima oleh warga masyarakat yang benar-benar miskin. Memang dari segi perguliran dana jika bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar miskin terdapat dilema terhadap pelestarian kegiatannya. Diasumsikan jika diberikan kepada warga yang benar-benar miskin maka akan terdapat ketidaklancaran dalam proses pengembaliannya dan hal tersebut akan mengganggu tahap-tahap selanjutnya. Untuk itu perlu kiranya diformulasikan agar terdapat pendampingan dari instansi-instansi terkait atau pengelola agar warga yang benar-benar miskin mendapatkan bantuan namun dengan bimbingan dalam pemanfaatan bantuan melalui usaha ekonomi produktif.

3. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan PPK terutama melalui kegiatan ekonomi produktif haruslah selalu diberikan pendampingan dan pemantauan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan agar dari kegiatan-kegiatan yang mendapat bantuan dapat dipertahankan. Pengelola PPK melalui pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah haruslah dapat memberikan pembinaan dan pendampingan pasca kegiatan PPK dilaksanakan. Dengan pembinaan dan pendampingan maka usaha-usaha yang semula dibiayai oleh PPK dan masih dalam skala kecil dapat berkembang menjadi lebih besar. Sehingga tujuan PPK yang ingin memberdayakan masyarakat secara ekonomi dapat tercapai, karena PPK hanyalah program stimulan yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui bantuan modal usaha.
4. Perlu diadakannya insentif dalam proses pelaksanaan kegiatan baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan fisik. Pemberian insentif dapat diwujudkan melalui bentuk bantuan yang otomatis diterima oleh masyarakat, khususnya dalam pembangunan prasarana fisik. Insentif di sini diartikan jika dalam proses-proses pembangunan masyarakat dapat memunculkan

tingkat swadaya yang cukup besar maka masyarakat yang bersangkutan akan diberikan bantuan langsung tanpa harus melalui kompetisi dengan desa-desa lainnya.

5. PPK harus mampu menciptakan ruang yang lebih luas untuk membahas sasaran-sasaran kemiskinan dengan meletakkan fokus pada perencanaan desa jangka menengah dan jangka panjang. Guna menunjukkan ada tekad untuk fokus pada perencanaan multi tahun, maka hendaknya dimungkinkan untuk mengajukan lebih banyak usulan dalam satu siklus dan diteruskan ke tahun-tahun berikutnya jika tidak mendapatkan dana. Dalam proses perencanaan tahun demi tahun yang menggunakan sistem pemungutan suara mayoritas, kaum termiskin cenderung kalah oleh golongan mayoritas. Namun, jika proyek-proyek dapat disusun menurut prioritas untuk jangka waktu yang lebih panjang, warga desa yang miskin memiliki ruang yang lebih luas untuk berunding. Peta sosial hendaknya digunakan secara lebih efektif dalam proses perencanaan jangka panjang ini. Pendekatan ini juga berarti bahwa praktek-praktek fasilitasi perlu diubah dari mengulang proses yang sama dari tahun ke tahun menjadi membangun dan memperbaharui hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Guna menunjukkan ada tekad untuk mendanai proyek-proyek yang lebih beraneka ragam, warga desa hendaknya diberi kesempatan untuk mengajukan proyek satu lagi dan didorong untuk melaksanakan proyek-proyek dari tahun sekarang ke tahun berikutnya. Fasilitator bersama pemerintah kecamatan dan desa hendaknya dapat membahas kemungkinan-kemungkinan mendapat sumber dana yang lain, termasuk anggaran desa.
6. Sampai saat ini pelaksana kegiatan PPK di Kecamatan Karangmojo dengan nama UPK MAKMUR telah menjalankan peran dan fungsinya dengan cukup baik walaupun terdapat keterbatasan fasilitas dan personel. Untuk itu hendaknya dipikirkan tentang permasalahan fasilitas perkantoran untuk pengelola, karena saat ini hanya menempati sebuah ruangan yang

jauh kesan representatif. Dengan memiliki fasilitas ruang kantor yang memadai diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan lebih dapat meningkat. Hal tersebut karena pengelolaan dana bantuan nantinya menjadi dana abadi yang menjadi milik masyarakat di Kecamatan Karangmojo khususnya, sehingga UPK MAKMUR diharapkan menjadi semacam lembaga keuangan mikro milik pemerintah kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, John. 1996. *Sharing the City : Community Participation in Urban Management*. London : Earthscan Publications Limited.
- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Alila, Patrick O, 1998. *Strengtening Local Social Systems and People Self Organizational Capabilites for Local and Regional Development*. In Regional Development Dialogue, Vol 19 Number 2 Autumn.
- Anonimous, 1996. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta : Depdagri.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bartle, 1996. *Measuring Community Capacity Building*. 1996. Washington, DC. Aspen Institute.
- Brannen, Julia. 1987. *Mixing Methods Qualitative and Quantitative Research*. London : Allen and uwin.
- Chambers, Robert,1987, *Pembangunan Masyarakat Desa, Mulai Dari Belakang*, LP3ES, Jakarta.
- Conyers, Diana, 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. (Terjemahan Susetiawan). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Cook, Sarah dan Steve Macaulay. 1996. *Pemberdayaan yang Tepat*. (Terjemahan: Paloepi Tyas R. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Danin, Sudarwan, 2000. *Pengantar Study Penelitian Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Dunn, N William, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua: Gadjah Mada University Press.
- Friedman, John, 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Massachusetts, MIT Press.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo.
- Hadi, Sudharto P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hulme, David & M. Turner, 1990. *Sociology of Development : Theories, Policies and Practices*. Hertfordshire : Harvester Whearsheaf.
- Karl, M, 1995. *Women and Empowerment : Participation and Decision Making*. London : Zed Books Ltd.

- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Bandung, ITB.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat : Sebuah Tinjauan Administrasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi . Universitas Brawijaya, Malang, 27 Mei.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Penerbit : LP3ES
- Kieffer, C.H, 1981. *The Emergence of Empowerment : The Development of Participatory Competence Among Individuals in Organizations*. Unpublished PhD dissertation, University of Michigan . Ann Arbor.
- Korten, David C dan Sjahir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta, Yayasan Obor.
- Marwotohadi, 2005. *Evaluasi Atas Kebijakan Program Beras Bagi Keluarga Miskin Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Gunungkidul*, Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Mubyarto, 1997. *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media
- Mubyarto, 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, Yogyakarta, BPF
- Parwoto, MDS, 1997. *Pembangunan Partisipatif* . Makalah pada Loka karya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Pemukiman, 15-16 juli 1997 BKSJN. Jakarta.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2002*. Tim Koordinasi PPK. Jakarta : Depdagri, 2002.
- Soetomo, 2006. *Strategi Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Soetomo, 1995 . *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Yogyakarta. Pustaka Jaya
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugijoko, Budhi Tjahyati S. dan BS. Kusbiantoro (ed.). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Jakarta, Kompas
- ,1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Bina Rena  
Pariwara,
- , 1997. *Kebijaksanaan dan Startegi Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Bappenas,.
- Tjokrowinoto, Moeljarto,1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*,Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael P, 1997. *Economic Development in Third World*, New York, Longman Press.
- Wahab, Solichin Abdul, 1991. *Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta, Intermedia

Tugas Akhir :

- Marwatahadi, 2005, *Evaluasi Atas Kebijakan Program Beras bagi Keluarga Miskin Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di kabupaten Gunungkidul (Studi di Kecamatan Wonosari)*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sutrisno, D, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro : Fakultas Teknik, Jurusan Planologi.
- Wahyuningsih, D, 2005. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Salaman Mloyo Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro : Fakultas Teknik, Jurusan Planologi.

Lampiran 1:

**Kuesioner**  
**Dalam Rangka Penyusunan Tesis**  
**Pada Program Magister Pembangunan Wilayah dan Kota**  
**Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang**

**I. Pengantar**

Kuesioner ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) yang dilakukan untuk mendapatkan data, dalam rangka penyusunan Tesis Magister (S2) untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Penggunaan data/informasi yang didapat dari diskusi ini akan dipakai semata-mata untuk kepentingan akademis dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “*Studi Evaluasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*”.

Kuesioner ini berisi intisari materi yang perlu diketahui berkaitan dengan penulisan tesis tersebut. Diharapkan dengan adanya panduan ini, data/informasi yang diperlukan dapat diperoleh dan dapat digunakan sebagai bahan analisis pada penulisan tesis ini.

Demikian pengantar dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Warih Budiyo Setyawan

**II. Data Responden**

Nomor Responden : .....

Nama Responden : .....

Jenis Kelamin : .....

Usia : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

### III. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo?
  - a. Cukup Tahu
  - b. Kurang Tahu
  - c. Sangat Tahu
  
2. Darimanakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo?
  - a. Pernah ada sosialisasi
  - b. Mengikuti pembahasan program
  - c. Bidang pekerjaan berkaitan dengan program
  - d. Lainnya,sebutkan  
 .....  
 .....
  
3. Kapan Bapak/Ibu mengetahui tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo?  
 .....
  
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tahapan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo?
  - a. Tidak tahu
  - b. Tahu, sebutkan

.....  
 .....  
 .....

5. Siapa saja yang terlibat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo? Sebutkan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  
6. Dalam implementasi/pelaksanaan, kegiatan apa saja yang sudah sesuai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo?  
 Sebutkan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  
7. Dalam implementasi/pelaksanaan, kegiatan apa saja yang tidak sesuai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo? Sebutkan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  
8. Apakah hasil pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat Kecamatan Karangmojo?
  - a. YA
  - b. TIDAK
  
9. Apakah hasil pelaksanaan program tersebut sudah mawadahi keinginan/kepentingan masyarakat Kecamatan Karangmojo?
  - a. YA
  - b. TIDAK
  
10. Kegiatan apa saja yang sudah/belum terwadahi?

Sebutkan :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo sudah sesuai dengan kondisi dan masyarakat di Kecamatan Karangmojo?

- a. YA
- b. TIDAK

12. Jika tidak, apakah Bapak/Ibu menginginkan bentuk program baru untuk Kecamatan Karangmojo?

- a. YA
- b. TIDAK

13. Menurut Anda, bentuk Kegiatan Program apakah yang sesuai untuk Kecamatan Karangmojo?

a. Kegiatan Fisik dan Ekonomi, sebutkan

.....  
 .....

b. Pemberdayaan masyarakat, sebutkan

.....  
 .....  
 .....

c. Penguatan kelembagaan, sebutkan

.....  
 .....  
 .....

14. Menurut Anda, darimanakah sumber dana yang diusulkan?

- a. APBN
  - b. APBD
  - c. Investor
  - d. Swadaya
15. Jika program dimulai lagi dari awal, kontribusi apakah yang akan Anda berikan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo?
- a. *Sharing* (berbagi) tenaga
  - b. *Sharing* (berbagi) dana
  - c. *Sharing* (berbagi) pengelolaan
16. Apa dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo sudah melibatkan peran serta masyarakat secara aktif?
- a. YA
  - b. TIDAK
17. Jika YA, partisipasi/peran serta masyarakat dalam bentuk apakah? Sebutkan:
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
18. Jika tidak, peran serta masyarakat seperti apakah yang diusulkan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo?
- a. Masyarakat cukup dikasih tahu, pelaksanaan semua dari pemerintah
  - b. Masyarakat cukup diajak membahas pelaksanaan program
  - c. Masyarakat pelaksana utama program
  - d. Masyarakat sepenuhnya mengendalikan pelaksanaan program
19. Apakah terdapat perbedaan kondisi sebelum ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangmojo dengan kondisi sesudahnya ada program?
- a. YA
  - b. TIDAK

20. Jika YA, bagaimanakah perbedaan antara sebelum adanya program dan sesudah adanya program?

.....  
.....  
.....  
.....

21. Berapakah pendapatan Bapak/Ibu/Sdr per bulan?

- a. di bawah Rp. 500.000,-
- b. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,-
- c. Di atas Rp. 1.000.000,-

Lampiran 3 :**Lampiran Wawancara Dengan Narasumber**

1.1

Narasumber : Sumardi  
 Pekerjaan : Buruh/Swasta  
 Tempat Tinggal : Dusun Plumbungan Desa Gedangrejo  
 Waktu wawancara : Kamis, 24 Juli 2008

Hasil Wawancara:

**Sosialisasi (Sos)**

1. “Saya mengenal PPK pada saat saya mengikuti pertemuan rutin bulanan kelompok RW Yang saya tahu adalah PPK memberikan bantuan kepada warga. Bantuan fisik seperti pembangunan jalan desa dan saluran air.”
2. “Waktu itu diberitahukan kepada kami tentang program yang memberikan bantuan fisik dan bantuan untuk usaha kecil. Dan RW kami disuruh memberikan usulan untuk kegiatan fisik”.

**Kondisi (Kon)**

3. “Ya, jelas ada. Contohnya adanya pembangunan jalan. Yang dulunya *nggronjal* (=tidak rata dan berbatu) menjadi lebih halus, datar dan rata. Walaupun hanya dilakukan perkerasan dengan batu putih”.

**Pokmas (Pok)**

4. “Pokmas kami dibentuk sejak kami tahu bahwa syarat penerimaan bantuan PPK harus lewat Pokmas. Kami bersama warga lain yang tertarik membentuk sebuah pokmas”
5. “Aneka Usaha”
6. “Tidak ada pembagian tugas, yang hanyalah adanya ketua pokmas yang bertugas berkoordinasi dengan kelurahan. Ketua pokmas nantinya yang memberitahukan kepada kami tentang bantuan tersebut”

**Hambatan (Ham)**

7. “Hambatannya dapat dikatakan tidak ada, paling-paling cuma bersaing dalam memperebutkan bantuan”
8. “Usahanya ya mengikuti setiap kegiatan yang diadakan pedukuhan dan kelurahan”

**Persepsi dan Pemahaman (PP)**

9. “Ya, lumayan sesuai karena bantuan tersebut dapat digunakan untuk usaha kecil dan yang terpenting bantuan yang diberikan tidak memaknai agunan”
10. “Ya, karena dalam musyawarah itu kegiatan yang akan diusulkan mendasar kepada aspirasi masyarakat”.
11. Ya, tentu saja. Misalnya dengan adanya pembangunan jalan, dulu kendaraan baik mobil atau motor sulit untuk mencapainya sekarang menjadi lancar”.
12. “Jumlah besarnya bantuan akan diatur oleh UPK PPK Kecamatan, jumlahnya belum tentu sesuai dengan usulan kita. Kemarin kami usul pinjaman 10 juta untuk pokmas kami. Namun kami hanya diberikan 8 juta. Dengan bantuan itu kemudian kami bagi sesuai jumlah pokmas kami yaitu 10 orang, jadi masih-masing mendapat 800 ribu, lumayan dari pada tidak dapat. Kemudian kami mengangsur melalui ketua pokmas kami untuk disetorkan kepada UPK”
13. “Ya, karena pemanfaat kegiatan ekonomi sebagian besar adalah perempuan. Bahkan khusus kegiatan SPP (siman pinjam) adalah khusus bagi perempuan/ibu-ibu”
14. “Ya

15. “Program seperti ini jangan dihilangkan dan besarnya bantuan ditingkatkan”

1.2

Narasumber : Hartini  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Swasta  
 Tempat Tinggal : Dusun Plumbungan Desa Gedangrejo  
 Waktu wawancara : Kamis, 24 Juli 2008

Hasil Wawancara :

**Sosialisasi (Sos)**

1. “Pertama mengetahui PKK pada waktu mengikuti arisan ibu-ibu pedukuhan.
2. “Pak Dukuh waktu itu menyampaikan tentang PPK dan ibu-ibu akan diberikan bantuan untuk kegiatan simpan pinjam dan bantuan untuk usaha kecil-kecilan”

**Kondisi (Kon)**

3. “Ya, ada. Khusus untuk kami ibu-ibu menjadi punya modal untuk usaha kecil-kecilan misalnya berdagang sayur, berdagang makanan kecil”

**Pokmas (Pok)**

4. “Pokmas ya terbentuk ketika bantuan harus melalui pokmas tidak bisa person”
5. “Aneka Usaha”
6. “Pembagian tugasnya setiap anggota mempersiapkan syarat-syarat administrasi yang akan digunakan untuk kelengkapan syarat pokmas misalnya KTP, juga membuat buku kegiatan pokmas”

**Hambatan (Ham)**

7. “Tidak ada, cuma turunnya bantuan cukup lama”.
8. “Ya selalu hadir memantau lewat pertemuan-pertemuan arisan pedukuhan”.

**Persepsi dan Pemahaman (PP)**

9. “Kalo programnya sudah bagus ya tergantung masyarakat yang menggunakan bantuannya”.
10. “Iya, aspirasi masyarakat selalu didengar karena kegiatan ini sumbernya dari aspirasi masyarakat juga”
11. “Iya, sangat bermanfaat.
12. “Yang saya tahu, pokmas mengusulkan sejumlah bantuan dan nantinya dari UPK akan diberitahu besarnya jumlah bantuan yang akan diterima.
13. “Iya, karena kegiatan laki-laki/bapak-bapak dengan kegiatan ibu-ibu dibedakan.. Kegiatan pengajuan bantuan untuk kegiatan ekonomi yaitu simpan pinjam adalah kegiatan ibu-ibu”.
14. “Iya, dulu pada saat pencairan kami diberikan arahan agar selalu tepat waktu dan lancar dalam mengangsur, karena bantuan itu nantinya masih akan digunakan untuk masyarakat lain”.
15. “Kegiatan seperti ini terus dipertahankan dan bantuannya ditambah”.

1.3

Narasumber : Supriyati  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Swasta  
 Tempat Tinggal : Dusun Gedangan I Desa Gedangrejo  
 Waktu wawancara : Kamis, 24 Juli 2008

Hasil Wawancara:

**Sosialisasi (Sos)**

1. “Pertama mengetahui PPK pada waktu mengikuti arisan PKK di balai desa”
2. “Waktu itu datang petugas dari kecamatan yang menyampaikan tentang PPK dan ibu-ibu akan diberikan bantuan untuk kegiatan simpan pinjam dan bantuan untuk usaha kecil-kecilan”

**Kondisi (Kon)**

3. “Ya, ada. Kami mendapat bantuan pinjaman untuk modal usaha kecil-kecilan”

**Pokmas (Pok)**

4. “Pokmas ya terbentuk ketika bantuan harus melalui pokmas tidak bisa person”
5. “Aneka Usaha”
6. “Pembagian tugasnya setiap anggota mempersiapkan syarat-syarat administrasi yang akan digunakan untuk kelengkapan syarat pokmas misalnya KTP, juga membuat buku kegiatan pokmas”

**Hambatan (Ham)**

7. “Tidak ada, cuma turunnya bantuan cukup lama”.
8. “Ya selalu hadir memantau lewat pertemuan-pertemuan arisan pedukuhan”.

**Persepsi dan Pemahaman (PP)**

9. “Kalo programnya sudah bagus ya tergantung masyarakat yang menggunakan bantuannya”.
10. “Iya, aspirasi masyarakat selalu didengar karena kegiatan ini sumbernya dari aspirasi masyarakat juga”
11. “Iya, sangat bermanfaat.
12. “Yang saya tahu, pokmas mengusulkan sejumlah bantuan dan nantinya dari UPK akan diberitahu besarnya jumlah bantuan yang akan diterima.
13. “Iya, karena kegiatan laki-laki/bapak-bapak dengan kegiatan ibu-ibu dibedakan.. Kegiatan pengajuan bantuan untuk kegiatan ekonomi yaitu simpan pinjam adalah kegiatan ibu-ibu”.
14. “Iya, dulu pada saat pencairan kami diberikan arahan agar selalu tepat waktu dan lancar dalam mengangsur, karena bantuan itu nantinya masih akan digunakan untuk masyarakat lain”.
15. “Kegiatan seperti ini terus dipertahankan dan bantuannya ditambah”.

1.4

Narasumber : Suindiyah  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Swasta  
 Tempat Tinggal : Dusun Sudimoro Desa Kelor  
 Waktu wawancara : Kamis, 24 Juli 2008

Hasil Wawancara:

**Sosialisasi (Sos)**

1. “Pertama mengetahui PPK, saya diberitahu oleh Bu Lurah”.
2. “Bu Lurah bercerita tentang PPK yang akan memberikan bantuan untuk fisik dan kegiatan ibu-ibu yaitu kegiatan simpan pinjam dan ekonomi produktif”

**Kondisi (Kon)**

3. “Ya, ada. Kami jadi punya modal untuk menambah usaha jualan saya”.

**Pokmas (Pok)**

4. “Pokmas terbentuk sebagai alat menyalurkan bantuan itu”
5. “Simpan Pinjam”
6. “Pembagian tugasnya setiap anggota mempersiapkan syarat-syarat administrasi yang akan digunakan untuk kelengkapan syarat pokmas misalnya KTP, juga membuat buku kegiatan pokmas”

**Hambatan (Ham)**

7. “Tidak ada, hanya saja bantuannya tidak langsung cair tetapi harus menunggu”.
8. “Ya berpartisipasi dalam pokmas”.

**Persepsi dan Pemahaman (PP)**

9. “Sudah, karena mengenai kegiatan ekonomi produktif yang tergantung masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah hanya memberikan bantuan pinjaman untuk modal”.
10. “Iya, karena dasar kegiatan yang diajukan adalah seperti usulan dari masyarakat”
11. “Iya, sangat bermanfaat.
12. “Yang saya tahu, pokmas mengusulkan sejumlah bantuan dan nantinya dari UPK akan diberitahu besarnya jumlah bantuan yang akan diterima.
13. “Iya, karena kegiatan laki-laki/bapak-bapak dengan kegiatan ibu-ibu dibedakan.. Kegiatan pengajuan bantuan untuk kegiatan ekonomi yaitu simpan pinjam adalah kegiatan ibu-ibu”.
14. “Iya, dulu pada saat pencairan kami diberikan arahan agar selalu tepat waktu dan lancar dalam mengangsur, karena bantuan itu nantinya masih akan digunakan untuk masyarakat lain”.
15. “Kegiatan seperti ini terus dipertahankan dan bantuannya ditambah”.

1.5

Narasumber : Sri Purwani  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Swasta  
 Tempat Tinggal : Dusun Munggur Desa Ngipak  
 Waktu wawancara : Jumat, 25 Juli 2008

Hasil Wawancara:

**Sosialisasi (Sos)**

1. “Waktu itu saya mendapatkan undangan di balai dusun”
2. “Dalam pertemuan di balai dusun itu, pak lurah hadir memberikan penjelasan tentang PPK”

**Kondisi (Kon)**

3. “Ya, kami jadi tahu tentang PPK dan kami bisa manyalurkan aspirasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan”

**Pokmas (Pok)**

4. “Ya, kami membentuk kelompok-kelompok sesuai arahan desa sebagai sarana penyaluran bantuan”
5. “Aneka Usaha”
6. “Seperti umumnya organisasi ya terbagai ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.”

**Hambatan (Ham)**

7. “Tidak ada hambatan kecuali persyaratan administrasi seperti kelengkapan buku kegiatan. Dan proses pelaksanaan kegiatan atau pencairan dananya memakan waktu cukup lama”
8. “Ya berpartisipasi dalam setiap pertemuan baik kelompok maupun dusun”

**Persepsi dan Pemahaman (PP)**

9. “Kegiatannya sudah bagus, hanya saja besarnya bantuan kadang tidak sesuai keinginan”
10. “Iya, sebab kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dasarnya adalah usulan dari warga”
11. “Iya, sangat bermanfaat”
12. “Saya tidak begitu mengerti, yang saya tahu dana yang diterima adalah sekian rupiah kemudian dibagi rata dalam kelompok kami, kemudian tiap bulan kami harus mengangsur”
13. “Iya, setahu saya kegiatan ekonomi adalah kegiatan khusus perempuan”
14. “Iya, seperti dalam kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan, ada kewajiban untuk tepat waktu dalam pengembalian, karena dengan tepat waktu dana akan segera digulirkan bagiwarga lainnya”
15. “Program seperti ini terus ada dan pencairan dananya jangan terlalu lama”

1.6

Narasumber : Sudiro  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Tempat Tinggal : Dusun Ngepung Desa Karangmojo  
 Waktu wawancara : Jum'at , 25 Juli 2008

Hasil Wawancara:

#### **Sosialisasi (Sos)**

1. "Saya mengenal PPK pada saat saya mengikuti pertemuan rutin bulanan kelompok RW Yang saya tahu adalah PPK memberikan bantuan kepada warga. Bantuan fisik seperti pembangunan jalan desa dan saluran air."
2. "Waktu itu diberitahukan kepada kami tentang program yang memberikan bantuan fisik dan bantuan untuk usaha kecil. Dan RW kami disuruh memberikan usulan untuk kegiatan fisik".

#### **Kondisi (Kon)**

3. "Ya, jelas ada. Contohnya adanya pembangunan jalan. Yang dulunya *nggronjal* (=tidak rata dan berbatu) menjadi lebih halus, datar dan rata. Walaupun hanya dilakukan perkerasan dengan batu putih dan dulu sebelum dibangun jembatan penghubung, dusun kami seperti terisolir, karena kendaraan –kendaraan besar sulit masuk ke sini dan harus memutar sejauh 8 km. Sekarang setelah ada jembatan ini kendaraan-kendaraan besar bisa masuk ke sini, sehingga pedagang-pedagang dengan kendaraan-kendaraan besar mau sampai dusun kami....."

#### **Pokmas (Pok)**

4. "Pokmas kami dibentuk sejak kami tahu bahwa syarat penerimaan bantuan PPK harus lewat Pokmas. Kami bersama warga lain yang tertarik membentuk sebuah pokmas"
5. "Aneka Usaha"
6. "Tidak ada pembagian tugas, yang hanyalah adanya ketua pokmas yang bertugas berkoordinasi dengan kelurahan. Ketua pokmas nantinya yang memberitahukan kepada kami tentang bantuan tersebut"

#### **Hambatan (Ham)**

7. "Hambatannya dapat dikatakan tidak ada, paling-paling cuma bersaing dalam memperebutkan bantuan"
8. "Usahanya ya mengikuti setiap kegiatan yang diadakan pedukuhan dan kelurahan"

#### **Persepsi dan Pemahaman (PP)**

9. "Ya, lumayan sesuai karena bantuan tersebut dapat digunakan untuk usaha kecil dan yang terpenting bantuan yang diberikan tidak memaknai agunan"
10. "Ya, karena dalam musyawarah itu kegiatan yang akan diusulkan mendasar kepada aspirasi masyarakat"
11. Ya, tentu saja. Misalnya dengan adanya pembangunan jalan, dulu kendaraan baik mobil atau motor sulit untuk mencapainya sekarang menjadi lancar".
12. "Jumlah besarnya bantuan akan diatur oleh UPK PPK Kecamatan, jumlahnya belum tentu sesuai dengan usulan kita. Kemarin kami usul pinjaman 10 juta untuk pokmas kami. Namun kami hanya diberikan 8 juta. Dengan bantuan itu kemudian kami bagi sesuai jumlah pokmas kami yaitu 10 orang, jadi masih-masing mendapat 800 ribu, lumayan dari pada tidak dapat. Kemudian kami mengangsur melalui ketua pokmas kami untuk disetorkan kepada UPK"
13. "Ya, karena pemanfaat kegiatan ekonomi sebagian besar adalah perempuan. Bahkan khusus kegiatan SPP (siman pinjam) adalah khusus bagi perempuan/ibu-ibu"

14. “Ya
15. “Program seperti ini jangan dihilangkan dan besarnya bantuan ditingkatkan”

## 1.7

Narasumber : Supriyanti  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/PNS  
 Tempat Tinggal : Dusun Kayuwalang Desa Wiladeg  
 Waktu wawancara : Jumat, 25 Juli 2008

Hasil Wawancara :

**Sosialisasi (Sos)**

1. “Yang mengenalkan adalah petugas dari kecamatan”
2. “Saya mengetahui PPK dari pertemuan PKK dusun, waktu itu pak dukuh menyampaikan adanya PPK dan meminta ibu-ibu berpartisipasi dalam program tersebut dengan mengajukan pinjaman untuk usaha kecil-kecilan atau hanya simpan pinjam saja”.

**Kondisi (Kon)**

3. “Iya sebagai contoh desa kami dapat memperbaiki gedung TK yang telah rusak”

**Pokmas (Pok)**

4. “Ya sesuai anjuran dari desa bahwa untuk dapat menerima bantuan harus melalui pokmas, jadi kami membentuk sebuah pokmas”
5. “Simpan pinjam dan aneka usaha”
6. “Semua diputuskan bersama tidak ada pembagian tugas”

**Hambatan (Ham)**

7. “Tidak ada, hanya saat pembentukan pokmas kami harus melengkapi syarat-syarat administrasi seperti kelengkapan pokmas dan dapat menunjukkan bahwa pokmas benar-benar ada”
8. “Ya berpartisipasi dalam setiap kegiatan”.

**Persepsi dan Pemahaman (PP)**

9. “Ya, kalau kegiatannya ekonomi kita yang menentukan hanya saja besarnya bantuan terkadang belum sesuai harapan”.
10. “Iya, sebab aspirasi warga lah yang didengar dan dipergunakan dalam penentuan setiap kegiatan”.
11. “Iya, seperti dibangunnya jalan di Dusun Kenteng, dulu kendaraan pedagang-pedagang hasil pertanian enggan mengambil panen ke sana, setelah dibangun jalan (jalan diperbaiki) sudah tidak menjadi masalah”.
12. “Yang saya tahu UPK Kecamatan, mencairkan bantuan dengan mendatangi balai desa dan kemudian diserahkan bersama-sama. Sedangkan besarnya dana macam-macam sesuai usulan dan besarnya dana yang ada”.
13. “Iya sudah karena kami selalu diundang dalam setiap tahapan kegiatan yang diadakan desa”.
14. “Iya, karena bantuan tersebut sangat berguna dan kami masih dijanjikan ke depannya bisa memanfaatkannya lagi, sehingga kami merasa ikut bertanggungjawab”.
15. “PPK dipertahankan dan kalau bisa masing-masing dusun diberikan kegiatan fisik”

## 1.8

Narasumber : Subardjo

Pekerjaan : Swasta / Penjahit  
 Tempat Tinggal : Dusun Sokoliman Desa Bejiharjo  
 Waktu wawancara : Sabtu , 26 Juli 2008

Hasil Wawancara :

**Sosialisasi (Sos)**

1. “Yang mengenalkan adalah Ketua RW Bapak Suhardi”
2. “PPK kami ketahui dari penjelasan RW pada saat pertemuan bulanan di RW”

**Kondisi (Kon)**

3. “Ya, sebelumnya dusun kami tidak mempunyai pasar yang permanent sekarang dusun kami mempunyai los pasar yang cukup baik”

**Pokmas (Pok)**

4. “Setahu saya pokmas terbentuk sebagai syarat pengajuan bantuan, jadi begitu ada PPK masyarakat membentuk pokmas. Walaupun sebelumnya sudah terbentuk secara tidak resmi”.
5. “Kebetulan saya tidak tergabung dalam pokmas, namun banyak tetangga kami yang menjadi anggota pokmas, baik PKK maupun Dasa Wisma”.
6. “Tidak Tahu”.

**Hambatan (Ham)**

7. “Hambatannya tidak ada , cuma adanya rebutan tempat lokasi kegiatan fisik dan juga besaran iuran untuk swadaya”.
8. “Ya segala sesuatunya dimusyawarahkan dan selalu berhubungan dengan pihak dusun dan desa”.

**Persepsi dan Pemahaman (PP)**

9. “Saya rasa sudah, karena bantuan yang diberikan memang untuk kegiatan masyarakat”.
10. “Iya, masyarakat memang dipenuhi keinginannya dalam proyek ini”.
11. “Ya, yang seperti saya bilang tentang dibangunnya los pasar, dengan dibangunnya los pasar maka kami mempunyai tempat untuk berdagang yang cukup layak”.
12. “Setahu saya, pokmas diberikan bantuan dana sesuai jumlah dana yang tersedia dan disesuaikan dengan jumlah kelompok yang membutuhkan”
13. “Iya, karena ibu-ibu di sini sekarang semakin sering musyawarah baik arisan atau pertemuan lainnya dan membicarakan tentang PPK”.
14. “Ya jelas, kami harus dapat memelihara hasil seperti los pasar itu agar tidak rusak bahkan kalau diperbaiki akan kami lakukan swadaya”.
15. “Program seperti ini layak dipertahankan dan besaran dananya ditambah menjadi lebih besar”.

1.9

Narasumber : Wahyudi  
 Pekerjaan : Swasta/ Pedagang  
 Tempat Tinggal : Dusun Bendungan Desa Bendungan  
 Waktu wawancara : Senin, 28 Juli 2008

Hasil Wawancara :

**Sosialisasi (Sos)**

1. “Saya tahu PPK dari tetangga saya yang kebetulan perangkat desa”

2. “Setelah saya tahu dari Pak Heri (Perangkat Desa) kemudian dalam pertemuan kelompok RW, kami masih diberitahu tentang PPK”

**Kondisi (Kon)**

3. “Ya, lumayan, karena PPK memberikan bantuan pembangunan di Desa Bendungan dan juga adanya bantuan dana untuk simpan pinjam dan modal usaha”

**Pokmas (Pok)**

4. “Ya, pokmas dibentuk seperti kelompok arisan RW atau PKK itu, hanya saja kemudian karena ada PPK dibuat lebih baik, dari segi administratifnya”
5. “Setahu saya macam-macam, ada yang simpan pinjam dan aneka usaha”
6. “Pembagian tugasnya ya terbatas pada ketua dan anggota kelompok, dan ketua kelompok yang harus berhubungan dengan dusun atau desa”

**Hambatan (Ham)**

7. “Setahu saya tidak ada, ya Cuma satu dua orang terlambat dalam pengembalian angsuran”
8. “Usahnya ya, melakukan swadaya dalam kegiatan fisik. Kami merasa malu kalau pembangunan fisik yang ada nantinya asal-asalan. Toh, hasilnya tersebut nanti kita juga yang menikmatinya”

**Perepsi dan Pemahaman (PP)**

9. “Sesuai itu tidak sebenarnya tergantung masing-masing orang, kita dikasih bantuan dan disuruh menggunakan bantuan tersebut. Kalau pintar ya bisa jadi banyak (buat modal) kalau gak bisa *ngecakke* (=menggunakan) ya gimana lagi”.
10. “Iya, itu benar sekali, karena kegiatan yang menentukan masyarakat sendiri bukan dari kecamatan”
11. “Bermanfaat sekali, coba dibayangkan dengan jalan yang jelek orang luar pasti enggan masuk ke dusun yang jalannya jelek, tetapi setelah diperbaiki walau dengan cor rabat beton, jadi lancar”.
12. “Ya kita mengajukan lewat desa kemudian UPK akan mencairkannya”
13. “Sudah, buktinya ada musyawarah khusus perempuan dan kegiatan simpan pinjam hanya untuk perempuan”.
14. “Iya, jelas bahkan setelah ada pembangunan fisik seperti ini mungkin kami akan melakukan swadaya untuk lebih menyempurnakannya”.
15. “Program PPK bagus sekali dan benar-benar melibatkan masyarakat sehingga PPK harus selalu ada dan dipertahankan”

1.10

Narasumber : Purwanto  
 Pekerjaan : Swasta/ Pedagang  
 Tempat Tinggal : Dusun Pengkol Desa Jatiayu  
 Waktu wawancara : Selasa, 28 Juli 2008

Hasil Wawancara :

**Sosialisasi (Sos)**

1. “Saya mengenal PPK pada saat saya mengikuti pertemuan rutin bulanan kelompok RW”.
2. “Waktu itu diberitahukan kepada kami tentang program yang memberikan bantuan fisik dan bantuan untuk usaha kecil. Dan RW kami disuruh memberikan usulan untuk kegiatan fisik”.

**Kondisi (Kon)**

3. “Ya, jelas ada. Contohnya adanya pembangunan jalan. Yang dulunya *nggronjal* (=tidak rata dan berbatu) menjadi lebih halus, datar dan rata. Walaupun hanya dilakukan perkerasan dengan batu putih”.

#### **Pokmas (Pok)**

4. “Pokmas kami dibentuk sejak kami tahu bahwa syarat penerimaan bantuan PPK harus lewat Pokmas. Kami bersama warga lain yang tertarik membentuk sebuah pokmas”
5. “Aneka Usaha”
6. “Tidak ada pembagian tugas, yang hanyalah adanya ketua pokmas yang bertugas berkoordinasi dengan kelurahan. Ketua pokmas nantinya yang memberitahukan kepada kami tentang bantuan tersebut”

#### **Hambatan (Ham)**

7. “Hambatannya dapat dikatakan tidak ada, paling-paling cuma bersaing dalam memperebutkan bantuan”
8. “Usahnya ya mengikuti setiap kegiatan yang diadakan pedukuhan dan kelurahan”

#### **Persepsi dan Pemahaman (PP)**

9. “Ya, lumayan sesuai karena bantuan tersebut dapat digunakan untuk usaha kecil dan yang terpenting bantuan yang diberikan tidak memakai agunan”
10. “Ya, karena dalam musyawarah itu kegiatan yang akan diusulkan mendasar kepada aspirasi masyarakat”.
11. Ya, tentu saja. Misalnya dengan adanya pembangunan jalan, dulu kendaraan baik mobil atau motor sulit untuk mencapainya sekarang menjadi lancar”.
12. “Jumlah besarnya bantuan akan diatur oleh UPK PPK Kecamatan, jumlahnya belum tentu sesuai dengan usulan kita. Kemarin kami usul pinjaman 10 juta untuk pokmas kami. Namun kami hanya diberikan 8 juta. Dengan bantuan itu kemudian kami bagi sesuai jumlah pokmas kami yaitu 10 orang, jadi masih-masing mendapat 800 ribu, lumayan dari pada tidak dapat. Kemudian kami mengangsur melalui ketua pokmas kami untuk disetorkan kepada UPK”
13. “Ya, karena pemanfaat kegiatan ekonomi sebagian besar adalah perempuan. Bahkan khusus kegiatan SPP (siman pinjam) adalah khusus bagi perempuan/ibu-ibu”
14. “Ya
15. “Program seperti ini jangan dihilangkan dan besarnya bantuan ditingkatkan”

1.11

Narasumber : Nawirin PS  
 Pekerjaan : Pensiunan / Tokoh Masyarakat  
 Waktu wawancara : Rabu, 29 Juli 2008

Hasil Wawancara :

(Ketika dimintai tanggapan dan pandangan tentang PPK) /

#### **Persepsi dan Pemahaman (PP) . 10**

*“..menurut saya, PPK adalah program yang melatih masyarakat untuk bertanggung jawab sekaligus dapat merencanakan sendiri program pembangunan yang diinginkan. Walau agak sedikit membikin repot namun saya rasa masyarakat merasa senang karena terlibat secara langsung.....”*

1.12

Narasumber : Karno  
 Pekerjaan : Ketua UPK PPK 'Makmur'  
 Waktu wawancara : Rabu, 29 Juli 2008

1. "Saya tidak tahu pasti, setahu saya PPK mengenai lokasi ditentukan oleh pusat dan salah satu yang mendapatkannya adalah Kecamatan Karangmojo. Atau bisa saja karena Kecamatan Karangmojo salah satu kecamatan yang menerima IDT".
2. "PPK Kecamatan Karangmojo didukung oleh Fasilitator Kecamatan Bidang Pemberdayaan dan Fasilitator Bidang Teknik, jadi bantuan yang diberikan adalah bimbingan teknis dalam pengerjaan kegiatan fisik dan kegiatan ekonomi dibantu oleh Fasilitator Pemberdayaan".
3. "Sejauh ini baik-baik saja tidak ada masalah berarti, pelaksanaan kegiatan fisik berjalan sebagaimana mestinya sesuai aspirasi dan keinginan masyarakat, sedangkan kegiatan ekonomi perguliran dana, kami terus menggulirkan dana tersebut ke 9 desa secara terus-menerus"
4. "Hambatan sampai saat ini, Cuma ada beberapa kelompok yang menunggak angsuran".
5. "Usahnya yang selalu berkomunikasi dengan masyarakat langsung, desa dan dusun".
6. "Bantuan diberikan dalam bentuk bantuan kegiatan fisik dan bantuan untuk kegiatan ekonomi (simpan pinjam dan UEP)".
7. "Ya, saya rasa seperti itu walaupun belum maksimal, tapi saya melihat ada perkembangan kearah seperti itu, kelembagaan LPMD (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa) telah berperan sebagai lembaga pembangunan yang mampu menterjemahkan aspirasi masyarakat".
8. "Iya, dengan segala keterbatasan yang ada baik jumlah personel maupun kondisi kantor kami selalu memaksimalkan kegiatan PPK ini".
9. "Iya, masyarakat menjadi bisa berusaha walaupun usaha kecil-kecilan paling tidak memberikan harapan terhadap keinginan untuk menjadi lebih baik"  
 "pokmas menjadi saran belajar masyarakat terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan"  
 "perempuan menjadi mempunyai saluran dalam berkegiatan dan adanya bimbingan terhadap pengelolaan keuangan dan usaha"
10. "Iya, hal seperti itu terlihat dari semangat masyarakat melaksanakan pembangunannya sendiri walaupun dananya dari pemerintah dan munculnya semangat merencanakan pembangunan-pembangunan walaupun di tingkat lokal dan untuk adanya bantuan modal usaha walaupun kecil namun cukup memberikan harapan terhadap usaha yang berkembang".
11. "Sejauh ini tidak ada"
12. "PPK terus dipertahankan dan besarnya dana bantuan menjadi lebih besar"

#### 1.12

Narasumber : Tugiyem  
 Pekerjaan : Sekretaris UPK PPK 'Makmur'  
 Waktu wawancara : Jumat, 31 Juli 2008

Hasil Wawancara :

1. ‘Latar belakangnya ya karena dipandang Kecamatan Karangmojo masih termasuk kecamatan yang memerlukan bantuan’.
2. “Pembinaan yang dilakukan adalah pendampingan untuk pelaksanaan kegiatan fisik dan pembinaan dalam kegiatan ekonomi yaitu agar dana bantuan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang bermanfaat agar bisa mengembalikan dengan lancar”.
3. “Sejauh yang saya ketahui, pelaksanaannya masih lancar, untuk kegiatan fisik seperti yang diinginkan masyarakat sedangkan perguliran dana masih tetap berlangsung”.
4. “Tidak ditemukan hambatan yang sulit hanya saja pada saat mengambil keputusan tentang lokasi kegiatan fisik, di mana desa lainnya sebenarnya juga membutuhkan bantuan namun kalah bersaing dengan desa lainnya, ada perasaan sungkan dan kasihan terhadap masyarakat”.
5. “Dari UPK kegiatan yang dilakukan adalah selalu menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Dusun “.
6. “Kegiatan pembangunan prasarana fisik, kesehatan, pendidikan dan bantuan ekonomi”.
7. “Ya setahu saya iya, masyarakat menjadi lebih tahu kehidupan berlembaga dan berorganisasi”.
8. “Iya, semampunya sesuai kemampuan, kami berusaha memberikan yang terbaik buat masyarakat walaupun fasilitas yang ada masih serba terbatas”.
9. “iya, misalnya kegiatan perempuan, mereka jadi punya bantuan dana untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan walaupun masih dalam kondisi terbatas atau kecil, banyak ibu-ibu yang mulai berjualan makanan kecil dan makanan ringan kemudian ada juga yang berjualan sayuran keliling sedangkan pengelolaan keuangan yang mereka belajar bersama melalui kegiatan pokmas”
10. “Iya, walaupun belum maksimal namun dapat keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan semakin terasa”.
11. “Tidak ada”
12. “Bantuan program terus dipertahankan dan besarnya bantuan dinaikkan”

### 1.13

Narasumber : Ir. Sunardjo  
 Pekerjaan : Mantan PjOK PPK Kecamatan Karangmojo  
 Waktu wawancara : Jumat , 31 Juli 2008

#### Hasil Wawancara :

1. “Sebenarnya PPK diberikan adalah salah satu pemberian bantuan kepada masyarakat agar masyarakat sedikit terbantu dengan kegiatan kegiatan dalam PPK. Program itu adalah rangkaian dari Program IDT yang kemudian disempurnakan dengan berbagi program salah satunya adalah PPK. Sedangkan mengenai dipilihnya Kecamatan Karangmojo adalah karena Kecamatan Karangmojo masih dipandang sebagai kecamatan penerima IDT dan dirasa masih mempunyai jumlah penduduk miskin yang cukup banyak”.
2. “Dulu kita ada Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan, FT untuk menangani kegiatan pembangunan prasarna fisik sedangkan Fasilitator Pemberdayaan untuk menangani kegiatan ekonomi produktif”.
3. “Kegiatan PPK sangat bagus untuk proses pembangunan di level bawah, bahwa

4. ‘Hambatan tidak ada hanya saja pada awal-awal penentuan kegiatan masing-masing dusun/desa saling berebut meminta jatah pembangunan’.
5. “Usahnya ya dengan memanfaatkan kondisi sosial budaya yang ada dalam masyarakat sendiri / kearifan lokal seperti perilaku gotong royong, gugur gunung dsb untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam PPK. Usaha lainnya adalah selalu menjalin komunikasi dengan *stake holder* dengan begitu kita akan selalu mengetahui apa yang ada dalam suasana kebatinan masyarakat itu sendiri”.
6. ‘Bantuan diberikan dalam bentuk pembangunan prasarana fisik yang diwujudkan dalam bentuk pengerasan jalan, cor rabat beton bahkan jembatan, juga ada yang membangun los pasar, sedangkan untuk kegiatan ekonomi adalah bantuan dana simpan pinjam dan bantuan modal usaha walaupun masih dalam skala kecil”.
7. ‘Ya, seperti yang bisa dilihat bahwa masyarakat tergabung jadi satu menjadi pokmas merupakan salah satu pembelajaran dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan desa sebagai lembaga yang resmi akan senantiasa menjadi jembatan penghubung antara masyarakat bawah dengan pemerintahan di atasnya yaitu kecamatan”.
8. “Menurut saya sudah cukup bagus walaupun belum maksimal karena adanya keterbatasan personel dan parasarana perkantornya”.
9. “Peningkatan ekonomi produktif jelas, hal itu bisa dilihat dari munculnya semangat wirausaha yang muncul di masyarakat khususnya ibu-ibu hal tersebut juga menjadi tanda partisipasi perempuan yang cukup baik”.
10. “Ya, semangat pemberdayaan dalam masyarakat sangatlah bagus bagi program pembangunan . Pemberdayaan akan terbagi menjadi pemberdayaan politik, sosial budaya dan ekonomi”.
11. “Pernah ada, namun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan”.
12. “Pada prinsipnya PPK telah dijalankan sesuai ketentuan yang telah digariskan dan benar-benar kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Untuk itu ke depan haruslah peran serta masyarakat lebih ditingkatkan dan benar-benar melibatkan masyarakat di lapisan terbawah, karena saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum terkena dampak dari program. PPK sebagai program penanggulangan kemiskinan walaupun secara tidak langsung artinya dengan adanya program dilaksanakan tidak serta merta mampu memberantas kemiskinan namun secara pelan tapi pasti masyarakat mampu memberdayakan dirinya sendiri sehingga kemiskinan akan berkurang. Program seperti ini layak dipertahankan dan lebih ditambah komponen-komponennya”

#### 1.14

Narasumber : Rohmad Said, SE  
 Pekerjaan : Mantan FK PPK Kecamatan Karangmojo  
 Waktu wawancara : Jumat , 31 Juli 2008  
 Hasil Wawancara :

1. “Latar belakangnya ya karena Kecamatan Karangmojo masih dianggap wilayah yang masih banyak masyarakat kurang mampu dan wilayah-wilayahnya masih belum terjangkau pembangunan prasarana”.

2. “Pemberian Bantuan Teknis dalam pengerjaan atau pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana dan pemberian masukan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, semisal pelatihan-pelatihan yang juga merupakan permintaan masyarakat”.
3. “PPK adalah program yang memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk benar-benar aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan, mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Untuk itu masyarakat harus benar-benar dirangkul dan diberdayakan”.
4. “Hambatannya tidak ada, ya paling beberapa hal ringan semisal bentuk atau desain pekerjaan fisik dan keterlambatan angsuran”.
5. “Usahnya ya selalu berhubungan dengan instansi terkait, FKab, kemudian selalu melakukan koordinasi dengan masyarakat melalui desa dan dusun”.
6. “Bantuan kegiatan fisik dan bantuan untuk kegiatan ekonomi”
7. “Sepengetahuan saya sudah ke arah seperti demikian, lembaga-lembaga desa menjadi mampu untuk melakukan proses pembangunan sendiri dan juga dengan mengedepankan pelibatan masyarakat”.
8. “Ya, walaupun belum maksimal namun sudah cukup bagus hal tersebut juga disebabkan faktor terbatasnya personel dan keterbatasan sarana kantor UPK”.
9. “Ada, lihat saja di masyarakat telah banyak kaum perempuan atau ibu-ibu yang memanfaatkan keahliannya untuk usaha ekonomi produktif walaupun kecil-kecilan dari situ juga masyarakat melalui pokmas juga bersama-sama mengelola bantuan dana yang diterima”
10. “Sudah, semangat pemberdayaan bisa dilihat dengan adanya budaya aktif dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan tingkat lokal, juga dengan berdayanya secara ekonomi dengan adanya kegiatan-kegiatan PPK”.
11. “Pernah ada, namun diselesaikan secara kekeluargaan”.
12. “Program seperti PPK sangat mengena dan benar-benar membantu masyarakat dan cenderung program yang berkelanjutan cukup bisa diandalkan. Program seperti ini harus benar-benar dipertahankan bahkan dikembangkan lebih baik lagi”.

#### 1.15

Narasumber : Yustina Kesmiyanti  
 Pekerjaan : Kepala Desa Kelor  
 Waktu wawancara : Sabtu , 1 Agustus 2008  
 Hasil Wawancara :

(Ketika ditanyakan apakah PPK benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tanggapan seputar PPK)

*“...dibangunnya jalan yang menghubungkan Dusun Ngunut Kidul dengan Dusun Sudimoro (pusat desa) menjadikan kelancaran transportasi yang berimbas kepada lancarnya barang modal yang masuk ke sana. Dan juga hasil-hasil pertanian juga cepat diangkut untuk disalurkan ke pasar, karena sekarang mobil-mobil pengangkut bias semakin dekat ke lokasi pertanian...”*

1.16

Narasumber : Sukoyo, BE  
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat/Ketua TPK Desa Gedangrejo  
Waktu wawancara : Minggu , 2 Agustus 2008  
Hasil Wawancara :

(Ketika diminta tanggapannya terhadap swadaya warga dalam PPK)

*“warga sangat rela memberikan bantuan berupa tenaga (bagi yang hanya dapat memberikan bantuan tenaga) dan materiil demi terlaksananya pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh PPK. Warga merasa bahwa program itu nantinya akan dimanfaatkan oleh mereka sendiri.”*

1.17

Narasumber : Sakidjo, S.Pd  
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Desa Bejiharjo  
Waktu wawancara : Senin , 3 Agustus 2008  
Hasil Wawancara :

(Ketika diminta tanggapannya terhadap swadaya warga dalam PPK)

*“kami merasa malu jika kegiatan yang dilaksanakan hasilnya hanya asal-asalan, untuk itu kami lebih baik menarik dana dari masyarakat sendiri (swadaya), dengan begitu kamu merasa puas dengan hasil kegiatan tersebut. Pembangunan tersebut nantinya akan dinikmati kami, semua warga Bejiharjo”*

